PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P- RENJA)

BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN 2025

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jalan Jenderal Feisal Tanjung No. Telp. 0631-371439 / Fax. 0631-371573 Pandan 22611

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Jenderal Feisal Tanjung No. Telp. (0631) 371439 Fax. (0631) 371573
PANDAN - 22611

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 000F/341 /BPTT/UMUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 935/BPTT/2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 bertugas mempersiapkan, mengumpulkan dan menyiapkan data dan menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 20 Mei 2025

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

ANTON SUJARWO BINTI S,

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor : 000.7/841/BPTT/UMUM/2025
Tanggal : 20 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENGARAH
PENANGGUNG JAWAB : Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

KETUA : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

ANGGOTA :
1. Kabid Litbang Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Kabid PKPM Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kabid PISDA Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Kabid PPEPD Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Kasubbag Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Peneliti Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
11. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
12. Peneliti Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
13. Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
14. Usman Fadhli, SE

Dipindai dengan CamScanner

15. Yudhiansyah, ST
16. Anoi Simanjuntak, S.Kom.
17. Baharuddin Siregar, SAP
18. Lilyana Hutabarat, SAP
19. Rusmulyadi

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH



ANTON SUJARWO BINTI S

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	I- 1
	1.1. Latar Belakang	I- 1
	1.2. Landasan Hukum	I- 2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I- 4
	1.4. Sistematika Penulisan	I- 4
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025**	II- 1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025	II- 1
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.**	III-1
BAB IV	**PENUTUP**	IV- 1

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 s/d 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang selanjutnya dijabarkan kedalam Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025 guna mendukung pencapaian tujuan serta sasaran Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah tahun selanjutnya.

Pandan, 20 Mei **2025**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790621 199912 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD (P- Renja SKPD) atau saat ini disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah (P- Renja PD) merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan OPD yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai perangkat daerah yang juga memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (bagian ketiga UU 25/2004).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana dimaksud adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan perubahan Renja Bappeda Tahun 2025.

Adapun hal yang menyebabkan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Bapppeda tahun 2025 antara lain:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
c. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
d. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja:
e. Adanya peraturan yang menyebabkan perubahan.

Dipindai dengan CamScanner

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 ini berpedoman kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta memperhatikan Rencana Strategis Bapppeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026. Selanjutnya Perubahan Renja Bapppeda Tahun 2025 memuat program/kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan Perkiraan Perubahan tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;

Dipindai dengan CamScanner

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 adalah:

1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2025

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV. PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025 Sampai Triwulan Kesatu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Triwulan Kesatu.

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 (satu) yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal di atas , rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi capaian kinerja 10,07% sebesar Rp. 97.159.879 ,- dengan predikat kinerja rendah.

B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024 mencakup beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 realisasi capaian kinerja 8,53% Sebesar Rp. 70.959.000 ,- dengan predikat kinerja rendah.

C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024 mencakup beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 realisasi capaian kinerja 13,38% Sebesar Rp 49.704.000 .,- dengan predikat kinerja rendah.

D. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Dalam Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah mencakup beberapa kegiatan yaitu:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 realisasi capaian kinerja 0,91% Sebesar Rp. 42.486.000 ,- dengan predikat kinerja rendah.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA - P APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan melakukan review realisasi anggaran tahun berjalan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya. Peraturan tersebut telah menyebabkan perubahan pada daerah termasuk pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah. Seluruh sub kegiatan dan jumlahnya telah mengalami perubahan pada rancangan rencana kerja Tahun 2025.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BAPPEDA

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
BAPPEDA																			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 9.764.935.853	Rp. 146.063.620			Rp. 9.910.999.473	Rp. 8.074.756.978	Rp. 144.130.000			Rp. 8.218.916.978	Rp. 11.517.999.914,00
5	01				PERENCANAAN				Rp. 5.844.543.378	Rp. 144.130.000			Rp. 5.988.673.378	Rp. 5.819.416.506	Rp. 144.130.000			Rp. 5.963.546.506	Rp. 7.272.999.914,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 4.941.336.852	Rp. 144.130.000			Rp. 5.085.466.852	Rp. 4.725.625.604	Rp. 144.130.000			Rp. 4.869.755.604	Rp. 5.825.500.000,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 2.895.990				Rp. 2.895.990	Rp. 2.067.324				Rp. 2.067.324	Rp. 3.200.000,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 1.448.106				Rp. 1.448.106	Rp. 873.792				Rp. 873.792	Rp. 1.600.000,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 1.447.884				Rp. 1.447.884	Rp. 1.193.532				Rp. 1.193.532	Rp. 1.600.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 4.105.793.300				Rp. 4.105.793.300	Rp. 4.105.793.300				Rp. 4.105.793.300	Rp. 4.800.000.000,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 4.105.793.300				Rp. 4.105.793.300	Rp. 4.105.793.300				Rp. 4.105.793.300	Rp. 4.800.000.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 441.480.428				Rp. 441.480.428	Rp. 228.657.846				Rp. 228.657.846	Rp. 408.000.000,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 9.285.483				Rp. 9.285.483	Rp. 9.285.483				Rp. 9.285.483	Rp. 17.000.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 29.996.196				Rp. 29.996.196	Rp. 19.995.340				Rp. 19.995.340	Rp. 42.000.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 28.998.750				Rp. 28.998.750	Rp. 12.168.930				Rp. 12.168.930	Rp. 35.000.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 23.199.999				Rp. 23.199.999	Rp. 10.207.893				Rp. 10.207.893	Rp. 34.000.000,00
5	01	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 175.000.000				Rp. 175.000.000	Rp. 280.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 5.670.000	Rp. 144.130.000			Rp. 149.800.000	Rp. 5.670.000	Rp. 144.130.000			Rp. 149.800.000	Rp. 67.000.000,00
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 5.670.000	Rp. 144.130.000			Rp. 149.800.000	Rp. 5.670.000	Rp. 144.130.000			Rp. 149.800.000	Rp. 67.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 237.497.134				Rp. 237.497.134	Rp. 237.497.134				Rp. 237.497.134	Rp. 194.300.000,00
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 2.497.300				Rp. 2.497.300	Rp. 2.497.300				Rp. 2.497.300	Rp. 2.300.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 183.000.000				Rp. 183.000.000	Rp. 183.000.000				Rp. 183.000.000	Rp. 150.000.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 51.999.834				Rp. 51.999.834	Rp. 51.999.834				Rp. 51.999.834	Rp. 42.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 148.000.000				Rp. 148.000.000	Rp. 148.000.000				Rp. 148.000.000	Rp. 353.000.000,00
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 81.000.000				Rp. 81.000.000	Rp. 81.000.000				Rp. 81.000.000	Rp. 290.000.000,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 43.000.000,00
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 6.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 14.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Rp. 522.208.602				Rp. 522.208.602	Rp. 841.284.033				Rp. 841.284.033	Rp. 817.499.914,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				Rp. 389.999.750				Rp. 389.999.750	Rp. 748.191.510				Rp. 748.191.510	Rp. 717.000.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 149.999.973				Rp. 149.999.973	Rp. 90.498.663				Rp. 90.498.663	Rp. 170.000.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 239.999.777				Rp. 239.999.777	Rp. 657.692.847				Rp. 657.692.847	Rp. 547.000.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp. 69.999.962				Rp. 69.999.962	Rp. 60.204.732				Rp. 60.204.732	Rp. 115.499.914,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 69.999.962				Rp. 69.999.962	Rp. 60.204.732				Rp. 60.204.732	Rp. 115.499.914,00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				Rp. 62.208.890				Rp. 62.208.890	Rp. 32.857.791				Rp. 32.857.791	Rp. 85.000.000,00
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 62.208.890				Rp. 62.208.890	Rp. 32.857.791				Rp. 32.857.791	Rp. 85.000.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp. 380.997.924				Rp. 380.997.924	Rp. 252.526.869				Rp. 252.526.869	Rp. 530.000.000,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Rp. 153.998.291				Rp. 153.998.291	Rp. 101.880.045				Rp. 101.880.045	Rp. 300.000.000,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.998.590				Rp. 76.998.590	Rp. 50.958.032				Rp. 50.958.032	Rp. 150.000.000,00
5	01	03	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.999.701				Rp. 76.999.701	Rp. 50.922.013				Rp. 50.922.013	Rp. 150.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Rp. 75.999.875				Rp. 75.999.875	Rp. 57.726.587				Rp. 57.726.587	Rp. 80.000.000,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 75.999.875				Rp. 75.999.875	Rp. 57.726.587				Rp. 57.726.587	Rp. 80.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Rp. 150.999.758				Rp. 150.999.758	Rp. 92.920.237				Rp. 92.920.237	Rp. 150.000.000,00
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.999.758				Rp. 150.999.758	Rp. 92.920.237				Rp. 92.920.237	Rp. 150.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				Rp. 3.920.392.475	Rp. 1.933.620			Rp. 3.922.326.095	Rp. 255.370.472	Rp. 0			Rp. 255.370.472	Rp. 4.245.000.000,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Rp. 3.920.392.475	Rp. 1.933.620			Rp. 3.922.326.095	Rp. 255.370.472	Rp. 0			Rp. 255.370.472	Rp. 4.245.000.000,00
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Rp. 1.548.326.786				Rp. 1.548.326.786	Rp. 177.711.185				Rp. 177.711.185	Rp. 1.813.000.000,00
5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 249.999.888				Rp. 249.999.888	Rp. 148.073.613				Rp. 148.073.613	Rp. 350.000.000,00
5	05	02	2.01	0008	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 219.999.718				Rp. 219.999.718	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 270.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	05	02	2.01	0011	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 149.999.912				Rp. 149.999.912	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 165.000.000,00
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 249.999.796				Rp. 249.999.796	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 125.000.000,00
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 678.327.472				Rp. 678.327.472	Rp. 29.637.572				Rp. 29.637.572	Rp. 700.000.000,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				Rp. 229.999.834				Rp. 229.999.834	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 310.000.000,00
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 229.999.834				Rp. 229.999.834	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 310.000.000,00
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				Rp. 1.298.066.122	Rp. 1.933.620			Rp. 1.299.999.742	Rp. 2.100.000	Rp. 0			Rp. 2.100.000	Rp. 1.400.000.000,00
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Semua Kel/Desa		Rp. 199.999.932				Rp. 199.999.932	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 250.000.000,00
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 98.066.190	Rp. 1.933.620			Rp. 99.999.810	Rp. 2.100.000	Rp. 0			Rp. 2.100.000	Rp. 150.000.000,00
5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru		Rp. 1.000.000.000				Rp. 1.000.000.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 1.000.000.000,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Rp. 843.999.733				Rp. 843.999.733	Rp. 75.559.287				Rp. 75.559.287	Rp. 925.000.000,00
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Semua Kel/Desa		Rp. 249.999.989				Rp. 249.999.989	Rp. 2.300.000				Rp. 2.300.000	Rp. 300.000.000,00
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 499.999.764				Rp. 499.999.764	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 525.000.000,00
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 93.999.980				Rp. 93.999.980	Rp. 73.259.287				Rp. 73.259.287	Rp. 100.000.000,00
						Jumlah			Rp. 9.764.935.853	Rp. 146.063.620			Rp. 9.910.999.473	Rp. 6.074.786.978	Rp. 144.130.000			Rp. 6.218.916.978	Rp. 11.517.999.914,00

Kab. Tapanuli Tengah,
Kepala BAPPEDA

ANTON SUJARWO BINTI S, SSTP, MM
NIP. 197906211999121001

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rancangan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur dan membantu dalam penyusunan rencana berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Masukan dan saran yang bersifat konstruktif akan menambah kesempurnaan dan kelengkapan rancangan dokumen ini dengan harapan akan mendukung kualitas substansi yang termuat didalamnya sekaligus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya

Pandan, 30 Mei **2025**

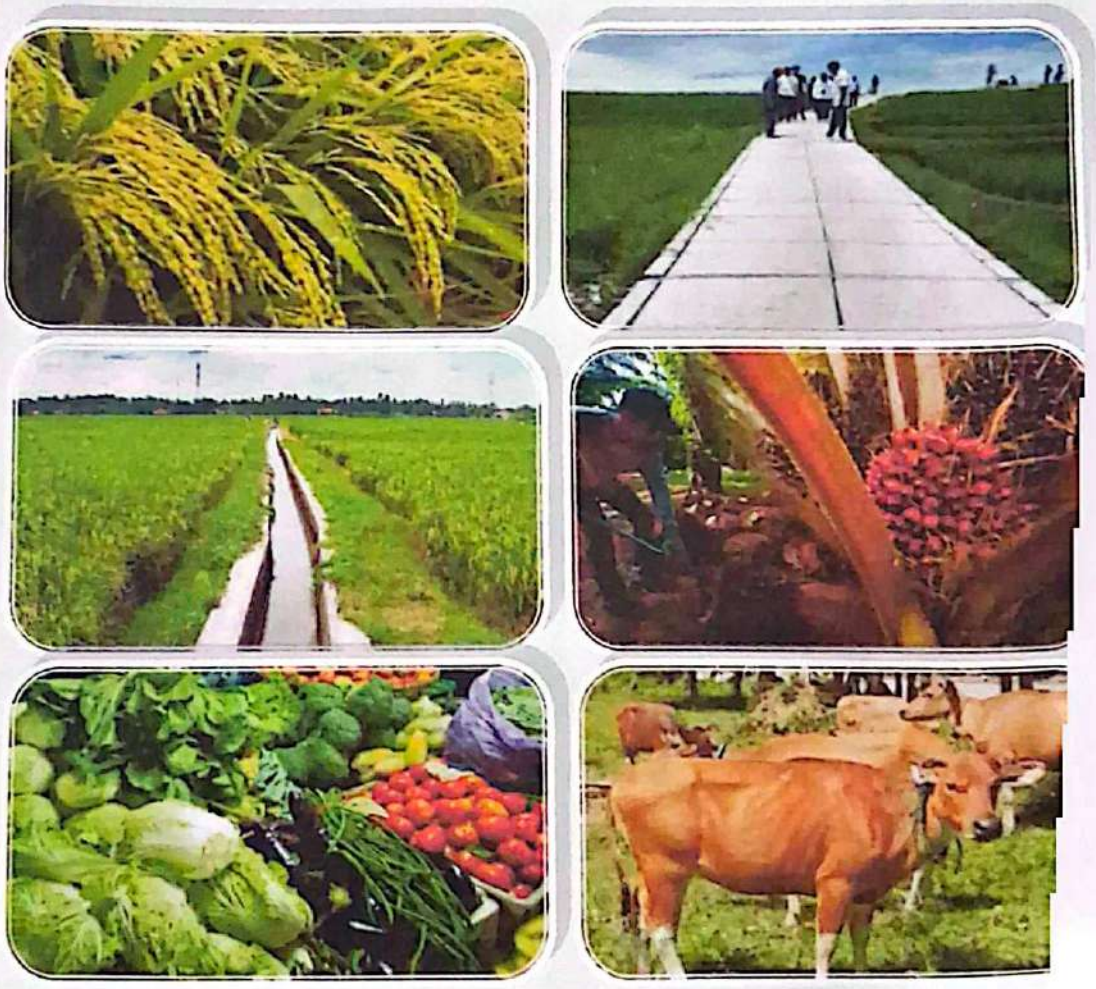
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790621 199912 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
JLN. Dr. F. L. TOBING NO. 16 TELP 0631-371624 /FAX. 0631-371143
PANDAN 22611, SUMATERA UTARA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PERTANIAN
Jalan Feisal Tanjung No. TELP. - **PANDAN - 22611**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 1734 /DISTAN/ V /2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P- RENJA)
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2025, serta efektifitas dalam pekerjanaan perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12)

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E;

10. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

11. RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal : 2025

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DINAS PERTANIAN

TORA[illegible]IAH HUTAGALUNG, STP
PEMBINA TK.I
NIP. 197202091998032004

Lampiran KeputusanKepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor : / DISTAN / V /2025
Tanggal : Mei 2025

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA(P-RENJA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
   (NURHALIMAH HUTAGALUNG,STP)

2. Sekretaris : PERENCANA AHLI MUDA Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah
   (MARTIMBUL SIMBOLON, SP. M.Ec.Dev)

3. Anggota :
   1. Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura
      (SUSANTO YASA, SP)
   2. Kabid. Penyuluhan
      (Ir. AMPUAN NAIBAHO)
   3. Kabid. Peternakan
      (ERNIMAWATI, S.Pet.)
   4. Kabid. Prasarana dan Sarana Pertanian
      (TOGU P. SINAGA, ST)
   5. KABID PERKEBUNAN
      (ANDAR RICHARD BUTAR-BUTAR, S.P)

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DINAS PERTANIAN

[illegible]H HUTAGALUNG, STP
PEMBINA TK.I
NIP. 197202091998032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**	6
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**	12
BAB V	**PENUTUP**	22

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025.....	7
TABEL 3.1	Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan Pada Rencana Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan Tahun 2025	13

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Penyusunan P-RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Pertanian dan RENJA. P-RENJA Tahun 2025, didasarkan pada beberapa hal yakni: (1) pengkajian Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada dua triwulan sebelumnya, (2) pencapaian target RENSTRA OPD, (3) adanya aspirasi dari pemangku kepentingan maupun tokoh masyarakat terkait sesuai terkini yang dihadapi masyarakat.

Dukungan anggaran dari Pusat dan APBD Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Program maupun Kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P-Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025, sangat diperlukan sumbangan saran dan pendapat. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan hal tersebut agar tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 ini dapat tercapai.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P-Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 23 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

[illegible]MAH HUTAGALUNG,STP
[illegible]A Tk.I
NIP. 197202091998032004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan. Sebagai daerah dengan karakteristik wilayah pesisir dan perbukitan, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi komoditas unggulan seperti padi sawah, jagung, cabai, bawang merah, kelapa, kakao, karet, serta tanaman hortikultura lainnya yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat.

Program Pembangunan Pertanian pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha dibidang Pertanian yang mampu menghasilkan produk, yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

"Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban"

Untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah telah ditentukan misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani;

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif;
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi;
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban;
6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia;
7. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjungjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama;
8. Mengelola sumberdaya dalam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah baik sector kelautan, perkebunan, pertanian, perikanan, hutan, sungai, sumberdaya energi terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Namun, dalam perjalanannya, terdapat dinamika kebijakan nasional, kondisi fiskal daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program semester berjalan yang mengharuskan dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Rencana Kerja (P-Renja). Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) adalah dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan P-RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Pertanian dan

RENJA (Rancangan Akhir). Dalam penyusunan P-RENJA dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan berjalan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi penyusunan P-Renja Tahun 2025 antara lain:

1. Penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah, yang berdampak pada perubahan proyeksi pendapatan dan kemampuan belanja daerah.
2. Perkembangan harga komoditas dan inflasi daerah, khususnya komoditas pangan strategis yang memerlukan intervensi kebijakan secara cepat dan tepat.
3. Hasil evaluasi capaian kinerja perangkat daerah, yang menunjukkan perlunya realokasi anggaran pada kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung kepada petani.
4. Kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Dengan adanya penyesuaian melalui P-Renja ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tetap berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan petani meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal.

P-Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 pada akhirnya menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar difokuskan pada program prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip efisiensi belanja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
d. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
e. Instruksi Presiden no 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12)
h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 15);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli

Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E;

j. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
k. RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dimaksudkan untuk mensinergikan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian tersebut tetap memperhatikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita dan adanya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta perencanaan dan pembangunan pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun Tujuan Penyusunan P-Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini adalah menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pertanian Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen P-Renja

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 s/d Triwulan II ditampilkan pada Formulir E.60

FORMULIR E.60

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah

Periode Pelaksanaan : s/d Triwulan I 2025

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/6 x100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah						*Dinas Pertanian*																						
		3.	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung Operasional Kantor	100%	36.442.266.728		266.697.900		331.947.351		-										292.947.900				Dinas Pertanian
		3.03	3.03	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	8.620.250	22%	1.902.540	100%	1.908.800	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	11%	1.902.540	11%	22%	
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	3.03	3.03	05	01	32	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	96.314.409	97%	93.019.660	100%	115.000.000	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	48%	93.019.660	48%	97%	
		3.03	3.03	05	01	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	253.724.990	44%	112.828.800	100%	113.467.200	23%	26.250.000	0%		0%		0%		23%	26.250.000	34%	139.078.800	34%	86%	
		3.03	3.03	05	01	09	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	100%	21.550.625	13%	2.775.000	100%	5.000.000	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	8%	2.775.000	8%	13%	
		3.03	3.03	05	01	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	100%	46.303.935	0%	-	100%	4.999.551	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	0%	0	0%	0%	
		3.03	3.03	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	40.999.508	12%	4.995.000	100%	4.999.800	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	8%	4.995.000	8%	12%	
		3.03	3.03	05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya instalasi listrik/penerangan	100%	21.546.401	0%	-	100%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	
		3.03	3.03	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	16.400.000	9%	1.485.000	100%	1.493.000	0%		0%		0%		0%		0%	-	9%	1.485.000	9%	9%	
		3.03	3.03	05	01	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	100%	81.979.623	0%	0	100%	9.999.060	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	0%	0	0%	0%	
		3.03	3.03	05	01	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	1.000.400.000	5%	49.691.903	100%	75.000.000,00	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	2%	49.691.903	2%	8%	
								Rata-rata Capaian Kinerja (%)							#DIV/0!	26.250.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	26.250.000					

No	Rincian	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab
															I		II		III		IV							
															9		10		11		12							
1	2	3					4	5	6		7		8										13		14= 7 + 13		15=14/4 x100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								Predikat Kinerja							#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!				#DIV/0!						
2		3.	27	01	2.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mendukung Operasional Kedinasan		1.474.530.319		-	100%	4.118.594		-										0			Dinas Pertanian
		3.03	3.03	05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanany a Pemeliharaa n	100%	800.000.000	0%	-	100%	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	
		3.03	3.03	05	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkal a kendaraan	100%	114.720.638	0%	-	100%	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	
		3.03	3.03	05	02	7	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100%	215.504.612	0%	-	100%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	
		3.03	3.03	05	02	09	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	100%	344.305.069	0%	-	100%	4.118.594	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	0%	0	0%	0%	
		3.03	3.03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Mendukung Pemeliharaa n Barang Milik Daerah	100%		#DIV/0!		100%	38.000.000		-													
		3	27	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanany a Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%		#DIV/0!	38.300.589	100%	38.000.000		-													
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanany a Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan	100%	P	#VALUE!	198.028.450	100%	-															
								Rata-rata Capaian Kinerja (%)							#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung Jawab
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/6 x100%		16
							Predikat Kinerja								#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!						
3	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian anggaran daerah	3	27	01			Program Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		123.931.560		15.603.381		24.999.198		-										18.603.381			Dinas Pertanian
		3.03	3.03	05	06	01	Penyusunan LAKIP, Renja dan Evaluasi Renja	Tersedianya data laporan capaian kinerja dan Renja	100%	123.931.560	13%	15.603.381	100%	24.999.198	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	8%	15.603.381	4%	13%	
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)								0%	-	0%	-		-	0%	-	0%	-					
							Predikat Kinerja								Sangat Rendah		Sangat Rendah						Sangat Rendah						
4		3	27	06			Program Pertzinan Usaha Pertanian	Fasilitasi kerjasama pemasaran hasil pertanian	100%		#DIV/0!			296.798.474		-								0		0			Dinas Pertanian
		3.03	3.03	05	17	13	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian/Perkeb	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbanga	100%	499.337.300	0%	-	100%	249.998.722	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	0%	0	0%	0%	
		3.03	3.03	05	17	15	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan	100%	355.522.608	4%	15.551.030	100%	46.799.752	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	2%	15.551.030	2%	4%	
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)								0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
							Predikat Kinerja								Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
5		3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang menggunakan						599.972.608		15.000.000										634.947.838			Dinas Pertanian
		3.03	3.03	05	18	20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	100%	1.199.590.656	53%	636.623.726	100%	549.975.966	1%	7.800.000	0%		0%		0%		1%	7.800.000	27%	640.523.726	27%	53,40	
		3.03	3.03	05	18	21	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Jumlah Pendampingan Penerapan		822.046.999	0%	-	100%	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	
		3.03	3.03	05	18	22	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG		215.506.250	23%	49.924.210	100%	49.996.642,00	14%	7.200.000	0%		0%		0%		14%	7.200.000	19%	53.524.210	#DIV/0!	24,84	
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)								#DIV/0!	15.000.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	15.000.000					

No	Skenario	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/8 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Predikat Kinerja		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!						
6		3	27	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan /Hortikultur a/Peternakan				3.420.758.665		418.769.819		25.100.000										1.804.892.886				Dinas Pertanian
		3.03	3.03	05	19	19	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan, Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan	100%	3.069.786.595	9%	269.512.824	100%	318.774.324,00	11%	25.100.000	0%		0%		0%		11%	25.100.000	10%	304.893.824	10%	12%	
							Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Action Plan Pengembang an Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	100%		#DIV/0!	-	100%	99.995.300,00														
		3.03	3.03	05	19	06	Pembangunan /Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun,	100%	8.000.000.000	15%	1.200.000.000	100%	0	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.200.000.000	#DIV/0!	15%	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		#DIV/0!	25.100.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	25.100.000					
															Predikat Kinerja		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!						
7		3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menurunny a Jumlah kasus penyakit hewan,/hewa ak yang ditangani		585.362.995		1.790.178.603		98.040.264		14.113.130										78.674.000				Dinas Pertanian
		3.03	3.03	05	21	02	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulanga n Penyakit	100%	1.249.090.068	2%	20.461.990	100%	37.665.884	17%	6.313.130	0%		0%		0%		17%	6.313.130	8%	39.775.120	4%	3%	
		3.03	3.03	05	21	09	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Tertampak Wabah yang Terkendali	100%	400.000.000	0%	-	100%	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#Num!	0	#Num!	0%	
		3.03	3.03	05	21	17	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%	458.179.542	9%	42.298.900	100%	42.374.380	18%	7.900.000	0%		0%		0%		18%	7.900.000	14%	50.088.800	14%	11%	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		#DIV/0!	14.113.130	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	14.113.130					
															Predikat Kinerja		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!						

No	Sasaran	Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Unit SKPD Penanggung jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15= [4/6 x 100%]		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana							69.998.374		7.800.000													
		3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Ancaman Pertanian Kabupaten/Kota							0		-													
		3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					45761764		69.998.374		7.800.000													
9		3	27	07			Program Penyuluh Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Penyuluh Pertanian						2.097.893.470		25.760.000										148.889.970			Dinas Pertanian
		3.03	3.03	05	20	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	100%	649.337.500		121.299.970	100%	134.999.652	19%	25.760.000	0%		0%		0%		19%	25.760.000	19%	148.889.970	19%	23%	
		3.03	3.03	05	20	19	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan	100%	475.000.000,00		0	100%	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2%	
							Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah	100%			0		1.454.600.000	0%	-													
							Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh	100%			0		300.598.000		-												
							Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan	100%			0		199.995.810		-												
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)													#DIV/0!	33.560.000	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	25.760.000					
		Predikat Kinerja													#DIV/0!		#DIV/0!						#DIV/0!				

Pandan, Juli 2025
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HALOMOAN HUTAGALUNG, STP
PEMBINA TK.I
NIP. 197202091998032004

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Daerah merupakan Rancangan Perubahan Renja OPD, terdiri dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Lokasi Kegiatan dan alasan perubahan, yang disajikan pada Tabel Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025.

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**7.350.478.695**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**7.288.299.357**	**(62.179.338,0)**		**DINAS PERTANIAN**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**24.999.198**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**7.849.143**	**(17.150.055,0)**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Laporan	14.999.430	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Laporan	4.658.004	(10.341.426,0)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.999.768	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.191.139	(6.808.629,0)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**6.905.533.700**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**6.905.533.700**	**-**		
				6.905.533.700				**6.905.533.700**	**-**		
	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	6.905.533.700	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	6.905.533.700	-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 orang	-	-		

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**96.491.351**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**51.658.760**	**(44.832.591,0)**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.999.551	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.191.360	(808.191,0)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.958.800	(4.040.200,0)		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.015.600	(1.984.200,0)		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1.493.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1.493.000	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	37.000.000	(38.000.000,0)		
									-		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**49.998.446**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**49.801.754**	(196.692,0)		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	49.998.446	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	49.801.754	(196.692,0)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**235.456.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**235.456.000**	-		

No	RKPD TAHUN 2025				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.988.800	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.988.800	-		
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	115.000.000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	115.000.000	-		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	-		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	113.467.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	113.467.200	-		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	**38.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	**38.000.000**	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mobil 6 Unit, Sepeda Motor 35 Unit	38.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mobil 6 Unit, Sepeda Motor 35 Unit	38.000.000	-		
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	-		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase KelompokTani yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi Pertanian	5 Persen	**599.972.608**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase KelompokTani yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi Pertanian	5 Persen	**714.003.216**	**114.030.608,0**		**DINAS PERTANIAN**

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5 Persen	**549.975.966**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5 Persen	**673.462.653**	123.486.687,0		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	**549.975.966**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	**673.462.653**	123.486.687,0		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			549.975.966				673.462.653			
	Pengadaan Pupuk Anorganik			199.189.249	Pengadaan Pupuk Anorganik			191.266.923	(7.922.326,0)		
	Pembinaan dan Monitoring Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditi Padi dan Jagung	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian	20 Kecamatan	259.007.264	Pembinaan dan Monitoring Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditi Padi dan Jagung	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian	20 Kecamatan	227.081.880	(31.925.384,0)		
	Monitoring evaluasi dan pelaporan sektor pertanian	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian	20 kecamatan	90.436.353	Monitoring evaluasi dan pelaporan sektor pertanian	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian	20 kecamatan	50.343.864	(40.092.489,0)		
	Pengadaan Bibit Pisang			-				176.778.243	**176.778.243,0**		
	Pengadaaan Benih Padi Inbrida			1.343.100				7.991.743	**6.648.643,0**		
	Kajian Pupuk Organik			-				20.000.000	**20.000.000,0**		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	**Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	1 Laporan	-	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	1 Laporan	-	-		
	Pemberdayaan Kelembagaan Alat Mesin Pertanian			-	Pemberdayaan Kelembagaan Alat Mesin Pertanian			-	-		

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**49.996.642**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**40.540.563**	(9.456.079,0)		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	49.996.642	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	40.540.563	(9.456.079,0)		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Pengembangan Prasarana		**418.769.819**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Penyediaan Pengembangan Prasarana		**322.338.686**	**(96.431.133,0)**		**DINAS PERTANIAN**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pengembangan Prasarana	10 Persen	**418.769.819**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase Peningkatan Pengembangan Prasarana	10 Persen	**322.338.686**	(96.431.133,0)		
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	10 Persen	318.774.519	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	10 Persen	222.343.386	(96.431.133,0)	**DAK Fisk**	
	Penunjang Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian			113.548.225	Penunjang Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian			86.362.867	(27.185.358,0)		
	Koordinasi Pengelolaan DAK Bidang Pertanian	Terdukungnya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian	1 kegiatan	110.232.841	Koordinasi Pengelolaan DAK Bidang Pertanian	Terdukungnya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian	1 kegiatan	82.948.224	(27.284.617,0)		

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan Statistik Komoditi Palawija dan Hortikultura	Terlaksananya pengelolan kegiatan sumber DAK pertanian	1 kegiatan	69.995.461	Pendataan Statistik Komoditi Palawija dan Hortikultura	Terlaksananya pengelolan kegiatan sumber DAK pertanian	1 kegiatan	42.635.417	(27.360.044,0)		
	Sinkronisasi dan Updating UPSUS PAJALE	Terlaksananya pengelolan kegiatan sumber DAK pertanian	1 kegiatan	24.997.992	Sinkronisasi dan Updating UPSUS PAJALE	Terlaksananya pengelolan kegiatan sumber DAK pertanian	1 kegiatan	10.396.878	(14.601.114,0)	DAU	
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	20 Kecamatan	99.995.300	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	20 Kecamatan	99.995.300	-	DBH Sawit	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5 Persen	**274.436.862**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5 Persen	**249.889.228**	(24.547.634,0)		**DINAS PERTANIAN**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Persen	**37.665.884**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Persen	**17.743.830**	(19.922.054,0)		
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yangmengalamipenurunankasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	37.665.884,0	**Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota**	Jumlah wilayah atau kawasan yangmengalamipenurunankasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	17.743.830,0	(19.922.054,0)		

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Tahun	**236.770.978**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Tahun	**232.145.398**	(4.625.580,0)		
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya obat-obatan peternakan	1 kegiatan	42.370.978	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya obat-obatan peternakan	1 kegiatan	232.145.398	189.774.420,0	DAU	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya obat-obatan peternakan	1 kegiatan	194.400.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya obat-obatan peternakan	1 kegiatan	194.400.000	-	DAK NON FISIK/DAU	
	Operasional Puskeswan	Tertingkatkannya kesehatan ternak	20 Kecamatan	-	Operasional Puskeswan	Tertingkatkannya kesehatan ternak	20 Kecamatan	-	-		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5 Persen	**49.998.374**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5 Persen	**40.535.413**	**(9.462.961,0)**		**DINAS PERTANIAN**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendali dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1 kegiatan	**49.998.374**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Terkendali dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1 kegiatan	**40.535.413**	(9.462.961,0)		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 laporan	49.998.374	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 laporan	40.535.413	(9.462.961,0)		
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemenuhan Izin Usaha Pertanian	10 Persen	**296.798.474**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase pemenuhan Izin Usaha Pertanian	10 Persen	**272.505.936**	**(24.292.538,0)**		**DINAS PERTANIAN**
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Persen	**296.798.474**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Persen	**272.505.936**	(24.292.538,0)		

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	249.998.722	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	249.998.722	-	DBH Sawit	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		1 kegiatan	46.799.752	**Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian**		1 kegiatan	22.507.214	(24.292.538,0)	DAU	
	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	25 persen	**1.903.593.470**	**PROGRAM PENYULUH PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	25 persen	**1.694.474.652**	(209.118.818,0)		**DINAS PERTANIAN**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Persentase Kelompok Tani yang menerima Penyuluhan Pertanian**	25 kelompok	**1.903.593.470**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang menerima Penyuluhan Pertanian**	25 kelompok	**1.694.474.652**	(209.118.818,0)		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 BPP	134.999.652	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 BPP	125.876.652	**(9.123.000,0)**	DAU	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PPL	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		83.491.872	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PPL	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		77.191.872	(6.300.000,0)	DAU	
	Penyusunan RDKK Kabupaten	Tersedianya data RDKK	1 Tahun	51.507.780	Penyusunan RDKK Kabupaten	Tersedianya data RDKK	1 Tahun	48.684.780	(2.823.000,0)	DAU	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			-	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**		1 Tahun	360.000.000	360.000.000,0	-DAU - DAK NON FISIK	

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Program	Perangkat Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Sub Kegiatan	Selisih (bertambah/berkurang)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			1.260.000.000	**Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota**			900.000.000	(360.000.000,0)	DAK Non Fisik	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian			308.598.000	**Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian**			308.598.000	-	DAK Non Fisik	
	DNF Ketahanan Pangan dan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan kepada petani	1 kegiatan	308.598.000	DNF Ketahanan Pangan dan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan kepada petani	1 kegiatan	308.598.000	-		
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		1 kegiatan	199.995.818	**Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian**			0	199.995.818		
	TOTAL ANGGARAN RKPD			**10.894.048.302**		**TOTAL ANGGARAN P APBD**		**10.582.046.488**	**(312.001.814,0)**		
	TOTAL DAK FISIK TA. 2025			-		**TOTAL DAK FISIK TA. 2025**		-	-	DAK Fisik	
	TOTAL DAK NF TA. 2025			1.762.998.000		**TOTAL DAKNF TA. 2025**		1.762.998.000	-	DAK Non Fisik	
	DBH Sawit TA.2025			349.994.022		**DBH Sawit TA.2025**		349.994.022	-	DBH Sawit	

Pandan, 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

[illegible] LIMAH HUTAGALUNG, STP
Pembina TK.I
NIP. 197202091998032004

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 yang telah disusun mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mempedomani RENSTRA Dinas Pertanian Tahun 2023-2026 sebagai acuan di tingkat vertikal, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta dokumen perencanaan ditingkat vertikal lainnya baik ditingkat provinsi maupun nasional, untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pada kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya pada tahun anggaran 2025 yang akan datang, selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 23 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

[illegible]MAH HUTAGALUNG, STP
[illegible]A TK. I
NIP. 197202091998032004

PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) T.A. 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusgia Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 s/d 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 s/d 2026. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan uraian tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan penyusunan Perubahan Rencana KerjaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerjaini disusun agar dapat menjadi pedoman pada tahun 2025.

Pandan, 20 Mei 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

GUSNI ARMY PASARIBU, S.IP, MM
PEMBINA
NIP. 19920810 201406 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah …… 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 22

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34
4.1 Program dan Kegiatan …….. 38

BAB IV PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Tengah 9

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.....

Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerjadan Pendanaan 34

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Tengah 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja(Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Perubahan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RPD) Kabupaten dan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana KerjaAnggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplemen-tasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Tahapan persiapan meliputi Persiapan penyusunan Rancangan Akhir Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Penyusunan RKPD/ Renja, Orientasi mengenai RKPD/ Renja, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan RKPD/ Renja dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap dalam Penyusunan Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 78 Permendagri 86 Tahun 2017 ayat (1)d. Perubahan Rencana Kerjaperangkat daerah akan disempurnakan setelah BAPPEDA mengajukan Rancangan Akhir RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 s/d 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana KerjaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017);
11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
12. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.
13. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 800/88/BKPSDM/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja(Renja) Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana KerjaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana KerjaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

		Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Sumber Daya Aparatur Pemerintah Dalam Negeri				1.388.585.860	
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Adanya Lelang terbuka dan Uji Kompetensi bagi JPT	100%	100%	424.999.500	1.074.577.360	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional dan Kepemimpinan dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional dan Kepemimpinan dan Prajabatan	Terlaksananya Diklat PKN II, dan PKA	100%	100%	215.697.300	314.008.500	
		JUMLAH					**6.352.450.669**	**7.098.701.511**	

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Perubahan Perubahan Rencana KerjaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/ kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun Realisasi terhadap Renja untuk tahun 2025 Triwulan II (Kedua) yang dapat kami sajikan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan total dana yang dianggarkan pada program ini Rp. 4.678.416.379**,-**,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.152.084.711,- (46,00%%)

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dana Rp 8.777.900,- yang terealisasi sampai Triwulan II yaitu sebesar Rp. 1.204.500,-

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan total dana yang dianggarkan Rp. 306.655.300,- telah terealisasi sebesar Rp 84.641.443 (27,60},-

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dengan dana sebesar Rp 364.905.200,- terrealisasi 156.176.465,- (42,80%)

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- telah terrealisasi sebesar Rp. 38.125.000,- (38,13%)

b. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi serta Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Adapun total dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 728.139.235,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.701.645-,- (9,02%)

Pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 177.619.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.069.000,- (11,86%)

Pada kegiatan Mutasi dan Promosi dengan dana sebesar Rp. 198.244.800,- dengan realisasi Rp. 20.260.100,- (10,22%).

Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan dana sebesar Rp. 292.830.700,- dengan terealisasi Rp. 5.260.000,(1,80%)

Pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan total dana yang dianggarkan Rp. 59.443.875,- dengan realisasi Rp. 7.958.200,- (6,36%)

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan dana sebesar Rp. 934.929.600,- dengan realisas Rp. 196.939.400,- (21,06%),

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah
sampai Triwulan II (Kedua) Tahun Anggaran 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
4	*5*	*6*		*7*		*8*		*10*		*13*		*14=7+13*		*15=14/6X100%*		*16*
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEPEGAWAIAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang akurat dan memadai	100%	**2.828.000.000**	**28%**	**803.458.264**	**100%**	**833.424.800**	**15 %**	**128.090.422**	**34%**	**280.147.408**	**57%**	**1.618.383.278**	**31%**	**872.604.104**	BKPSDM
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100 %**	**36.000.000**	**72%**	25.749.986	**100%**	**16.024.900**	**8%**	**1.204.500**	**8%**	**1.204.500**	**75%**	**26.954.486**	**25%**	**9.045.514**	BKPSDM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja	100 %	22.000.000	70%	15.357.906	100%	9.997.800	0%	931.500,00	9%	931.500	74%	16.289.406	26%	5.710.594	BKPSDM
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LAKIP	100 %	14.000.000	74%	10.392.080	100%	6.027.100	5%	273.000,00	5%	273.000	76%	10.665.080	24%	3.334.920	BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**100 %**	**1.168.000.000**	62%	729.413.268	**100%**	**352.494.700**	**13%**	**4.4735.343**	**24%**	**84.641.443**	**70%**	**814.054.711**	**30%**	**353.945.289**	BKPSDM
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	100 %	66.000.000	38%	25.227.840	100%	10.000.000	25%	2.488.000	50%	4.987.000	46%	30.214.840	54%	35.785.160	BKPSDM
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK	100 %	186.000.000	49%	91.572.780	100%	44.999.900	0%	0	0%	0	49%	91.572.780	51%	94.427.220	BKPSDM

Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman serta alat kebersihan	100 %	74.000.000	103 %	76.289.240	100%	34.999.600	18 %	6.352.000	39%	13.801.500	###	90.090.740	-22%	(16.090.740)	BKPSDM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan dan Penggandaan	100 %	126.000.000	66%	83.258.464	100%	39.999.800	3%	1.189.000	25%	10.103.000	74%	93.361.464	26%	32.638.536	BKPSDM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan PerUU	100 %	86.000.000	49%	42.077.600	100%	19.995.400	15 %	3.060.000	31%	6.235.000	56%	48.312.600	44%	37.687.400	BKPSDM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Dinas BKPSDM	100 %	630.000.000	65%	410.987.344	100%	202.500.000	16 %	31.646.343	24%	49.514.943	73%	460.502.287	27%	169.497.713	BKPSDM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	360.000.000	100 %	0	100%	123.355.979	0%	0	0%	0	0%	0	100%	360.000.000	BKPSDM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100 %	360.000.000	100%	0	100%	123.355.979	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	BKPSDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**70%**	**1.064.000.000**	**58%**	573.767.241	**100%**	**364.905.200**	23 %	**82.150.579**	**43%**	**156.176.465**	**41%**	**438.931.086**	**31%**	**334.056.294**	**BKPSDM**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai	100 %	34.000.000	65%	22.000.000	100%	9.989.200	17 %	1.738.000	42%	4.235.000	77%	26.235.000	23%	7.765.000	BKPSDM
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan rutin menjadi lancar	80%	530.000.000	40%	211.986.226	100%	120.500.000	22 %	26.564.079	37%	44.273.465	48%	256.259.691	52%	273.740.309	BKPSDM
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	100 %	130.000.000	53%	69.349.015	100%	35.000.000	25 %	8.698.500	50%	17.368.000	67%	86.717.015	33%	43.282.985	BKPSDM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya penunjang kelancaran Kantor	100 %	370.000.000	73%	270.432.000	100%	199.416.000	23 %	45.150.000	45%	90.300.000	97%	360.732.000	3%	9.268.000	BKPSDM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100 %**	**560.000.000**	**88%**	233.260.880	**100%**	**100.000.000**	0%	**0**	**38%**	**38.125.000**	**60%**	**338.442.995**	**4%**	**21.557.005**	**BKPSDM**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional	100 %	560.000.000	42%	233.260.880	100%	100.000.000	20 %	19.640.000	38%	38.125.000	48%	271.385.880	52%	288.614.120	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Peningkatkan Kinerja ASN Daerah	**71%**	**2.862.000.000**	**52%**	1.480.595.119	**100%**	**728.139.235**	**0%**	**0**	**11%**	**65.701.645**	**54%**	1.546.296.764	**60%**	**1.703.261.405**	BKPSDM
Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN		**48%**	**552.000.000**	**19%**	220.456.621	**100%**	**129.999.360**	**0%**	**0**	**16%**	**21.069.000**	**44%**	241.525.621	**60%**	**331.543.379**	**BKPSDM**
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terselenggaranya Pengadaan ASN	100 %	1.450.000.000	22%	313.063.302	90%	99.999.900	21 %	21.069.000	21%	21.069.000		334.132.302	77%	1.115.867.698	BKPSDM
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya KORPRI	100 %	230.000.000	20%	45.344.822	100%	39.999.860	0%	0	0%	0	20%	45.344.822	80%	184.655.178	BKPSDM
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Ter-update-nya data kepegawaian (SIASN)	90%	322.000.000	54%	175.111.799	90%	89.999.500	0%	0	0%	0	54%	175.111.799	46%	146.888.201	BKPSDM
Mutasi dan Promosi ASN		**95%**	**1.220.000.000**	**84%**	504.630.929	**95%**	**199.999.190**	0%	**0**	**10%**	**20.260.100**	**43%**	**524.891.029**	**57%**	**695.108.971**	**BKPSDM**
Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Kegiatan BAPERJAKAT	90%	190.000.000	42%	80.634.429	90%	49.999.290	6%	2.799.800	6%	2.799.800	44%	83.434.229	56%	106.565.771	BKPSDM
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Kenaikan Pangkat ASN	100 %	1.030.000.000	41%	423.996.500	100%	149.999.900	9%	13.681.500,00	12%	17.460.300	43%	441.456.800	57%	588.543.200	BKPSDM
Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuian Ijazah	100 %	860.000.000		185.579.020	100%	99.985.700	0%	0,00	0%	0		185.579.020	78%	674.420.980	BKPSDM
Pengembangan Kompetensi ASN		**100 %**	**490.000.000**	**19%**	90.890.000	**70%**	**149.819.800**	0%	**0**	**4%**	**5.260.000**	**20%**	**96.150.000**	**80%**	**393.850.000**	BKPSDM

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN	100 %	490.000.000	19%	90.890.000	70%	149.819.800	4%	5.260.000	4%	5.260.000	20%	96.150.000	80%	393.850.000	BKPSDM
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**43%**	**600.000.000**	**32%**	**298.128.400**	**57%**	**124.999.900**	0%	**0**	**15%**	**19.112.545**	**53%**	**317.240.945**	**47%**	**282.759.055**	**BKPSDM**
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Adanya Satya Lencana Karya Satya	90%	230.000.000	42%	97.169.920	90%	49.999.950	7%	3.352.780	15%	7.452.180	45%	104.622.100	55%	125.377.900	BKPSDM
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Tertanganinya kasus-kasus ASN	80%	370.000.000	54%	200.958.480	80%	74.999.950	10 %	7.801.565,0 0	16%	11.660.365	57%	212.618.845	43%	157.381.155	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											**0**	**-**	**0**	**-**		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Dikat Teknis Struktural dan Diklat Teknis Fungsional	**45%**	**4.850.000.000**	**8%**	366.489.169	**100%**	**549.995.700**	**35 %**	191.919.400	**36%**	**196.939.400**	**12%**	**563.428.569**	**112%**	**5.431.571.431**	**BKPSDM**
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		**45%**	**5.995.000.000**	**6%**	366.489.169	**100%**	**640.696.800**	30 %	191.919.400	**31%**	**196.939.400**	**9%**	**563.428.569**	**91%**	**5.431.571.431**	BKPSDM
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Adanya Lelang terbuka bagi JPT	90%	1.145.000.000	32%	366.489.169	100%	424.999.500	45 %	191.919.400	46%	196.939.400	49%	563.428.569	51%	581.571.431	BKPSDM
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan PelaksanaanSertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan TenagaPengembang Kompetensi, Pengelolaan SumberBelajar, dan Kerja Sama, serta	Terlaksananya Orientasi PPPK lulusan formasi 2023 sebanyak 266 orang	90%	4.850.000.000	0%	0	100%	215.697.300	0%	0	0%	**0**	**0%**	0	100%	4.850.000.000	BKPSDM

PengembanganKompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan PimpinanTinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	
10.540.000.000	**25%**	**2.650.542.552**	**75%**	**1.988.238.750**	**16%**	**320.009.822**	**27%**	**542.788.453**	**35%**	**3.728.108.611**	**76%**	**8.007.436.940**					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Anggaran untuk pelaksanaan Manajemen Kepegawaian tahun 2025 disusun dan ditampung pada APBD Tahun 2025 dengan jumlah Anggaran Rp. 6.352..450.669,- Realisasi total pagu 2025 pada Triwulan I per 30 Maret sebesar Rp. 1.045.347.380,- (16,46%) dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 4.804.002.779,-
2. Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 907.751.090,-
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 640.696.800,-

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Triwulan II T.A. 2025 (Per 31 Maret 2025)

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.678.416.379	Rp.2.152.084.711	46,00%
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 728.139.235	Rp. 65.701.645	9,02%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 934.929.600	Rp. 196.939.400	21,06%
	JUMLAH	Rp. 6.341.485.214	Rp. 2.414.725.756	38,08%

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Renja Perubahan OPD menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. PerubahanRencana KerjaPerubahan untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2026 dengan melakukan review Realisasi Anggaran tahun berjalan.

Tabel 3.1

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN TAHUN 2025

KABUPATEN/ KOTA : TAPANULI TENGAH
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	20
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**5,352,450,809.00**	**6,352,450,669.00**	**7,201,331,666.00**	**1,848,880,857.00**		**2,259,000,000.00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**5,352,450,809.00**	**6,352,450,669.00**	**7,201,331,666.00**	**1,848,880,857.00**		**2,259,000,000.00**
	5.03	**KEPEGAWAIAN**				**5,186,450,809.00**	**5,711,753,869.00**	**5,746,402,806.00**	**559,951,997.00**		**2,009,000,000.00**
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang akurat dan memadai**	**100 %**	**100 %**	**4,531,450,809.00**	**4,804,002,779.00**	**4,776,410,402.00**	**-4,512,450,809.00**		**19,000,000.00**
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada BKPSDM Kab. Tapanuli Tengah*	7 dokumen	7 dokumen	16,028,809.00	16,024,900.00	8,777,900.00	-7,250,909.00		14,000,000.00
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	7 Dokumen	10,000,000.00	9,997,800.00	5,500,900.00	-4,499,100.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8,000,000.00
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	6,028,809.00	6,027,100.00	3,277,000.00	-2,751,809.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6,000,000.00
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100 %	3,774,722,000.00	3,774,722,000.00	3,758,645,898.00	-16,076,102.00		0.00

	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	3,774,722,000.00	3,774,722,000.00	3,758,645,898.00	-16,076,102.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	300,000,000.00	424,994,700.00	389,645,425.00	89,645,425.00		0.00
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	10,000,000.00	10,000,000.00	13,158,500.00	3,158,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	45,000,000.00	44,999,900.00	31,574,200.00	-13,425,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	35,000,000.00	34,999,600.00	57,417,225.00	22,417,225.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	40,000,000.00	39,999,800.00	15,000,100.00	-24,999,900.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000.00	19,995,400.00	19,995,400.00	-4,600.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	20 Laporan	20 Laporan	150,000,000.00	275,000,000.00	252,500,000.00	102,500,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 %	100 %	0.00	123,355,979.00	123,355,979.00	123,355,979.00		0.00
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	0.00	123,355,979.00	123,355,979.00	123,355,979.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang*	100 %	100 %	340,700,000.00	364,905,200.00	395,985,200.00	55,285,200.00		0.00
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000.00	9,989,200.00	9,989,200.00	-10,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00

	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	120,500,000.00	120,500,000.00	120,500,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	175,200,000.00	199,416,000.00	230,496,000.00	55,296,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 %	100 %	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00		0.00
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	15 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Capaian Pelayanan Kepegawaian dan Peningkatkan Kinerja ASN Daerah (Dengan Satuan:Persen)**	**100 %**	**100 %**	**655,000,000.00**	**907,751,090.00**	**969,992,404.00**	**1,335,000,000.00**		**1,990,000,000.00**
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	100 %	100 %	130,000,000.00	129,999,360.00	177,619,860.00	47,619,860.00		515,000,000.00
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	99,999,900.00	99,999,900.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	160,000,000.00
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	40,000,000.00	39,999,860.00	32,945,760.00	-7,054,240.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45,000,000.00

	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	90,000,000.00	89,999,500.00	44,674,200.00	-45,325,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100,000,000.00
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Terselenggaranya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN*	100 %	100 %	200,000,000.00	199,999,190.00	218,244,700.00	18,244,700.00		360,000,000.00
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000.00	49,999,290.00	48,759,200.00	-1,240,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100,000,000.00
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	500 Dokumen	500 Dokumen	150,000,000.00	149,999,900.00	69,499,800.00	-80,500,200.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150,000,000.00
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*	100 Dokumen	100 Dokumen	0.00	0.00	99,985,700.00	99,985,700.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110,000,000.00
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yangmengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	100 %	100 %	200,000,000.00	452,752,640.00	414,684,200.00	214,684,200.00		800,000,000.00
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*	30 Orang	30 Orang	200,000,000.00	452,752,640.00	414,684,200.00	214,684,200.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Terselenggaranya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	100 %	100 %	125,000,000.00	124,999,900.00	159,443,644.00	34,443,644.00		315,000,000.00
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	69,999,980.00	69,999,980.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa*	100 Orang	100 Orang	50,000,000.00	49,999,950.00	23,023,625.00	-26,976,375.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55,000,000.00
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	1 Laporan	1 Laporan	75,000,000.00	74,999,950.00	66,420,039.00	-8,579,961.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	120,000,000.00

	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**166,000,000.00**	**640,696,800.00**	**1,454,928,860.00**	**1,288,928,860.00**		**250,000,000.00**
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Struktural dan Diklat Teknis Fungsional**	**80 %**	**80 %**	**166,000,000.00**	**640,696,800.00**	**1,454,928,860.00**	**84,000,000.00**		**250,000,000.00**
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase ASN yang mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional*	100 %	100 %	166,000,000.00	640,696,800.00	1,454,928,860.00	1,288,928,860.00		250,000,000.00
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota*	20 Orang	20 Orang	166,000,000.00	424,999,500.00	1,126,277,360.00	960,277,360.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	250,000,000.00
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama*	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	215,697,300.00	328,651,500.00	328,651,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.00
	JUMLAH					**5,352,450,809.00**	**6,352,450,669.00**	**7,201,331,666.00**	**1,848,880,857.00**		**2,259,000,000.00**

Tabel 3.2

DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHANPROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA PERUBAHANRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN TAHUN 2025

KABUPATEN/ KOTA : TAPANULI TENGAH
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN	PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	MENJADI		RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	RENJA 2025 (Rp)	RENJA 2025 PERUBAHAN (Rp)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100%	100%	4.804.002.779	4.678.416.379	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya RENJA dan LAKIP**	**100%**	**100%**	16.024.900	8.777.900	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENJA	100%	100%	9.997.800	5.500.900	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LAKIP	100%	100%	6.027.100	3.277.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	3.774.722.000	3.758.645.898	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Anggaran Gaji	Tersedianya Anggaran Gaji dan TPP	100%	100%	3.774.722.000	3.758.645.898	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Mendukung Operasional Kedinasan**	**100%**	**100%**	424.994.700	389.697.760	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	100%	100%	10.000.000	13.158.500	
		Penyediaan Peralatan dan	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya ATK	100%	100%	44.999.900	31.574.200	

		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor						
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman serta alat kebersihan	100%	100%	34.999.600	57.469.560	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	39.999.800	15.000.100	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan PerUU	100%	100%	19.995.400	19.995.400	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Dinas BKPSDM	100%	100%	275.000.000	252.500.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Mendukung Operasional Kantor**	100%	100%	123.355.979	123.355.979	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor yang memadai	100%	100%	123.355.979	123.355.979	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Mendukung Operasional Kantor**	**100%**	**100%**	364.905.200	395.985.200	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai	100%	100%	9.989.200	9.989.200	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan rutin menjadi lancer	100%	100%	120.500.000	120.500.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	100%	100%	35.000.000	35.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya penunjang kelancaran Kantor	100%	100%	199.416.000	230.496.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Mendukung Operasional Kantor**	**100%**	**100%**	100.000.000	100.000.000	

			Daerah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional	100%	100%	100.000.000	100.000.000	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				907.751.090	933.652.914	
		Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	**Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase ASN yang Profesional dan berkompeten**	100%	100%	129.999.360	163.090.170	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	**Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**	Terlaksananya penerimaan PPPK	100%	100%	-	85.470.210	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya KORPRI	100%	100%	39.999.860	32.945.760	
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Ter-*update*-nya data kepegawaian (SIASN)	100%	100%	89.999.500	44.674.200	
		Mutasi dan Promosi ASN	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase ASN yang Profesional dan berkompeten**	100%	100%	199.999.190	. 196.434.900	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Kegiatan BAPERJAKAT	100%	100%	49.999.290	48.759.200	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Kenaikan Pangkat ASN	100%	100%	149.999.900	59.499.800	
		Pengelolaan Promosi ASN	**P**engelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	100%	100%	-	88.175.900	
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**	100%	100%	452.752.640	414.684.200	

		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Adanya Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100%	100%	452.752.640	414.684.200	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN yang Profesional dan berkompeten**	100%	100%	124.999.900	159.443.644	
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Adanya Peraturan yang mengatur Penilaian dan Kinerja ASN	100%	100%	0	69.999.980	
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Adanya Satya Lencana Karya Satya	100%	100%	49.999.950	23.023.625	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Tertanganinya kasus-kasus ASN	100%	100%	74.999.950	66.420.039	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		100%	100%	640.696.800	1.388.585.860	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		100%	100%	640.696.800	1.388.585.860	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		100%	100%	0	0	
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penandatangan Pakta Integritas dan Manajemen Talenta	100%	100%	0	0	
		Sertifikasi, Kelembagaan,	**Sertifikasi,**	Peningkatan Kompetensi	100%	100%	640.696.800		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. PerubahanRencana Kerjadibuat terkait dengan visi misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerjatahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawab atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2025 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah dalam satu tahun kedepan.

PerubahanPerubahanRencana Kerja(Renja) menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai kendala dan persoalan terkait dengan Manajemen Kepegawaian Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, serta menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Program Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

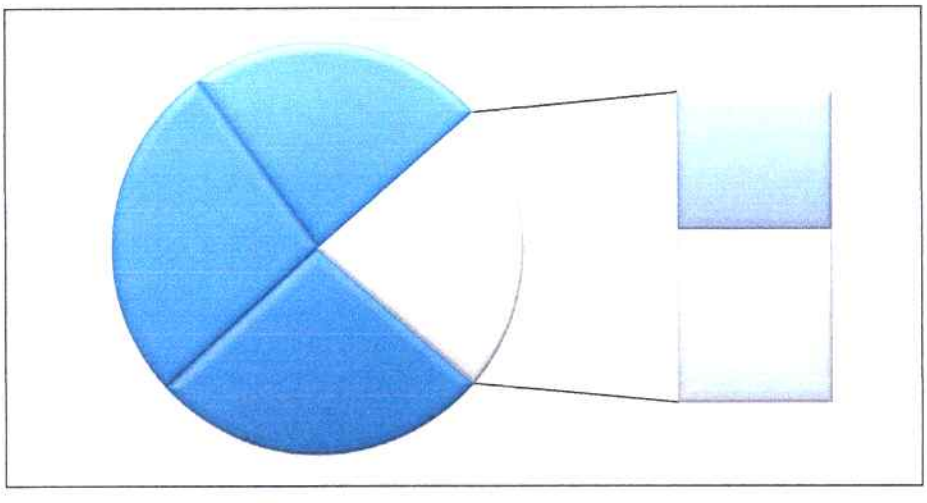
PerubahanPerubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Perubahan Rencana Kerjajuga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Pandan, 20 Mei 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

GUSNI ARMY PASARIBU, S.IP, MM
PEMBINA
NIP. 19920810 201406 2 002

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jl.Dr.F.L Tobing No.18 Telp.0631-371417/Fax.0631-371143 Pandan 22611
Sumatera Utara

PANDAN, 2025

DAFTAR ISI

Daftar isi

Kata Pengantar 2

BAB I : Pendahuluan 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II : Evaluasi Renja sampai Triwulan II 2025 7

- Tabel E.60

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 10

- Tabel Daftar perubahan program dan perubahan kegiatan

BAB IV : Penutup 15

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja dengan memperhitungkan kesediaan anggaran. Perubahan Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 kami menyadari bahwa materi pelaporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, namun kami berkeyakinan kelemahan dan kekurang sempurnaan ini akan memotivasi para penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini untuk melakukan re- evaluasi serta menyajikan pelaporan rencana kerja yang lebih kredibel, terukur dan bermanfaat untuk masa mendatang.

Saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak manapun tetap kami harapkan untuk lebih menyempurnakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini secara objectif menjadi media penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

PANDAN, 20 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BASYRI NASUTION, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197108051997031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah disusun menjadi dasar dikarenakan adanya Program/ Kegiatan yang tidak atau belum selesai akan tetapi pada tahun berjalan dana yang ditampung tidak memenuhi atau ada kegiatan baru yang harus dilaksanakan sedangkan pada Renja belum ditampung pagu anggarannya . Renja Perubahan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan persiapan meliputi persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap dalam Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026, Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017);
8. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perubahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun berjalan.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dan rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 serta kesinambungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan untuk Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan tahun berjalan. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Dokumen Renja
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Pelaksanaan Rencana Keja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan I (satu) yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/kegiatan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN direalisasikan sebesar Rp2.020.959.774,- (12,69%) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 248.000,- (0,62%) Penyediaan bahan logistik kantor Rp 3.588.000,- (11,14%) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.841.150,- (9,76%) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 24.679.358,- (11,22%) , Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. 82.319.511,- (15,39%) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 123.112.020,- (18,32%) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak, dan perijinan kenderaan dinas operasional atau lapangan Rp. 45.761.493,- (13,91%) Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 1.644.000,- (2,27%) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 5.706.000,- (7,71%) Berdasarkan hal diatas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.316.859.306,- (10,56 %) dengan predikat kinerja rendah..

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS terealisasi Rp. 0,- Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp. 0,- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD Rp. 0,- Koordinasi, penyusunan verifikasi perubahan RKA- SKPD Rp. 2.310.000,- (5,39%) Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Rp. 23.358.448,-(51,59%) Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD Rp. 0,-

Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Rp. 41.179.450,- (29,21%) Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp. 0,-

Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran Rp. 5.629.920,- (15,96%) Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan Rp. 1.980.000,- (9,50%) Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah Rp. 23.100.000,- (64,75%) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota Rp. 1.820.000,- (1,82 %) Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD Rp. 7.947.600,-, (14,78%) Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya Rp. 74.416.170,- (18,04%)

Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan aliran Kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Fihak ketiga (PFK) Rp. 4.955.040,- (10,73%) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 0,- Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rp. 0,- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp.13.500.000,- (13,40%) Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota Rp. 0,- Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Rp. 0,- Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Rp 138.575.902, (0,07%) Pengelolaan dana darurat dan mendesak Rp. 0,- Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/ kota Rp. 0,-

Berdasarkan hal diatas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 338.772.530,- (0,16%) dengan predikat kinerja rendah.

c. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Program Pemeliharaan barang Milik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan standar harga Rp. 16.000.000,- (9,09%) Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah Rp. 0,- Inventarisasi barang milik daerah Rp. 14.250.000,- (7,70%) Pengamanan barang milik daerah Rp. 9.450.000,- (3,93%) Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah Rp. 3.978.000,- (5,24%) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp. 0,-

Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota Rp. 16.500.000,- (10,19%) Untuk Program Pemeliharaan barang Milik daerah sebesar Rp. 60.178.000,- (5,53%) dengan predikat kinerja rendah.

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah Rp. 0,- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Rp. 164.201.546,- (25,63%).

Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah Rp.13.500.000,- (25,74%) Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah Rp.0,- Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 0,- Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah Rp.0,- Penagihan pajak daerah Rp. 4.800.000,- (1,43%) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Rp.0,- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Rp.0,-

Berdasarkan hal diatas rata rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan daerah sebesar Rp.182.501.546.- (8,73%) dengan predikat kinerja rendah Pada dasarnya nilai yang tercantum dalam narasi diatas di dapat dari laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini: (excell)

Evaluasi Hasil Terhadap Renja SKPD

Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		I		II		III		IV						
												I-I		II										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				16
	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																					
	5	02	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50%		0%		100%				0%		0%		0%		0%		0%				
	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%		100%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
	5	02	01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		81.63%		100%		15.972.254.081		13%	2.020.959.774	0%		0%		0%		13%	2.020.959.774	25%		0%		
	5	02	01		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%		81%		100%		15.972.254.081		13%	2.020.959.774	0%		0%		0%		13%	2.020.959.774	25%		0%		
	5	02	01		07	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%		92%		100%												0%		0%			
	5	02	01			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				103.160.002		7.061.442		179.586.448		0%		0%		0%		0%		3%		7%		3%		
	5	02	01		01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Unit Pengadaan seragam dan perlengkapan Dinas Pegawai	100%						179.586.448															
	5	02	01		02	Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan	100%		103.160.002	92%	7.061.442	100%	91.000.000	0%		0%		0%		0%		3%		7%	7.061.442	3%			
	5	02	01			Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.773.100.012		840.287.918	100%	577.251.142	6%	37.356.508	0%		0%		0%		6%	37.356.508	0%		0%		
	5	02	01		03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%		249.950.003	100%	34.538.740	100%	19.976.452	1%	240.000	0%		0%		0%		1%	240.000	1%	34.538.740	1%			
	5	02	01		05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%		3.517.710.003	45%	275.420.040	100%	191.480.005	0%		0%		0%		0%		7%		69%	275.420.040	14%			
	5	02	01		04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%		249.970.001	100%	42.055.750	100%	42.251.200	11%	3.599.350	0%		0%		0%		11%	3.599.350	8%	42.055.750	8%			
	5	02	01		06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%		1.912.560.003	92%	267.366.142	100%	90.969.422		6.831.150	0%		0%		0%		1.3%	6.831.150	14%	275.236.742	14%			
	5	02	01		09	Penyediaan komponen instalasi Peralatan Perkantoran	Jumlah Dokumen bahan Lelang dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%		49.870.000	97%	10.904.040	100%	17.500.000	0%		0%		0%		0%		3%		13%	10.904.040	14%			
	5	02	01		08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%		611.040.002	96%	211.985.113	100%	200.000.000		24.679.350	0%		0%		0%		11%		96%	236.664.463	12%			
	5	02	01	2.07		Pengadaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.708.060.003		770.843.410	100%	2.552.732.143	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100%		4.510.427.701	99%	98.687.000	100%	3.197.732.353								0%		0%		0%			
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	100%			75%		100%	305.950.662															
	5	02	01	2.07	02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%		247.640.002	0%	167.156.410	100%	49.219.205	0%		0%		0%		0%		0%		76%	667.156.410	14%			
	5	02	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.037.230.004		828.440.545	100%	1.218.384.347	17%	205.431.531	0%		0%		0%		17%	205.431.531	0%		0%		
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	100%		37.950.002	100%	11.950.000	100%	11.949.600	0%		0%		0%		0%		3%		3%		3%		
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	100%		1.033.010.002	99%	141.877.217	100%	535.300.000	15%	82.319.531	0%		0%		0%		15%	82.319.531	0%		0%		
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%		966.760.002	99%	675.063.218	100%	671.116.747	18%	123.112.000	0%		0%		0%		18%	123.112.000	0%		0%		
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			2.221.670.004		384.417.615	100%	475.500.000	11%	53.111.493	0%		0%		0%		11%	53.111.493	0%		0%		
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%		1.514.050.002	99%	405.620.516	100%	330.000.000	14%	45.761.493	0%		0%		0%		14%	45.761.493	29%	667.156.410	0%			
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang	100%		419.980.002	0%	1.800.000	0%	51.500.000	0%		0%		0%		0%		0%		0%			

	5	02	01	2.01	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	247.640.002	92%	54.097.100	100%	74.000.000	8%	5.706.000	0%		0%		0%		8%	5.706.000	24%	69.803.100	24%	119.900.300	BPKPA
	5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Jumlah laporan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang disediakan		982.445.223.418																				
	5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disediakan		**4.580.570.022**		**588.692.810**	**100%**	**898.264.492**		**99.377.818**								**99.377.818**	15%	988.060.837	15%	1.276.743.650	BPKPA
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang disusun	100%	529.660.001	93%	49.467.502	100%	105.708.678	0%		0%		0%		0%		0%		9%	49.467.502	9%	99.095.304	BPKPA
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	100%	498.120.002	94%	82.309.391	100%	89.363.527	0%		0%		0%		0%		0%		16%	82.309.391	16%	164.694.782	BPKPA
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	100%	197.860.000	71%	19.500.500	100%	42.949.300	5%	2.310.000	0%		0%		0%		5%	2.310.000	12%	21.809.500	12%	40.909.300	BPKPA
	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	100%	190.160.002	62%	22.475.000	100%	25.306.400	0%		0%		0%		0%		0%		12%	22.475.000	12%	44.160.300	BPKPA
	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	100%	234.420.001	50%	34.916.114	100%	45.274.072	52%	23.958.448	0%		0%		0%		52%	23.958.448	25%	58.274.562	25%	93.150.676	BPKPA
	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	100%	580.080.003	95%	83.287.144	100%	86.775.400	0%		0%		0%		0%		0%		11%	83.287.144	11%	126.574.866	BPKPA
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	100%	**852.460.002**	**89%**	**92.818.398**	**100%**	**140.954.900**	**29%**	**41.179.460**	**8%**		**0%**		**0%**		**29%**	**41.179.460**	**16%**	**133.997.858**	**16%**	**226.815.962**	BPKPA
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	100%	878.617.004	96%	119.734.066	100%	170.738.900	0%	-	0%		0%		0%		0%		14%	119.734.066	14%	290.401.132	BPKPA
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	Jumlah Dokumen regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	100%	368.250.002	47%	31.025.062	100%	35.270.300	16%	5.629.920	0%		0%		0%		16%	5.629.920	9%	36.654.982	9%	67.680.344	BPKPA
	5	00	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	143.390.002	54%	24.417.910	100%	20.845.200	9%	1.980.000	0%		0%		0%		9%	1.980.000	16%	26.397.910	16%	50.815.820	BPKPA
	5	02		2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	130.860.003	80%	48.912.934	100%	36.676.400	65%	23.100.000	0%		0%		0%		65%	23.100.000	65%	72.012.934	65%	105.124.909	BPKPA
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							59.999.714	2%	1.820.000	0%														
	5	02	02	2.02		**Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah laporan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang disediakan**		**2.258.513.382**		**380.538.806**	**100%**	**542.443.307**	**16%**	**87.318.810**	**0%**		**0%**		**0%**		**16%**	**87.318.810**	**0%**		**0%**		BPKPA
	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas Dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	272.403.375	76%	36.307.500	100%	53.761.720	15%	7.947.600	0%		0%		0%		15%	7.947.600	0%		0%	36.307.500	BPKPA
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	**Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi** Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	100%	1.466.330.003	94%	318.279.996	100%	412.491.791	18%	74.416.170	0%		0%		0%		18%	74.416.170	26%	392.696.166	26%	710.976.162	BPKPA
	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan kegiatan dan pemantauan transaksi non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan kegiatan dan pemantauan transaksi non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank	100%	-		-		-		-								-				
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan sisa kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotongan dan penyetoran pemungutan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi Penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan sisa kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotongan dan penyetoran pemungutan Pihak ketiga (PFK) dan laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan sisa kas dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan penyetoran pemfungsian fihak ketiga (PFK)	100%	190.830.002	82%	25.951.403	12 bln	46.173.225	11%	4.956.040	0%		0%		0%		11%	4.956.040	18%	30.906.440	18%	56.857.643	BPKPA
	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	846.150.002				49.966.571	0%	-														
	5	02	02	2.03		**Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**			**772.090.006**		**170.220.841**	**100%**	**301.131.551**	**4%**	**13.500.000**	**0%**		**0%**		**0%**		**4%**	**13.500.000**	**0%**		**0%**		
	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	100%	268.920.005	96%	21.128.000	100%	24.144.618	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	0%		0%		
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	309.670.001	14%	79.553.000	100%	100.779.327	13%	13.500.000	0%		0%		0%		13%	13.500.000	30%	92.053.000	30%	170.006.300	BPKPA

5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	603.170.001	93%	70.539.841	100%	126.225.815	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	0%								-
5	02	02	2.03	06	Penyusunan tanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%					27.961.761	0%	-																
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%					24.996.110	0%	-			-													
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**864.307.051.009**		**213.486.847.107**	**100%**	**215.206.748.488**	**0%**	**138.575.902**	**0%**		**0%**		**0%**		**0%**	**138.575.902**	**0%**		**0%**		BPKPA
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100%	18.112.900.004	83%	3.759.508.863	100%	3.108.426.299	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	21%	3.759.508.863	21%	7.519.017.726	BPKPA
5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	822.240.910.001	100%	209.033.261.824	100%	204.459.601.800	0%	138.575.902	0%		0%		0%		0%	138.575.902	25%	209.171.837.826	25%	418.209.099.750	BPKPA
5	02	02	2.04	08	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	100%	102.730.790.003	68%	709.078.300	100%	4.739.524.619	0%	-	0%		0%		0%		0%		1%	709.078.300	1%	1.406.152.540	BPKPA
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota	100%	11.272.450.000	0%		100%	2.904.743.800	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	0%	-	0%	-	BPKPA
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			4.483.244.121																			BPKPA
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan barang Milik Daerah**			**4.483.244.121**		**781.139.507**	**100%**	**1.088.665.988**	**6%**	**60.178.000**	**0%**		**0%**		**0%**		**6%**	**60.178.000**	**0%**		**0%**		BPKPA
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	100%	2.3 794.102	100%	161.825.278	100%	178.179.941	9%	18.000.000	0%		0%		0%		10%	18.000.000	81%	167.825.278	81%	110.250.952	BPKPA
5	02	03	2.01	02	Penyusunan standar Barang milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah standarBarang milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	82.160.003	95%	15.215.767	100%	19.914.269	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	19%	15.215.767	19%	10.431.134	BPKPA
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah		-		-		-		-								-					
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		-		-		-		-								-					
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		-		-		-		-								-					
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi Barang milik Daerah	100%	1.100.670.003	100%	155.263.535	100%	164.960.293	6%	1.350.000	0%		0%		0%		6%	14.250.000	16%	169.513.535	16%	324.777.310	BPKPA
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang milik Daerah	100%	1.284.040.003	81%	213.156.537	100%	240.536.643	4%	9.450.000	0%		0%		0%		4%	9.450.000	13%	222.606.537	13%	436.767.314	BPKPA
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah		-		-		-		-								-					
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang Milik Daerah		-		-		-		-								-					
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanan dan penghapusan Barang Milik Daerah	100%	518.460.002	100%	124.904.700	100%	75.978.873	5%	3.978.000	0%		0%		0%		5%	3.978.000	25%	128.882.700	25%	253.787.100	BPKPA
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik daerah		-		19.302.142																	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Barang milik Daerah	100%	162.000.004	66%	-	150%	229.147.247		-									0%		0%		BPKPA
5	02	03	2.01	13	Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	808.460.004	99%	101.539.510	99%	161.993.701	10%	16.500.000	0%		0%		0%		10%	16.500.000	19%	118.139.510	19%	219.779.220	BPKPA
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			5.128.743.488																			BPKPA
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**5.128.743.488**		**894.256.448**		**2.089.567.858**	**7%**	**182.501.548**	**0%**		**0%**		**0%**		**0%**	**182.501.548**	**0%**		**0%**		BPKPA
5	02	04	2.01	02	Analisis dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan kebijakan Pajak Daerah	100%	371.799.751	97%	47.070.661	100%	68.310.009	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	13%	47.070.661	13%	94.141.322	BPKPA
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	208.650.002	90%	22.648.900	100%											-	11%	22.648.900	11%	45.297.800	BPKPA
5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Penyediaan sarana dan prasarana Pajak Daerah	100%	3.217.350.002	82%	595.286.412	100%	640.838.645	26%	164.201.548	0%		0%		0%		26%	164.201.548	24%	759.487.958	24%	1.764.774.170	BPKPA
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	100%	185.970.002	90%	44.696.700	100%	52.454.983	26%	13.500.000	0%		0%		0%		26%	13.500.000	30%	58.196.700	30%	102.893.400	BPKPA
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeriksaan, dan pelaporan Basil dalla Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan Pemeriksaan, dan pelaporan Basil dalla Pajak Daerah	100%	83.600.002	90%	19.305.900	100%	20.300.585	0%	-	0%		0%		0%		0%	-	23%	19.305.900	23%	39.611.800	BPKPA

		5	02	04	2.01	07	Pelayanan (PTSP-PT) Jenis Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	100%	115.000.001	90%	17.675.110	100%	22.240.681	0%	-	0%		0%		0%		0%		9%	17.675.110	5%	15.160.220	BPKPAD
		5	02	04	2.01	09	Pelayanan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Pelayanan Wajib Pajak Daerah	100%	12.600.001	69%	1.200.000	100%			-								18%	2.220.000	19%	4.450.000	BPKPAD
		5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Dan Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksanaya Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah	100%	186.240.001	92%	24.918.368	100%	388.140.570	0%	-	0%		0%		0%		0%		13%	24.918.368	13%	51.836.736	BPKPAD
		5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	100%	189.150.001	91%	61.301.000	100%	306.810.742	1%	4.800.000	0%		0%		0%		1%	4.800.000	49%	58.161.000	46%	111.522.000	BPKPAD
		5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksanaanya keberatan Pajak Daerah	100%	98.089.709	89%	11.450.150	100%			-								17%	11.450.150	10%	22.900.300	BPKPAD
		5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi Daerah	Intensifnya Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi Daerah	100%	245.310.001	90%	23.127.225	100%	430.970.180	0%	-	0%		0%		0%		0%		9%	23.127.225	8%	18.354.450	BPKPAD
		5	02	04	2.01	15	Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah		100%	245.310.001	90%	34.268.000	100%	149.999.700	0%	-	0%		0%		0%		0%		14%	34.268.000	14%	68.536.000	BPKPAD
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100%	1.070.658.971.554	82%	237.665.578.602	100%	242.088.066.903	1%	2.868.111.382	0%		0%				1%	2.868.311.382	24%	260.471.220.903	24%	616.145.299.403	
							Predikat Kinerja										Rendah													

Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

PANDAN, 05 MEI 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

BASYRI NASUTION, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710805 199703 1001

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja OPD menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan melakukan review Realisasi Anggaran.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota terdapat perubahan pada beberapa kegiatan/ Sub Kegiatan diantaranya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah semula Rp. 9.999.432 menjadi Rp. 5.457430,- dikarenakan efisiensi Anggaran, Koordinasi penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD semula Rp. 5.728.488,- menjadi Rp. 3.225.216,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, ,Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai semula Rp. 88.596.448,- menjadi Rp. 0,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi semula Rp. 91.000.000,- menjadi Rp. 56.000.000,-Perubahan dikarenakan efisinsi Anggaran,

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor semula Rp 39.978.455,- menjadi Rp. 20.773.679 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor semula Rp. 181.480.005 ,- menjadi Rp. 72.592.668,- perubahan ini dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan , Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Rp. 90.598.422 ,- menjadi Rp. 45.398.112 ,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Rp. 12.993.600 ,- menjadi Rp. 10.973.600 ,- perubahan ini dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 220.000.000,- menjadi Rp. 144.000.000 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengadaan kenderaan dinas operasional atau lapangan Rp. 3.137.762.261 ,- menjadi Rp.0,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 325.690.657,- menjadi Rp. 267.704.701,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 89.279.225 menjadi Rp. 72.933.720,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran dan pengadaan Gordyn/Kray,- Penyediaan jasa surat menyurat tidak ada

perubahan, Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. 535.000.000 ,- menjadi Rp. 422.000.000 ,- Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor Rp. 671.835.747 ,-menjadi Rp. 607.448.310 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kenderaan dinas Operasional atau lapangan tidak ada perubahan, ,Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor atau bangunan lainnya tidak ada perubahan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 74.000.000 ,- menjadi Rp. Rp.64.000.000 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan pada beberapa Kegiatan/ Sub Kegiatan antara lain : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS semula Rp. 105.709.879 ,- menjadi Rp. 39.258.249 ,- perubahan ini dikarenakan Efisinsi Anggaran, Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Rp. 89.353.627,- menjadi Rp. 37.120.600 ,- perubahan ini dikarenakan Efisinsi Anggaran, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD Rp. 42.849.300 ,- menjadi Rp. 17.846.500,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi,Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Rp. 25.336.400,- menjadi Rp. 7.834.900 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Rp. 45.274.072 ,- menjadi Rp.26.374.030 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Rp. 86.775.400,- menjadi Rp . 71.137.600,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD Rp. 140.964.900 ,- menjadi Rp. 108.800.700 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran , Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp. 170.208.300,- menjadi Rp. 153.543.300 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran Rp. 35.270.300,- menjadi Rp. 28.780.300 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran ,Koordinasi Perencanaan anggaran pendapatan Rp. 20.846.200,- menjadi Rp. 6.845.600, Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi Perencanaan anggaran Belanja Daerah Rp.35.676.400 ,- menjadi Rp.33.224.900 ,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota semula Rp. 99.999.714,- menjadi Rp. 15.125.874,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran ,

Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD Rp. 53.781.720 ,- menjadi Rp. 30.130.062,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi, fasilitasi , asistensi,singkronisasi, suverfisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya Rp. 412.491.791 ,- menjadi Rp. 311.572.120 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotangan dan penyetoran perhitungan pihak ke tiga (PFK) Rp. 46.173.225 ,- menjadi Rp. 22.953.357,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota Rp. 49.996.571,-menjadi Rp. 40.893.239 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rp. 24.144.518,- menjadi Rp. 12.023.752,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp. 100.773.327,- menjadi Rp . 79.294.698,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertangungjawaban APBD kabupaten/kota Rp. 126.225.815,- menjadi Rp. 73.837.117,

Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp. 24.991.781,- menjadi Rp. 12.828.835 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Pembinaan Akuntansi ,Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 24.996.110 ,- menjadi Rp . 13.998.220,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Analisis perencanaan dan terlaksanya pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Rp. 3.108.426.269,- menjadi Rp.3.111.935.275,- Perubahan ini dikarenakan Efisiensi anggaran, Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Rp. 204.459.801.800,- menjadi Rp 202.171.662.120,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengelolaan dana darurat mendesak Rp. 4.733.524.619 ,- menjadi Rp 3.346.069.855, Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten Rp. 2.904.793.800,- menjadi Rp.3.710.726.047,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Barang milik Daerah terdapat perubahan pada beberapa Kegiatan/ Sub Kegiatan antara lain: Penyusunan Standar harga Rp.

176.109.941,- menjadi Rp 141.021.610,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyusunan standar BMD dan standar kebutuhan BMD Rp. 19.914.288,- menjadi Rp. 11.584.626,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Inventarisasi barang milik daerah Rp. 184.993.293 ,- menjadi Rp .122.062.250 Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengamanan barang milik daerah Rp. 240.538.643,- menjadi Rp. 173.073.652,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindatanganan,pemusnahan,dan penghapusan barang milik daerah Rp.75.978.873 menjadi Rp. 53.286.631 ,- Penyusunan laporan barang milik daerah Rp. 229.147.247 ,-menjadi Rp . 28.084.578 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota Rp. 161.983.701 ,- menjadi Rp. 102.701.567,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat perubahan pada beberapa Kegiatan antara lain : Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah Rp. 68.310.009,- menjadi Rp . 36.289.925,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah Rp. 640.638.645 ,- menjadi Rp. 586.181.376,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran , Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah Rp. 52.454.982 ,- menjadi Rp. 62.967.528 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran ,Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah Rp. 20.300.583 ,-menjadi Rp. 14.759.570,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB- P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 22.240.081,- menjadi Rp. 8.542.454 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah Rp.368.042.903,- menjadi Rp. 163.217.743,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penagihan Pajak Daerah semula Rp. 336.610.242,- menjadi Rp. 288.081.777,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Rp. 430.970.680 menjadi Rp 240.441.506,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Rp. 149.999.733,- menjadi Rp 60.834.473,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat perubahan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025

UNIT : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SUB UNIT/ORGANISASI

KODE					Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA			Pagu (Rp)		Sumber dana	Bertambah/ kurang	Keterangan
						Capaian Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah			
					URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN								
					BIDANG URUSAN KEUANGAN								
5	**02**	**01**			**PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**				**21.941.446.621,00**	**18.151.865.249,00**		**3.789.581.372,00**	
5	02	01	2.01		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang berkualitas,Terkelolanya Anggaran secara efektif dan Efisien**	**Meningkatnya Pengelolaan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**15.727.920,00**	**8.682.646,00**			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Mendukung kelancaran operasional kantor Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja	9.999.432,00	5.457.430,00		- 4.542.002,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtiar Kinerja SKPD	Mendukung kelancaran operasional kantorMeningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja	5.728.488,00	3.225.216,00		- 2.503.272,00	Efisiensi Anggaran
												-	
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tercapainya Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Efisien dan Transparan**	**Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**15.922.254.081,00**	**15.922.254.081,00**		-	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan penunjang ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yg Menerima Gaji dan Tunjangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	15.922.254.081,00	15.922.254.081,00		-	
												-	
5	***02***	***01***	***2.05***		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatkan kualitas dan efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilingkungan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**179.596.448,00**	**56.000.000,00**		123.596.448,00	Efisiensi Anggaran
	02	01	2.0	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Terlaksanannya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah sarana da prasarana pegawai yg di sediakan	Meningkatnya sumber daya aparatur	88.596.448,00			- 88.596.448,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksanannya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pogawai berdasarkan tugas dan fungsi yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya sumber daya aparatur	91.000.000,00	56.000.000,00		- 35.000.000,00	Efisiensi Anggaran
												-	

5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisin serta terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik**	**Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**577.251.682,00**	**325.937.261,00**		251.314.421,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yg disediakan	Mendukung kelancaran operasional kantor	39.978.455,00	20.773.679,00		- 19.204.776,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yg disediakan	Mendukung kelancaran operasional kantor	181.480.005,00	72.590.670,00		- 108.889.335,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yg disediakan	Mendukung kelancaran operasional kantor	32.201.200,00	32.201.200,00		-	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	Mendukung kelancaran operasional kantor	90.598.422,00	45.398.112,00		- 45.200.310,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yg disediakan	Mendukung kelancaran operasional kantor	12.993.600,00	10.973.600,00		- 2.020.000,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung kelancaran operasional kantor	220.000.000,00	144.000.000,00		- 76.000.000,00	Efisiensi Anggaran
												-	
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Menyediakan dan memastikan ketersediaan Barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya**	**Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**3.552.732.143,00**	**332.494.351,00**		3.220.237.792,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.07	02	Pengadaan kenderaan dinas operasional atau lapangan	Tersediannya Pengadaan kenderaan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yg disediakan	mendukung operasional kedinasan	3.137.762.261,00	-		- 3.137.762.261,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedainnya peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.		325.690.657,00	267.704.701,00		- 57.985.956,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersediannya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yg Disediakan	mendukung operasional kedinasan	89.279.225,00	64.789.650,00		- 24.489.575,00	Efesiensi Anggaran dan pengadaan Gordyn/Kray
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya tata kelola penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**1.218.384.347,00**	**1.040.996.910,00**		177.387.437,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedisan jasa Surat Menyurat	Mendukung kelancaran operasional kantor	11.548.600,00	11.548.600,00		-	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yg Disediaan	Mendukung kelancaran oporasional kantor	535.000.000,00	422.000.000,00		- 113.000.000,00	Efisiensi Anggaran

5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayan umum kantor	Tersediannya jasa Pelayan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yg Disediakan	Mendukung kelancaran operasional kantor	671.835.747,00	607.448.310,00		- 64.387.437,00	Efisiensi Anggaran
												-	
5	02	01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terjaga dan terpeliharanya Aset Daerah agar tetap berfungsi Optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**475.500.000,00**	**465.500.000,00**		10.000.000,00	Efisiensi Anggaran
5	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak, dan perijinan kenderaan dinas operasional atau lapangan	Terlaksanannya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak, dan perijinan kenderaan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	329.000.000,00	329.000.000,00		-	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksanannya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/Rehabilitasi	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	72.500.000,00	72.500.000,00		-	
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/rehabilitas	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	74.000.000,00	64.000.000,00		- 10.000.000,00	Efisiensi Anggaran
												-	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Mewujudkan Tata kelola Keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel ditingkat Daerah	Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah		**216.968.385.838,01**	**241.368.864.667,29**		**- 24.400.478.829,28**	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah**		***898.264.492,00***	***545.834.253,00***		352.430.239,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	105.709.879,00	39.258.249,00		- 66.451.630,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	89.353.627,00	32.120.600,00		- 57.233.027,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Verifikasi RKA SKPD Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	42.849.300,00	17.846.500,00		- 25.002.800,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	04	Koordinasi,Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Verifikasi Perubahan RKA SKPD Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	25.336.400,00	7.834.900,00		- 17.501.500,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	05	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen verifikasi DPA SKPD Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	45.274.072,00	26.374.030,00		- 18.900.042,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA- SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Verifikasi Perubahan DPA SKPD Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	86.775.400,00	71.137.600,00		- 15.637.800,00	Efisiensi Anggaran

5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	140.964.900,00	115.868.200,00		-	25.096.700,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang Petrubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan daerah tentang Petrubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	170.208.300,00	151.417.500,00		-	18.790.800,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tersusunnya Dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	35.270.300,00	28.780.300,00		-	6.490.000,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan anggaran pendapatan	Tersusunnya Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen pendapatan Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	20.846.200,00	6.845.600,00		-	14.000.600,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Perencanaan anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Belanja Daerah Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	35.676.400,00	33.224.900,00		-	2.451.500,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan perbendaharaan Daerah Kabupaten Tap.Teng	Jumlah orang yg mengikuti pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	99.999.714,00	15.125.874,00		-	84.873.840,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah		**562.443.307,00**	**405.548.778,00**			**156.894.529,00**	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD	Tersediannya Dokumen Hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Tersediannya Dokumen Hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	53.781.720,00	30.130.062,00		-	23.651.658,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, fasilitasi , asistensi,singkronisasi, suverfisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Terlaksanannyal Koordinasi, fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi, supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana perimbangan dan dana Transfer lainnya	Terlaksanannya Koordinasi, fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi, supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana perimbangan dan dana Transfer lainnya	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	412.491.791,00	311.572.120,00		-	100.919.671,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemumgutan, pemotangan dan penyetoran perhitungan pihak ke tiga (PFK)	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemumgutan, pemotangan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemumgutan, pemotangan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	46.173.225,00	22.953.357,00		-	23.219.868,00	Efisiensi Anggaran

5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	Terlaksannya pembinaan Penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah orang yg mengikuti pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	49.996.571,00	40.893.239,00		- 9.103.332,00	Efisiensi Anggaran
												-	
5	02	02	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan**	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**		**301.131.551,00**	**191.982.622,00**		109.148.929,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.03	01	Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	24.144.518,00	12.023.752,00		- 12.120.766,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusuunya Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	100.773.327,00	79.294.698,00		- 21.478.629,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertangungjawaban APBD kabupaten/kota	Tersusunnya Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertangungjawaban APBD kabupaten/kota	Jumlah Dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertangungjawaban APBD kabupaten kota Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	126.225.815,00	73.837.117,00		- 52.388.698,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terselesaikannya tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertranggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah tanggapan /tindak lanjut terhadap LHP BPK ataslaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	24.991.781,00	12.828.835,00		- 12.162.946,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi ,Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang melaksanakan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	24.996.110,00	13.998.220,00		- 10.997.890,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Meningkatnya tata kelola kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Meningkatnya urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah**		**215.206.546.488,01**	**240.225.499.014,29**		- 25.018.952.526,28	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.04	04	Analisis perencanaan dan terlaksanya pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Terbayarkannya cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Dokumen terlaksanya pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	3.108.426.269,00	3.108.426.269,00		-	
5	02	02	2.04	08	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan	Jumlah Dokumen penyaluran bantuan keuangan Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	204.459.801.800,00	197.573.467.008,00		- 6.886.334.792,00	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan dana darurat mendesak	Tersediannya dana darurat dan mendesak	Jumlah Dokumen mendesak Yg Disusun		4.733.524.619,01	39.543.605.737,29		34.810.081.118,28	Efisiensi Anggaran
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten	Tersedainnya dana bagi hasil kabupaten	Jumlah Dokumen hasil kabupaten Yg Disusun	Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik	2.904.793.800,00	-		- 2.904.793.800,00	

5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas Pengelolaan dan Pelaporan Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai aset tetap		1.088.665.986,00	631.813.375,00		456.852.611,00	Efisiensi Anggaran
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tertib Pengelolaan BMD yang Akuntabel,efektif dan efisien serta mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang milik Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah		1.088.665.986,00	631.813.375,00		456.852.611,00	Efisiensi Anggaran
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar harga	Tersusunnya Standar harga	Jumlah Dokumen yg Disusun	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	176.109.941,00	141.021.610,00		- 35.088.331,00	Efisiensi Anggaran
5	02	03	2.01	02	Penyusunan standar BMD dan standar kebutuhan BMD	Tersusunnya Standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen dan standar kebutuhan BMD yg Disusun	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	19.914.288,00	11.584.626,00		- 8.329.662,00	Efisiensi Anggaran
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi barang milik daerah	Tersusunnya laporan hasil Inventarisasi (LHI) Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen daerah yg Disusun	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	184.993.293,00	122.062.250,00		- 62.931.043,00	Efisiensi Anggaran
5	02	03	2.01	07	Pengamanan barang milik daerah	Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen daerah yg Disusun	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	240.538.643,00	173.073.652,00		- 67.464.991,00	Efisiensi Anggaran
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindatanganan,pemusnahan,dan penghapusan barang milik daerah	Tersusunnya Dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindatanganan,pemusnahan,dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen pemindatanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yg Disusun	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	75.978.873,00	53.285.092,00		- 22.693.781,00	Efisiensi Anggaran
5	02	03	2.01	12	Penyusunan laporan barang milik daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah	Jumlah Dokumen milik daerah yg Disusun	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	229.147.247,00	28.084.578,00		- 201.062.669,00	Efisiensi Anggaran
5	02	03	2.01	13	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota	Terlaksanannya Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen milik daerah kabupaten kota yg Disusun	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	161.983.701,00	102.701.567,00		- 59.282.134,00	Efisiensi Anggaran
												-	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi penerimaan pendapatan Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan Publik di bidang Pendapatan Daerah	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah		2.089.567.858,00	1.461.316.342,00		628.251.516,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah		2.089.567.858,00	1.461.316.342,00		628.251.516,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01	02	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Analis pajak daerah, serta pengembangan Pajak daerah dan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah yg Disusun	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	68.310.009,00	36.289.925,00		- 32.020.084,00	Efisiensi Anggaran

5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	Tersediannya sarana dan prasarana pengololaan pajak daerah	Jumlah Dokumen prasarana pajak daerah yg Disusun	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	640.638.645,00	586.181.376,00		-	54.457.269,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftran objek pajak daerah	Tersusunnya laporan hasil pendataan dan pendaftaran Objek pajak Daerah, Subjek Pajak dan wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen objek pajak daerah yg Disusun	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	52.454.982,00	62.967.528,00			10.512.546,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Tersusunnya laporan hasil Pengolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Dokumen pelaporan basis data pajak daerah yg Disusun	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	20.300.583,00	14.759.570,00		-	5.541.013,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01	07	Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB- P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Terlaksanannya penilaian pajak bumi dan bangunan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Dokumen dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB yg Disusun	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	22.240.081,00	8.542.454,00		-	13.697.627,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Tersusunnya data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Jumlah Dokumen data pelaporan pajak daerah yg Disusun	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	368.042.903,00	163.217.743,00		-	204.825.160,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yg Disusun	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	336.610.242,00	288.081.777,00		-	48.528.465,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Tersusunnya laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan retribusi daerah yg Disusun	Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah	430.970.680,00	240.441.496,00		-	190.529.184,00	Efisiensi Anggaran
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah	Tersusunnya laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah transaksi elektronifikasi pemerintah daerah	Meningkatnya Jumlah transaksi elektronifikasi pemerintah daerah	149.999.733,00	60.834.473,00		-	89.165.260,00	Efisiensi Anggaran
					J U M L A H				**242.088.066.303,01**	**261.613.859.633,29**		-	**19.525.793.330,28**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Rencana kerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah di susun untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan Perubahan Rencana Kerja merupakan hasil evaluasi renja apabila masih memiliki kendala dalam melaksanakan program kegiatannya di tahun berjalan dapat melakukan perubahan yang dianggap penting dalam meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai kendala dan persoalan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, serta menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

PANDAN, 20 Mei 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BASYRI NASUTION. SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197108051997031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahunan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah periode Tahun 2025, dengan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahunan ini memuat tentang tugas pokok dan fungsi, visi dan misi yang ditetapkan, evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu dan tahun berjalan serta Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami sadar sepenuhnya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun yang akan datang.

Pandan, 20 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SOFIA JULIASTY HUTAGALUNG, SE,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730707 200212 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417 Pandan 22611, Sumatera Utara

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025







DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jl. Ridwan Hutagalung No. 11 Telp. 0631-371645 Pandan 22611, Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasarbagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya,sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sehubungan hal tersebut di atas maka Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus menyusun Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Perumusan Kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan dan Inovasi Pelayanan/ Revolusi Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu layanan terintegrasi dokumen administrasi kependudukan (Layanan terintegrasi dokumen kependudukan bagi warga Kab. Tapanuli Tengah memungkinkan masyarakat mendapatkan beberapa dokumen kependudukan sekaligus dalam satu kali pengajuan/pengurusan). Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

b. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2012 yaitu perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2025 ;
2. Sebagai dasar pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD ditahun selanjutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2025;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2024.

d. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Tahun Anggaran 2025, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :.

BAB I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Maksud dan Tujuan
d. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
d. Review terhadap Rencana Kerja RKPD
e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
b. Tujuan dan sasaran Renja OPD
c. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah

Analisa pecapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan berdasarkan keluaran perhitungan dari pengukuran kinerja kegiatan (PPK) dan pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Keluaran pengukuran ini dievaluasi dengan analisa terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian misi untuk dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 dialokasikan dana dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan dari Dana DAK (sisa DAK yang belum terserap). Dapat dijelaskan secara rinci penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2023 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun Lalu (sampai dengan 31 Desember TA. 2023), sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebagai berikut :**

a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

   Pembuatan LAKIP, RENJA, RENSTRA OPD tercapai 96% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

   Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 100%, dengan indikator kinerja pencapaian sasaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

2. **Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

   Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tercapai 98% dengan indicator pencapaian sasaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. **Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

   Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

   Penyediaan alat tulis kantor tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

3. **Penyediaan Bahan Logistidk Kantor**

   Penyediaan makanan dan minuman tercapai 98%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.

4. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

   Penyediaan cetakan dan penggandaan tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumalah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

5. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

   Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

d. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   1. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

      Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tercapai 90%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.

e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

      Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 83%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.

   2. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

      Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 97%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**

      Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas operasional tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.

2. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.**

   Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

II. Program Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :

b. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. **Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

   Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan hasil peningkatan pelyanan pendaftaran penduduk.

c. Penataan Pendaftaran Penduduk

1. **Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhannya.**

   Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhannya tercapai 98% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia

III. Program Pencatatan Sipil sebagai berikut :

a. Pelayanan Pencatatan Sipil

1. **Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil**

   Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan.

2. **Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya.**

   Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia.

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan tercapai 95% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tercapai 97% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebagai berikut :

a. Penyusunan Profil Kependudukan

1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota

Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota tercapai 99% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah data kependudukan kabupaten/kota.

2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain tercapai 98% dengan indicator pencapaian sasaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun.

Adapun review dari Tahun Lalu untuk program, kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sedangkan terdapat sisa lebih dari anggaran disebabkan karena langkah penghematan belanja jasa Kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jadi gambaran tentang pelaksanaan Renja 2023 di OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dengan berbagai catatan penting dalam usaha menjalankan Anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan memuaskan semua pihak. Untuk kedepan Tahun 2025 kami banyak belajar dari pengalaman serta kekurangan pada tahun 2023 sehingga diharapkan kesempurnaan pelaksanaan Renja dapat dicapai, baik dari pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan secara administrasi.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel T- C.29.

Tabel T- C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (outcome)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (N-3)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n (2023)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
1.	**Perencanaan, Penganggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	100	-	3 Dokumen	25
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Tahun	1 Tahun	2 Dokuemn	1 Tahun	100	-	1 Tahun	25
	Penyusuanan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	100	-	4 Dokumen	25

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	100	-	1 Paket	25
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	100	-	1 Paket	25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	100	-	1 Paket	25
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	100	-	1 Paket	25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Paket	2 Paket	4 Paket	2 Paket	100	-	2 Paket	25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	31 Unit	19 Unit	31 Unit	100	-	31 Unit	25
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	100	-	3 Laporan	25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	100	-	1 Laporan	25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	-	3 Unit	25

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	10 Unit	20 Unit	10 Unit	100	-	10 Unit	25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	-	1 Unit	25
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**									
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 laporan	100	-	1 Laporan	25
	Penataan Pendaftaran Penduduk									
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	25
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**									
	Pelayanan Pencatatan Sipil									
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	100	-	6 Layanan	25
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	25
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**									
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	100	-	4 Dokumen	25

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	2 Laporan	4 Dokumen	2 Laporan	100	-	2 Laporan	25
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**									
	Penyusunan Profil Kependudukan									
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	2 Laporan	4 Dokumen	2 Laporan			2 Laporan	25
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	25

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi.

b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja pelayanan OPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Berkaitan hal tersebut, maka analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah di Bidang Pelayanan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Adapun analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengahdisajikan pada Tabel T- C.30 adalah sebagai berikut :

Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-		Catatan Analisa
					Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2022 (n-4)	Tahun 2023 (n-3)	Tahun 2022 (n-4)	Tahun 2023 (n-3)	
1.	Persentase Perekaman Wajib KTP-el	100%	100 %		100%	100%	100%	100%	87%	91%	0,87	0,91	
2.	Persentase penduduk yang memiliki Akta Lahir 0-18 Tahun (kurang 1 hari)	100%	100 %		98%	99%	100%	100%	86%	91%	0,86	0,91	
3.	Kepemilikan KIA	46%	46%		42%	43%	44%	45%	36%	28%	0,36	0,28	
4.	Persentase Perjanjian Kerjasama	40%	40%		18%	21%	24%	30%	12%	15%	0,12	0,15	

Dari tabel T- C.30 tersebut, dapat dilihat Indikator kinerja yang belum mencapai target renstra SKPD, Faktor penyebab masih rendahnya capaian dari beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target, antara lain ;

1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan secara individu
2) Keterbatasan balngko KTP-El yang dimana blangko KTP-El hanya bisa dianggarkan pada Dirjen DukCapil Kemendagri, sementara untuk tingkat Kab/kota hanya penerima hasil pangadaan blangko KTP-El tersebut;
3) Keterbatasan anggaran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
4) Sarana gedung pelayanan yang belum memadai dalam mendukung pelayanan publik;
5) Pelayanan jemput bola melalui kegiatan pelayanan keliling yang masih belum optimal;
6) Belum tersedianya Mobil unit pelayanan administrasi kependudukan dalam mendukung program jemput bola (stelsel aktif);

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas untuk : "Membantu Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah di Bidang Pelayanan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan".

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pelayanan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan KTP dan tingkat akurasi elemen datanya;
2. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
3. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Tapanuli Tengah pada Penduduk Pendatang, baik dari luar Kab. Tapanuli Tengah maupun Warga Asing;
4. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
5. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
6. Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;
7. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi, sesuai dengan Misi ke-1 dan sasaran ke-1 pada RPJMD Tahun 2017-2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran Arsip Digital Dokumen Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi

Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;

8. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal dan berkembangnya fungsi Sistem Informasi SIAK sebagaimana yang diharapkan dalam agenda nasional RPJMD Tahun 2017-2022;
9. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan yang dihasilkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan, khususnya untuk penduduk di wilayah ujung selatan Kecamatan Sukabangun, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kepulauan, Kecamatan Sorkam, Pasaribu Tobing, dan Manduamas;
11. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil belum sesuai SPM.

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Faktor Kekuatan (strengths)
   a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
   b. Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan;
   c. Ketersediaan anggaran untuk urusan kependudukan dari APBD;
   d. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima;
   e. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

2. Faktor Kelemahan (weakness),
   a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM
   b. Budaya kerja yang masih lemah;
   c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;
   d. Belum maksimalnya pelaksanaan tahapan/proses perencanaan
   e. Belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan
   f. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan

Faktor eksternal :

1. **Faktor Peluang (opportunities)**
   a. Adanya dukungan anggaran dari pusat sbg pendanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik bidang pelayanan administrasi kependudukan;
   b. Adanya regulasi untuk pengurusan Adm Kependudukan : tidak dipungut biaya / gratis dan peran birokrasi dari Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif;
   c. Adanya perkembangan tehnologi IT dalam pelayanan pengurusan administasi kependudukan.
   d. Revolusi pelayanan dukcapil (Urus satu dokumen kependudukan dapat tiga/empat dokumen kependudukan, melakukan kerjasama dengan stakeholder internal/eksternal dalam cakupan kepemilikan dokumen kependudukan)
   e. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaranpenduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil
   f. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi

2. **Faktor Ancaman/Tantangan (threats)**
   a. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh antara ;
   b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan;
   c. Kurang adanya koordinasi antara Dinas dengan Pusat/SKPD/instansi lain dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
   d. Masih tersentralisasinya penyediaan material KTP-el di Pusat

Strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun yang akan direncanakan adalah :

a. Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya cakupan kepemilikan Kartu Penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya," maka ditetapkan kebijakan : "Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola; dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan"

b. Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta pencatatan Sipil," maka ditetapkan kebijakan : "Pelayanan jemput bola; Pendelegasian sebagian kewenangan ke Kecamatan dan Memperbanyak kegiatan sosialisasi".

c. Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis tehnologi," maka ditetapkan kebijakan :

- ✓ Integrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan
- ✓ Pelayanan jemput bola
- ✓ Optimalkan fungsi Petugas register Kel/Desa
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menjadikan sebagai Tim
- ✓ Mengutamakan arsip Akta kelahiran yang dialih media

d. Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan aparatur Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil," maka ditetapkan kebijakan:

- ✓ Meningkatkan pemenuhan kebutuhan ATK dan peralatan kantor;
- ✓ Pemeliharaan sarana prasarana kerja dengan tertib;
- ✓ Tingkatkan kompetensi dan budaya kerja;
- ✓ Melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan pelaporan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD

d. **Review Terhadap Rencana Kerja RKPD/Renstra OPD**

Rencana Kerja RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC. 31
REVIEW TERHADAP RENJA RKPD/RENSTRA OPD TAHUN 2025
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	RENJA RKDP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**3.879.625.077,-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**3.879.625.077,-**	
a.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD***		***25.000.000,-***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD***		***25.000.000,-***	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	25.000.000,-	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	25.000.000,-	
b.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Peningkatan sumber daya aparatur***		***3.246.188.000,-***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Peningkatan sumber daya aparatur***			
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Disdukcapil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang	3.231.188.000,-	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Disdukcapil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang	3.231.188.000,-	
	2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 Dok	15.000.000,-	2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 Dok	15.000.000,-	
c.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Peningkatan operasional kantor***		***289.000.000,-***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Peningkatan operasional kantor***		***289.000.000,-***	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumalah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	7.000.000,-	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumalah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	7.000.000,-	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	95.000.000,-	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	95.000.000,-	
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000,-	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000,-	

	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	12.000.000,-	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	12.000.000,-	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	165.000.000,-	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	265.000.000,-	
d.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Peningkatan Operasional Kantor***		***57.397.077,-***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Peningkatan Operasional Kantor***		***57.397.077,-***	
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Disdukcapil	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 Unit	57.397.077,-	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Disdukcapil	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 Unit	57.397.077,-	
e.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Peningkatan Operasional Kantor***		***145.620.000,-***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Peningkatan Operasional Kantor***		***145.620.000,-***	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	96.400.000,-	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	96.400.000,-	
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	49.220.000,-	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	49.220.000,-	
f.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Peningkatan Operasional Kantor***		***116.420.000,-***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Peningkatan Operasional Kantor***		***116.420.000,-***	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Disdukcapil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	56.420.000,-	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Disdukcapil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	56.420.000,-	
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Disdukcapil	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	40 unit	30.000.000,-	2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Disdukcapil	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	40 unit	30.000.000,-	
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Disdukcapil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	30.000.000,-	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kantor Disdukcapil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	30.000.000,-	

						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk, Kepemilikan KTP, Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK**		**700.000.000,-**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk, Kepemilikan KTP, Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK**		**700.000.000,-**	
a.	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***		***Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk***		***90.000.000,-***	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***		***Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk***		***90.000.000,-***	
	1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftran penduduk	1 Laporan	90.000.000,-	1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftran penduduk	1 Laporan	90.000.000,-	
b.	***Penataan Pendaftaran Penduduk***		***Penerapan KTP Nasional berbasis NIK***		***110.000.000,-***	***Penataan Pendaftaran Penduduk***		***Penerapan KTP Nasional berbasis NIK***		***110.000.000,-***	
	1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	1 Dokumen	110.000.000,-	1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	1 Dokumen	110.000.000,-	
c.	***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***		***Perekaman KTP elektronik***		***500.000.000,-***	***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***		***Perekaman KTP elektronik***		***500.000.000,-***	
	1. Fasilitasi Pendaftran Penduduk	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	500.000.000,-	1. Fasilitasi Pendaftran Penduduk	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	500.000.000,-	
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Rasio Bayi berAkta Kelahiran, Rasio Pasangan berAkta Nikah, Kepemilikan Akta**		**200.000.000,-**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Rasio Bayi berAkta Kelahiran, Rasio Pasangan berAkta Nikah, Kepemilikan Akta**		**200.000.000,-**	
a.	***Pelayanan Pencatatan Sipil***		***Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil***		***200.000.000,-***	***Pelayanan Pencatatan Sipil***		***Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil***		***200.000.000,-***	
	1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	6 Layanan	100.000.000,-	1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	6 Layanan	100.000.000,-	
	2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang	1 paket	100.000.000,-	2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang	1 paket	100.000.000,-	

			tersedia					tersedia			
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan**		**774.600.000,-**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan**		**774.600.000,-**	
a.	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan***		***Pelaksanaan pengumpulan data kependudukan skala Kab/Kota***		***25.000.000,-***	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan***		***Pelaksanaan pengumpulan data kependudukan skala Kab/Kota***		***25.000.000,-***	
	1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	30.000.000,-	1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	30.000.000,-	
b.	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Pelaksanaan Penataan Pengelolaan Informasi Admistrasi Kependudukan**		**30.000.000,-**	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Pelaksanaan Penataan Pengelolaan Informasi Admistrasi Kependudukan**		**30.000.000,-**	
	1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	159 Dokumen	30.000.000,-	1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	159 Dokumen	30.000.000,-	
c.	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***		***Dokumen data administrasi data kependudukan***		***719.600.000,-***	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***		***Dokumen data administrasi data kependudukan***		***719.600.000,-***	
	1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaam informasi administrasi kependudukan	2 laporan	709.600.000,-	1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaam informasi administrasi kependudukan	2 laporan	709.600.000,-	
	2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	10.000.000,-	2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	1 Kegiatan	10.000.000,-	

V.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Adanya dokumen buku profil dan data kependudukan Kabupaten/Kota**		**30.000.000,-**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Adanya dokumen buku profil dan data kependudukan Kabupaten/Kota**		**30.000.000,-**	
a.	***Penyusunan Profil Kependudukan***		***Dokumen data dan profil kependudukan***		***30.000.000,-***	***Penyusunan Profil Kependudukan***		***Dokumen data dan profil kependudukan***		***30.000.000,-***	
	1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Kantor Disdukcapil	Jumlah Data Kependudukan Kab/Kota	2 Dokumen	20.000.000,-	1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Kantor Disdukcapil	Jumlah Data Kependudukan Kab/Kota	2 Dokumen	20.000.000,-	
	2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen	10.000.000,-	2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen	10.000.000,-	
				Total	**5.584.225.007,-**				**Total**	**5.584.225.007,**	

e. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2023 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, tidak ada program / kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel TC. 32.

TABEL TC 32
RANCANGAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5	6
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**4.024.189.407,-**	**4.342.555.778,-**
a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD**	**24.996.210,-,-**	**18.343.836,-**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24.996.210,-	18.343.836,-
b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Peningkatan sumber daya aparatur**	3.246.187.763,-	3.510.466.355,-
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Disdukcapil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.231.188.000,-	3.495.466.592,-
	2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	14.999.763,-	14.999.763,-
c.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Peningkatan operasional kantor**	**288.966.243,-**	**304.706.473,-**
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumalah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6.999.105,-	6.999.105,-
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	94.999.350,-	94.739.610,-
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9.967.800,-	39.967.770,-
	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Disdukcapil	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11.999.988,-	11.999.988,-
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	165.000.000,-	155.000.000,-
d.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Peningkatan Operasional Kantor**	**57.397.001,-**	**67.796.924,-**
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Disdukcapil	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	57.397.001,-	67.796.924,-
e.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Peningkatan Operasional Kantor**	**139.842.190,-**	**154.242.190,-**
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	96.250.000,-	126.250.000,-
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	43.592.190,-	27.992.190,-
f.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Peningkatan Operasional Kantor**	**266.800.000,-**	**283.000.000,-**

	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Disdukcapil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	206.800.000,-	202.000.000,-
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Disdukcapil	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30.000.000,-	35.000.000,-
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Disdukcapil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30.000.000,-	46.000.000
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk, Kepemilikan KTP, Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK**	**698.790.011,-**	**1.330.749.401,-**
a.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**89.999.950,-**	**55.759.871,-**
	1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftran penduduk	89.999.950,-	55.759.871,-
b.	**Penataan Pendaftaran Penduduk**		**Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**	**109.999.890,-**	**119.078.247,-**
	1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	109.999.890,-	119.078.247,-
c.	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**Perekaman KTP elektronik**	**498.790.171,-**	**1.055.911.283,-**
	1. Fasilitasi Pendaftran Penduduk	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	498.790.171	1.055.911.283,-
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Rasio Bayi berAkta Kelahiran, Rasio Pasangan berAkta Nikah, Kepemilikan Akta**	**199.999.850,-**	**119.999.123,-**
a.	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**199.999.850,-**	**119.999.123,-**
	1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kantor Disdukcapil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	99.999.950,-	41.820.602,-
	2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	99.999.900,-	78.178.521,-
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan**	**774.855.468,-**	**773.520.560,-**
a.	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Pelaksanaan pengumpulan data kependudukan skala Kab/Kota**	**25.297.528,-**	**9.863.410,-**
	1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	25.297.528,-	9.863.410,-
b.	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Pelaksanaan Penataan Pengelolaan Informasi Admistrasi Kependudukan**	**29.988.250,-**	14.238.250,-

	1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	29.988.250,-	14.238.250,-
c.	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Dokumen data administrasi data kependudukan**	**719.569.690,-**	**749.418.900,-**
	1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaam informasi administrasi kependudukan	709.600.000,-	749.418.900,-
	2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kantor Disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.969.690,-	6.318.900,-
V.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Adanya dokumen buku profil dan data kependudukan Kabupaten/Kota**	**29.980.137,-**	**26.437.017,-**
a.	**Penyusunan Profil Kependudukan**		**Dokumen data dan profil kependudukan**	29.980.137,-	26.437.017,-
	1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Kantor Disdukcapil	Jumlah data kependudukan Kab/Kota	19.998.018,-	19.998.018,-
	2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kantor Disdukcapil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	9.982.119,-	6.438.999,-
			TOTAL	**5.727.814.874,-**	**6.593.261.879,-**

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai sasaran khusus yang terpadu dan dilaksanakan oleh bidang-bidang organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan landasan penetapan kerja, adapun Program dan Kegiatan Tahun 2025, antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

III. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Pendaftaran Penduduk

I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

II. Penataan Pendaftran Penduduk

1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

III. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1. Fasilitas pendaftaran penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

I. Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

I. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data Penyajian Database Kependudukan

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

II. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

III. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

I. Penyusunan Profil Kependudukan

1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota
2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggaraan dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil.

FORM 3

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN : TAPANULI TENGAH

NO	URUSAN	RKPD TAHUN 2025				URUSAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	1 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.024.189.407**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**4.342.555.778**	318.366.371		
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**1 Tahun**	**24.996.210**			**1 Tahun**	**18.343.836**	(6.652.374)		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.996.210		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	18.343.836	(6.652.374)		**Disdukcapil**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**	**1 Tahun**	**3.246.187.763**		**Terlaksananya Administrasi Keuangan**	**1 Tahun**	**3.510.466.355**	264.278.592		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	36 Orang/b	3.231.188.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	36 Orang/b	3.495.466.592	264.278.592		**Disdukcapil**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	32 Dokume	14.999.763		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	32 Dokume	14.999.763	-		**Disdukcapil**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Mendukung Kelancaran Operasional Kantor**	**1 Tahun**	**288.966.243**		**Mendukung Kelancaran Operasional Kantor**	**1 Tahun**	**308.706.473**	19.740.230		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.999.105		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.999.105	-		**Disdukcapil**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	94.999.350		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	94.739.610	(259.740)		**Disdukcapil**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.967.800		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.967.770	29.999.970		**Disdukcapil**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.999.988		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.999.988	-		**Disdukcapil**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	165.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	155.000.000	(10.000.000)		**Disdukcapil**

KABUPATEN : TAPANULI TENGAH

NO	URUSAN	RKPD TAHUN 2025				URUSAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Adanya Barang Milik Daerah**	**1 Tahun**	**57.397.001**		**Adanya Barang Milik Daerah**	**1 Tahun**	**67.796.924**	10.399.923		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	57.397.001		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	67.796.924	10.399.923		Disdukcapil
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Mendukung Kelancaran Operasional Kantor**	**1 Tahun**	**139.842.190**		**Mendukung Kelancaran Operasional Kantor**	**1 Tahun**	**154.242.190**	14.400.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.250.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.250.000	30.000.000		Disdukcapil
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.592.190		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.992.190	(15.600.000)		Disdukcapil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**1 Tahun**	**266.800.000**		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**1 Tahun**	**283.000.000**	16.200.000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	206.800.000		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	202.000.000	(4.800.000)		Disdukcapil
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000	5.000.000		Disdukcapil
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	30.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	46.000.000	16.000.000		Disdukcapil
		2 **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**698.790.011**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**1.330.749.401**	631.959.390		
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**1 Tahun**	**89.999.950**		**Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**1 Tahun**	**55.759.871**	(34.240.079)		
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	89.999.950		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	55.759.871	(34.240.079)		Disdukcapil
		Penataan Pendaftaran Penduduk	**Tersedianya Fasilitas Pelayanan**	**1 Tahun**	**109.999.890**		**Tersedianya Fasilitas Pelayanan**	**1 Tahun**	**119.078.247**	9.078.357		

KABUPATEN : TAPANULI TENGAH

NO	URUSAN	RKPD TAHUN 2025				URUSAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	109.999.890		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	119.078.247	9.078.357		**Disdukcapil**
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Perekaman KTP elektronik**	**1 Tahun**	**498.790.171**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**1 Tahun**	**1.155.911.283**	657.121.112		
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	498.790.171		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.155.911.283	657.121.112		**Disdukcapil**
		3 **PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**199.999.850**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**119.999.123**	(80.000.727)		
		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil**	**1 Tahun**	**199.999.850**		**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil**	**1 Tahun**	**119.999.123**	(80.000.727)		
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	7 Layanan	99.999.950		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	7 Layanan	41.820.602	(58.179.348)		**Disdukcapil**
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	99.999.900		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	78.178.521	(21.821.379)		**Disdukcapil**
		4 **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**774.855.468**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**773.520.560**	(1.334.908)		
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Adanya Data Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah**	**1 Tahun**	**25.297.528**		**Adanya Data Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah**	**1 Tahun**	**9.863.410**	(15.434.118)		
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	25.297.528		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	9.863.410	(15.434.118)		**Disdukcapil**
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Pengelolaan data kependudukan skala kabupaten/kota**	**1 Tahun**	**29.988.250**		**Pengelolaan data kependudukan skala kabupaten/kota**		**14.238.250**	(15.750.000)		

KABUPATEN : TAPANULI TENGAH

NO	URUSAN	RKPD TAHUN 2025				URUSAN	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	29.988.250		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	14.238.250	(15.750.000)		**Disdukcapil**
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**1 Tahun**	**719.569.690**		**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**1 Tahun**	**649.918.900**	(69.650.790)		
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	709.600.000		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	643.600.000	(66.000.000)		**Disdukcapil**
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	9.969.690		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	6.318.900	(3.650.790)		**Disdukcapil**
		5 **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**29.980.137**		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**26.437.017**	(3.543.120)		
		Penyusunan Profil Kependudukan	**Tersusunnya Dokumen Data Profil Kependudukan**	**3 Dokumen**	**29.980.137**		**Tersusunnya Dokumen Data Profil Kependudukan**	**3 Dokumen**	**26.437.017**	(3.543.120)		
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	19.998.018		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	19.998.018	-		**Disdukcapil**
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	9.982.119		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	6.438.999	(3.543.120)		**Disdukcapil**
TOTAL					**5.727.814.873**				**6.593.261.879**	865.447.006		

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

SOFIA JULIASTY HUTAGALUNG, SE, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197307072002122001

BAB V

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Recana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2023-2026, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema maupun nasional. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, stake holder yang bersangkutan serta peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Pergeseran Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun, kiranya dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan dukungan berbagai stakeholder terkait demi peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju Pelayanan Prima bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 20 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SOFIA JULIASTY HUTAGALUNG, SE.M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730707 200212 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

kelautanperikanan.id@gmail.com

Jl. Oswald Siahaan
No. 20 Pandan

Telp. (0631) 371006





PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. OSWALD SIAHAAN NO. 20 TELP. (0631) 371006 FAX. (0631) 371006
PANDAN - 22611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor : 523 / 32 / V / 2025

TENTANG

PENETAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SUMBER DANA APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang :

a. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah disusun 2 tahun sebelum tahun Rencana.
b. Untuk Perubahan Rencana Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu untuk menetapkan penyusun Perubahan Rencana Kerja 2025.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir "a". di atas, perlu ditetapkan dengan Surat kepu`tusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang No.22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Tentang Tata cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No.26 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Penyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Nama	Gol/ pangkat	Jabatan	Keterangan
1	M.Ridsam Batubara, S.Pi 19710404 199703 1 004	IV.c/ Pembina Utama Muda	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Azwar Sitompul,SH / 19700220 200212 1 001	IV.b/ Pembina TK.I	Sekretaris	Kordinator
3	Edwar Bangun S.Pi 19790803 200502 1 002	III.d/ Penata TKI	Kepala Bidang Penangkapan,Perizinan dan pemberdayaan	Penanggung Jawab Usulan Bidang Penangkapan,Perizinan dan pemberdayaan
4	Wiwin Audrisanto S, S.Sos, MM / 1831201 200212 1 003	III.d/ Penata TKI	Kepala Bidang Budidaya, Pengelolaan dan pemasaran	Penanggung jawab Usulan Bidang Budidaya, Pengelolaan dan pemasaran
5	Abdullah Hutabarat,ST/ 19720429 200212 1 001	III.d/ Penata TKI	Perencana	Sub Kordinator

Kedua : Tim Penyusun melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Ketiga : Tugas Tim Penyusun Rencana kerja 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan PerubahanRencana Kerja Kegiatan yang Perioritas.

b. Mempelajari dan menganalisa Rencana Kegiatan yang mendukung pembangunan disektor SDM bidang Perikanan
c. Mengsingkronisasikan program Pemerintah Pusat dan Provinsi
d. Menganalisa tujuan dan dampak dari kegiatan yang akan di tetapkan
e. Melakukan analisa kebutuhan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
f. Menampung dan menganalisa usulan /aspirasi /permohonan dari masyarakat / Pokir untuk di jadikan kegiatan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana kerja 2025 kepada Pengguna Anggaran (PA);

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditanda Tangani, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan

Pada Tanggal : 20 Mei 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

M.RIDSAM BATUBARA, S.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197104041997031004

Tembusan :
1. Kepala Bapeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
3. Arsip

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah masih dapat melaksanakan Tupoksi berdasarkan program kerja yang pro rakyat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para masyarakat nelayan,pembudidaya dan Pelaku perikanan scala kecil di kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 dimana Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) untuk tahun yang akan berjalan setiap tahunnya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 ini mengacu kepada jumlah pagu indikatif yang tersedia. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bidang-bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah ini untuk pada akhirnya akan menjadi Perubahan Rencana kerja dan kepada tim Perencanaan DKP yang telah mendukung Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini , kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

BAB I **3**

PENDAHULUAN **3**

LATAR BELAKANG 4

DASAR HUKUM 5

MAKSUD DAN TUJUAN 6

Maksud 6

Tujuan 6

SISTIMATIKA PENULISAN 7

BAB II **8**

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA **8**

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **8**

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 9

LALU 9

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 12

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 17

BAB III **21**

TUJUAN DAN SASARAN **21**

TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 21

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 22

BAB. IV **23**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **23**

BAB V **28**

PENUTUP **28**

Saran 28

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 28

Rencana Tindak lanjut 29

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yang mengacu kepada kebutuhan pelaksanaan Tupoksi dengan berpedoman kepada RPJMD dan Renstra. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja nantinya untuk selanjutnya melangkah ketahapan tahapan yang pada tujuannya dalam pelaksanaan implementasi dari tugas pokok dan fungsi di bidang-bidang teknis yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Syukur kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya para staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah masih bersenergi melaksanakan Tupoksi dalam mewujudkan program kerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan,pembudidaya dan Pelaku perikanan skala kecil di kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan menteri Dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 perubahan atas Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka Rencana Kerja ini disusun saat ini .

Kami menyadari betul masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari kalangan stocholder yang bertujuan untuk perbaikan

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah ini untuk tahun berikutnya.

LATAR BELAKANG

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari beberapa sektor potensi dan peluang investasi yang besar di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berada di pesisir Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dengan panjang garis pantai ± 200 km dan memiliki 19 pulau – pulau kecil serta wilayahnya langsung menghadap ke Samudera Indonesia. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau-pulau kecil sekitar wilayah kabupaten ini. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 Kecamatan meliputi Kecamatan Manduamas, Sirandorung, Andam Dewi, Barus, Barus Utara, Sosorgadong, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, Pandan, Sarudik, Tukka, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun dan Sukabangun. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah ini, sebanyak 12 kecamatan merupakan wilayah pesisir.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu SKPD yang berperan untuk Pencapaian Masyarakat Pesisir untuk Maju, Sejahtera dan Bermartabat di bidang Sektor Perikanan yang mana Visi Kabupaten Tapanuli Tengah "*Membangun Tapanuli Tengah Adil Untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban*". Peran sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah sehingga pembangunan bidang kelautan dan perikanan harus tetap dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Terwujudnya Masyarakat Tapanuli Tengah yang *Berkarakter,Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera*" kami implemantasikan terhadap Misi Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah "*Mewujudkan kedaulatan perikanan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap,pengadaan kapal penangkap ikan berteknologi tinggi, dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan*".

Dalam mewujudkan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disesuaikan dengan masa kebutuhan maka setiap tahunnya akan dimungkinkan terjadinya perubahan kegiatan Rencana Kerja OPD. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong Partisipasi keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan propesi yang secara bersama sama ingin mencapai kesejahteraan dengan mendukung terlaksananya program pemerintah.

DASAR HUKUM

Landasan Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapanuli tengah Tahun Anggaran 2025;

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan adalah Untuk menggambarkan tujuan Rencana Kegiatan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarat nelayan kecil, masayrakat pembudidaya ikan kecil dan pengolah ikan serta pemasar di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dari Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Pokdakan dan Pohlahsar.
2. Untuk target Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (Nelayan Kecil dan Pokdakan) serta Produksi Olahan;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia sesuai dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;

SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi serta Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPD

BAB. V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pencapaian kinerja setiap opd sangat diharapkan untuk mendukung pencapaian dari pada Renstra dan keberhasilan dari RKPD , dimana target dari pada Renstra selama 5 tahun akan menggambarkan keberhasilan dari Suatu kepala Daerah dalam masa jabatan kepemimpinannya.

Tabel. 2.1 (TC.30)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi Tw. I 2025
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pilihan						
	a) Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: *one data* KKP)	Ton	42.307	41.498	52.692	9.209

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun lalu adalah sebagi berikut:

Hasil evaluasi Renja
TA.2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD padaTahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Pawab
											I		II		III		IV								
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		15 = 14/6 x 100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																						
		3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																						
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	20,000,000	75%	6,723,900	100%	5,122,708	0%	-	0%	-	0.0%		82%	4,180,400	82%	4,180,400	78%	10,904,300	55%	0.545215	
		3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																						
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,915,933,000	98%	1,889,513,159	100%	2,027,903,000	0%		32%	640,061,378	21.4 %	434,720,001	26%	531,083,768	79%	1,605,865,147	89%	3,495,378,306	205%	1.824373977	
		3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																						
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	10,000,000	94 %	14,087,000	100%	5,852,697	26%	1,501,800	13%	763,000	0.0%	-	61%	3,581,400	100 %	5,846,200	97%	19,933,200	199%	1.99332	
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	84,000,000	63 %	47,019,000	100%	60,504,435	11%	6,698,000	13%	7,976,400	14.0%	8,500,400	62%	37,271,200	100 %	60,446,000	82%	107,465,000	128%	1.279345238	
		3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	75,000,000	72 %	21,890,000	100%	32,012,400	0%	-	6%	1,825,000	8.1%	2,598,000	43%	13,887,000	57%	18,310,000	65%	40,200,000	54%	0.536	
1	Meningkatkan Kinerja	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	13,193,386	78 %	6,540,000	100%	11,691,630	0%	-	38%	4,457,000	0.0%	-	56%	6,548,000	94%	11,005,000	86%	17,545,000	133%	1.329832994	
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	180,000,000	84 %	221,728,595	100%	129,000,000	30%	38,579,930	20%	26,086,000	24.8%	32,052,677	24%	31,185,591	99%	-	91%	221,728,595	123%	1.231825528	
		3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																						
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tersedianya Jasa Komunikasi	100%	70,484,524	73 %	43,491,476	100%	70,000,000	17%	11,970,982	17%	11,603,343	11.6%	8,123,453	27%	19,040,525	72%	50,738,303	73%	94,229,779	134%	1.33688608	

			Air dan Listrik	,Sumberdaya Air dan listrik																					
		3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	15,000,000	100 %	5990000	100%	15,000,000	11%	1,640,000	14%	2,140,000	10.5%	1,580,000	63%	9,465,000	99%	14,825,000	99%	20,815,000	139%	1.387666667	
		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	502,041,600	96 %	406,921,600	100%	494,240,598	25%	122,100,000	25%	122,100,000	25.2%	124,720,800	25%	124,720,800	100 %	493,641,600	98%	900,563,200	179%	1.793801948	
		3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																						
		3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	35,320,000	74%	26086090	100%	28,000,000	8%	2,185,000	4%	1,200,000	25.8%	7,214,000	61%	17,104,717	99%	27,703,717		53,789,807	152%	1.522927718	
		3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**																						
2	**Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**3.25.03.2.02**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**																						
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100%	200,000,000	99 %	104,895,000	100%	199,655,674	0%	-	0%	-	29.2%	58,362,000	55%	109,580,190	84%	167,942,190	92%	272,837,190	136%	1.36418595	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Pawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**																						
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.25.042.04	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**																						
3		3.25.04.2.04.02	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	100%	200,000,000	0%	-	100%	199,953,743	0%	-	32%	64,651,352	37.0%	74,052,800	15%	30,880,700	85%	169,584,852	42%	169,584,852	85%	0.84792426	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									100 %	**3,278,936,885**	6%	**184,675,712**	27%	**882,863,473**	22.9%	**751,924,131**	29%	**938,529,291**	84%	**2,757,992,607**					
Predikat Kinerja											Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Tinggi						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindaklanjut yang diperlukan dalam SKPD berikutnya :

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

M.RIDSAM BATUBARA, S.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197104041997031004

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja setiap OPD terkadang masih terdapat kebanyakan pengajuan kegiatan yang bersifat non peroritas sehingga perlu di adakan Reviuw atas penyampaian usulan didalam rencana kerja yang bertujuan agar ada terdapat keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan rutinisasi dari opd dengan pelayanan atas kebutuhan publik / pelaku perikanan.

Tabel T.C 31

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
♦	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
♦	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**4.295.303.707**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**4.470.303.707**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.291.227.553**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.381.227.553**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**995.781**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**995.781**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	995.781	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	995.781	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.216.207.418**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.223.047.418**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	2.163.006.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	2.163.006.300	

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pergujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	38.892.360	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	38.892.360	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	14.308.758	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	21.148.758	
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**86.884.310**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**161.044.310**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	989.565	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	989.565	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.427.781	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.726.961	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.693.524	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.693.524	

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.499.940	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.634.260	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	64.273.500	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	79.000.000	
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**570.141.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**480.141.600**	
1	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	69.900.000	Penyediaan JasaKomunikasi , Sumber DayaAir dan Listrik	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	69.900.000	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	494.241.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	404.241.600	

E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**416.998.444**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**425.998.444**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	17.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	26.000.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	399.998.444	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	399.998.444	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**804.096.406**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**904.096.406**	
A	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**0**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**100.000.000**	
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	100.000.000	Prioritas Untuk Target RPJMD
B	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**804.096.406**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**804.096.406**	
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	804.096.406	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	804.096.406	

III	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**199.979.748**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**274.979.748**	
A	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**199.979.748**	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**				**274.979.748**	
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000	
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kotA	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersalurkannya Prasarana Pembudidaya Ikan dan Pendataan data Produksi Budidaya Ikan	1 Paket	199.979.748	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kotA	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersalurkannya Prasarana Pembudidaya Ikan dan Pendataan data Produksi Budidaya Ikan	1 Paket	199.979.748	

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

M.RIDSAM BATUBARA, S.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197104041997031004

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan/ masayrakat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel T.C. 32

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				
A	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
B	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	

III	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				
A	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tapanuli Tengah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tapanuli Tengah	Tersalurkannya Prasarana Pembudidaya Ikan dan Pendataan data Produksi Budidaya Ikan	1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Singkronisasi program pembangunan daerah terhadap prioritas nasional, prioritas provinsi, dan prioritas Daerah Tapteng tahun 2025

SINGKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS PROVINSI, DAN PRIORITAS DAERAH TAPTENG TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL	JUMLAH PROGRAM YANG ADA DI OPD	PRIORITAS PROVINSI	JUMLAH PROGRAM YANG ADA DI OPD	PRIORITAS TAPTENG	JUMLAH PROGRAM YANG ADA DI OPD
Memperkuat Pembangunanan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Mileneal dan Generasi Z), dan Penyandan Disibilitas	2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1
-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia	2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia	2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Recana Kerja tahun 2025 dari Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain :

1. Untuk Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Pelaku Perikanan
2. Untuk Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap , Perikanan Budidaya dan Olahan
3. Untuk Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Nelayan ,Pembudidaya , Pengolah dan Pemasar Ikan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Perikanan Laut dan Darat

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Tapanuli Tengah adalah yang seperti ditunjukkan pada tabel T.C 33 di bawah ini. Tabel ini berisi Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jumlah Seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebanyak 3 Program dan 7 Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan untuk semua Program dan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. *4.454.463.707* (*empat miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah).*

Tabel T.C 33

KODE					URUSAN	PROGRAM KEGIATAN		INDIKATOR	LOKASI	TARGET		PAGU				KETERANGAN
						SEBELUM	SETELAH			RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	RENJA 2025	PERUBAHAN RENJA 2025	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.295.303.707	4.454.463.707	4.295.303.707	4.454.463.707	
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.291.227.553	3.275.387.553	3.291.227.553	3.275.387.553	
3	25	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					995.781	995.781	995.781	995.781	

3	25	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Tengah	5 Dokumen	5 Dokumen	995.781	995.781	995.781	995.781	
3	25	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**2.216.207.418**	**2.216.207.418**	**2.216.207.418**	**2.216.207.418**	
3	25	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Tengah	23 Orang/ Bulan	23 Orang/ Bulan	2.163.006.300	2.163.006.300	2.163.006.300	2.163.006.300	
3	25	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	38.892.360	38.892.360	38.892.360	38.892.360	
3	25	01	2.02	0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Tapanuli Tengah	4 Dokumen	4 Dokumen	14.308.758	14.308.758	14.308.758	14.308.758	
3	25	01	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**86.884.310**	**161.044.310**	**86.884.310**	**161.044.310**	
3	25	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tapanuli Tengah	1 Paket	1 Paket	989.565	989.565	989.565	989.565	
3	25	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tapanuli Tengah	1 Paket	1 Paket	12.427.781	64.726.961	12.427.781	64.726.961	
3	25	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tapanuli Tengah	1 Paket	1 Paket	4.693.524	8.693.524	4.693.524	8.693.524	
3	25	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tapanuli Tengah	4 Paket	4 Paket	4.499.940	7.634.260	4.499.940	7.634.260	

3	25	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapanuli Tengah	2 Laporan	2 Laporan	64.273.500	79.000.000	64.273.500	79.000.000	
3	25	01	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**570.141.600**	**480.141.600**	**570.141.600**	**480.141.600**	
3	25	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tapanuli Tengah	36 Laporan	36 Laporan	69.900.000	69.900.000	69.900.000	69.900.000	
3	25	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
3	25	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	12 Laporan	494.241.600	404.241.600	494.241.600	404.241.600	
3	25	01	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**416.998.444**	**416.998.444**	**416.998.444**	**416.998.444**	
3	25	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tapanuli Tengah	2 Unit	2 Unit	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	
3	25	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Tapanuli Tengah	1 Unit	1 Unit	399.998.444	399.998.444	399.998.444	399.998.444	

3	**25**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**804.096.406**	**904.096.406**	**804.096.406**	**904.096.406**	
3	**25**	**03**	**2.01**			-	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**					-	**100.000.000**		**100.000.000**	
3	**25**	**03**	**2.01**	0001		-	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Tapanuli Tengah	-	1 Dokumen	-	100.000.000		100.000.000	Mendukung RPJMD "Nilai Tukar Nelayan"
3	**25**	**03**	**2.02**			**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**804.096.406**	**804.096.406**	**804.096.406**	**804.096.406**	
3	**25**	**03**	**2.02**	0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Tapanuli Tengah	50 Orang	100 Orang	804.096.406	804.096.406	804.096.406	804.096.406	
3	**25**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**199.979.748**	**274.979.748**	**199.979.748**	**274.979.748**	
3	**25**	**04**	**2.02**			**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**					**199.979.748**	**274.979.748**		**274.979.748**	
3	**25**	**04**	**2.02**	0001		-	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapanuli Tengah	-	1 Dokumen	-	75.000.000	-	75.000.000	Mendukung RPJMD "Nilai Tukar Pembudidaya Ikan"

3	25	04	2.02	0009		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Prasarana Pembudidaya Ikan dan Pendataan data Produksi Budidaya Ikan	Kab. Tapanuli Tengah	1 Paket	1 Paket	199.979.748	199.979.748	199.979.748	199.979.748	

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

M.RIDSAM BATUBARA, S.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197104041997031004

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 ini merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2025 nantinya. Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjadi lebih terarah dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perikanan, peningkatan Produksi hasil perikanan laut , darat dan Olahan serta upaya Pencapaian Tugas sesuai Tupoksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah. Dengan demikian Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memenuhi target Renstra yang telah di susun

Saran

1. Mohon kepada Bapeda / Tim Anggaran Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah untuk memberikan waktu yang cukup dalam perencanaan.
2. Diharapkan Kepada Bapeda dan atau Tim Anggaran Pemerintah kabupaten Dapat memberikan TPP yang lebih kepada Tim Program di setiap OPD.
3. Kepada Pimpinan OPD agar menambah jumlah staf ASN di bagian Program/Perencanaan mengingat muatan pekerjaaannya.
4. Penyerapan/ Penarikan anggaran sebaiknya tidak di bagi-bagi secara merata / (triwulan) oleh BPKPAD tetapi dapat ditarik sesuai rencana kebutuhan OPD Pengelola/Pengguna Anggaran.
5. Mohon untuk setiap kegiatan yang bersifat berhubungan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas dalam anggaran.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Menteri Kelautan No.1/ PERMEN- KP 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

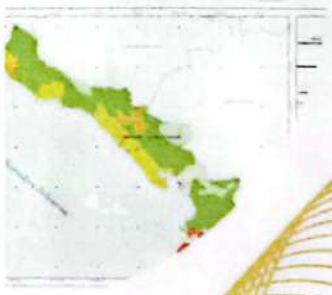
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)









Dinas Kesehatan
Kabupaten Tapanuli Tengah

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah ini berisi tentang program kegiatan dari usulan setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Perubahan Rencana kegiatan tersebut menjadi acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja demi kelancaran pembangunan kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan dokumen ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pandan, 20 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dr. ERWIN H HARAHAP, S.STP, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19761208 199602 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR LAMPIRAN iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 14
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional dan provinsi 17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 17

BAB IV PENUTUP 27

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Pencapaian hasil pembangunan kesehatan memerlukan rencana kerja. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2023 serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama 1 (satu) tahun baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan, terdapat berbagai dinamika dan perubahan yang menuntut penyesuaian terhadap dokumen Renja yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini diperlukan agar pelaksanaan program tetap selaras dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, serta tetap mendukung pencapaian target pembangunan sektor kesehatan. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kesehatan tahun 2025 mencakup revisi atau penyesuaian yang dilakukan terhadap dokumen Rencana Kerja yang sudah ada, untuk memastikan keselarasan dengan perubahan kebijakan, hasil capaian kinerja sebelumnya, serta kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan renja dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan perubahan renja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada renstra perangkat daerah, hasil evaluasi rancangan awal perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi rancangan awal renja perangkat daerah tahun berjalan.

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Kerja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja SKPD disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Perubahan Renja disusun berdasarkan perubahan yang terjadi pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berjalan. Tujuan utama perubahan Renja adalah untuk menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan situasi. Perubahan Renja Dinas Kesehatan dilatarbelakangi oleh beberapa hal penting seperti penyesuaian terhadap program prioritas nasional, penyesuaian terhadap pagu anggaran, dan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang menunjukkan perlunya perbaikan strategi dan pendekatan agar capaian kinerja lebih optimal. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tetap terarah, efisien, dan efektif, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan secara optimal.

Dipindai dengan CamScanner

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang -Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentnag Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016

Dipindai dengan CamScanner

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, dan merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah mendeskripsikan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target kinerja dan pendanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
- a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategi Dinas Kesehatan
- b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- c. Isu isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD
- d. Review Terhadap Rancangan RKPD
- e. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
a. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
b. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategi Dinas Kesehatan

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan I Tahun 2025 ditampilkan pada Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025

Dipindai dengan CamScanner

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah
Periode Pelaksanaan : 2025

FORM E.60 EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TRIWULAN I

No	Kaseran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
1	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	84.945.895.936	100%	72.929.830.026	100%	81.549.334.850	25%	20.365.208.324	0%		0%		0%		25%	20.365.208.324	62%	93.295.094.350	62%	1.697941585	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1	02	01	2.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		1	02	01	2.08	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	88.830.000	100%	48.641.460	100%	49.959.000	0%	0	0%		0%		0%		0%		50%	48.641.460	50%	0.547640647	Dinas Kesehatan
		1	02	01	2.08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	266.530.001	100%	153.228.774	100%	44.958.376	0%	-	0%		0%		0%		0%		50%	153.228.774	50%	0.574932539	Dinas Kesehatan
		1	02	01	2.08	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	133.240.001	100%	0	100%	1.000.000	0%	0	0%		0%		0%		0%		50%	-	50%	0	Dinas Kesehatan
		1	02	01	2.08	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	222.100.001	100%	103.991.560	100%	115.957.149	0%	0	0%		0%		0%		0%		50%	103.991.560	50%	0.468219539	Dinas Kesehatan
		1	02	01	2.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	266.530.001	100%	33.733.396	100%	110.000.000	0%	0	0%		0%		0%		0%		50%	33.733.396	50%	0.126505069	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1	02	01	2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	4.410.001	100%	5.000.000	100%	2.497.300	0%	0	0%		0%		0%		0%		50%	5.000.000	50%	1.133786591	Dinas Kesehatan
		1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	266.530.001	100%	304.384.700	100%	239.900.000	25%	60.753.745	0%		0%		0%		25%		63%	304.384.700	63%	1.142028125	Dinas Kesehatan
		1	02	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	155.430.002	100%	74.996.000	100%	87.500.000	0%	0	0%		0%		0%		0%		50%	74.996.000	50%	0.482500155	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1	02	01	2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		1	02	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	310.970.001	100%	289.516.026	100%	31.429.200	0%	0	0%		0%		0%		0%		50%	289.516.026	50%	0.931009903	Dinas Kesehatan
5	Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan pelayanan publik	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	310.970.001	100%	151.309.037	100%	429.997.592	0%	0	0%		0%		0%		0%		50%	151.309.037	50%	0.486571169	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																					
1	Meningkatnya upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota																					
		1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0%	-	0%	20.138.265.714	100%	15.026.672.302		0	0%		0%		0%		0%		0%	20.138.265.714	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan	100%	10.046.130.001	0%	466.384.850	100%	216.149.061		0	0%		0%		0%		0%		0%	466.384.850	0%	0.046434231	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				122.451.751	100%	131.593.000																

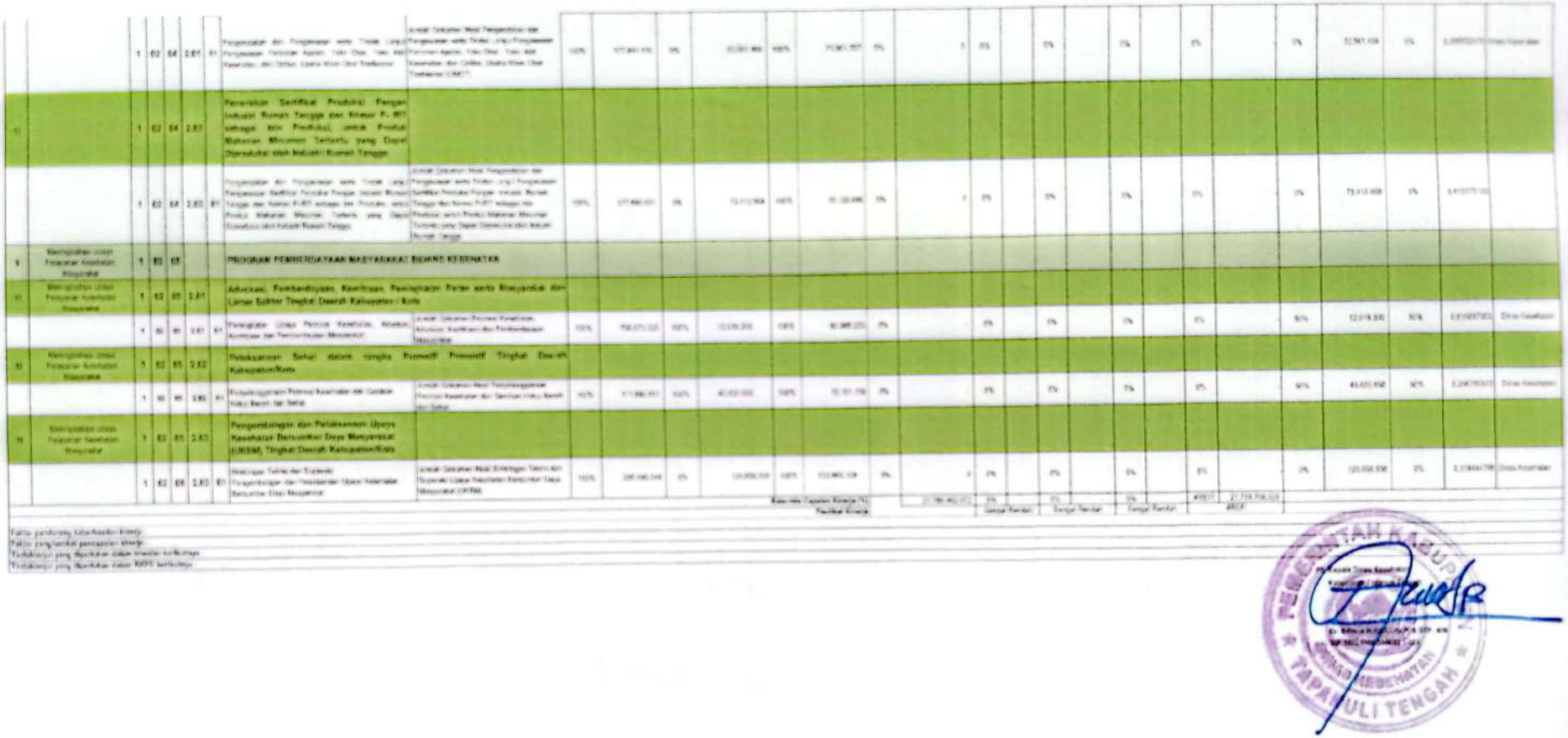
Dipindai dengan CamScanner

		1	02	02	2.01	73	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang diadakan				4.148.290.315	100%	8.204.685.605																				
		1	02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis Pakai, bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas kesehatan				114.809.435	100%	149.519.442																				
7	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**																												
		1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102%	1.169.760.001	100%	1.115.238.260	100%	2.505.988.958	0%		0	0%		0%		0%		0%		-	50%	1.115.238.260	50%	0.5012389581	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102%	318.870.001	100%	157.316.038	100%	15.992.100	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	157.316.038	50%	0.6345204921	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	347.350.000	100%	41.492.536	100%	20.866.200	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	41.492.536	50%	0.1194454544	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	266.530.001	0%	647.904.600	100%	578.634.900				0%		0%		0%		0%			0%	647.904.600	0%	2.4309695[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	247.730.001	100%	83.534.310	100%	250.714.700	#REF!		-	0%		0%		0%		#REF!		-	#REF!	61.092.300	#REF!	0.2465697[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102%	177.650.001	0%	61.092.300	100%	23.103.542			-	0%		0%		0%		0%		-	0%	61.092.300	0%	0.3437771[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	177.650.001	100%	317.438.500	100%	12.869.559	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	317.438.500	50%	1.7867758[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100%	177.650.001	0%	62.214.300	100%	344.537.100	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	0%	62.214.300	0%	0.3501711[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	177.650.001	100%	1.030.946.600	100%	676.942.850	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	1.030.946.600	50%	5.8022[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	177.650.001	0%	186.759.400	100%	17.582.515	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	0%	186.759.400	0%	1.0510[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana sesuai standar	102%	475.740.000	100%	43.244.303	100%	10.502.050	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	40.244.303	50%	0.5608[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	3.853.220.000	100%	6.043.137.069	100%	7.057.740.000	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	6.043.137.069	52%	1.1[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%	444.640.001	100%	15.508.552	100%	158.139.513	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	15.508.552	50%	0.0348[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	1.464.750.000	100%	927.908.612	100%	566.705.116	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	927.908.612	50%	0.6334[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%	1.469.930.000	100%	324.056.615	100%	90.033.439	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	324.056.615	50%	0.2174[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100%	177.650.001	100%	41.619.048	100%	17.969.656	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	41.619.048	50%	0.2342[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	1.207.620.000	100%	664.331.753	100%	610.695.900	0%		-	0%		0%		0%		0%		-	50%	664.331.753	52%	0.4752[illegible]	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0		255.627.400																		

Dipindai dengan CamScanner

		1	02	02	2.02	34	Pengelolaan Upaya Penguranga Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Penguranga Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100%	177.650.031	0%	18.407.009	100%	21.419.822	0%	-	0%		0%		0%		0%		-	0%	18.407.009	0%	0.103596413	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	35	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	1.814.770.000	100%	2.757.403.630	100%	2.727.033.569	0%	-	0%		0%		0%		0%		-	50%	2.757.403.630	50%	1.513423154	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	36	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	13.328.230.000	100%	38.234.275.760	100%	48.907.979.592	0%	-	0%		0%		0%		0%		-	50%	38.234.275.760	50%	2.71651735	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	38	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan				205.000		36.305.000																	
		1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	19.536.510.001	100%	8.232.917.646	100%	10.954.030.552	12%	1.354.500.000	0%		0%		0%		12%	1.354.500.000	56%	9.907.410.646	56%	0.5317675	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		47.863.492																	
		1	02	02	2.02	38	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100%	1.448.000.000	0%	144.329.751	100%	5.000.000	0%	-	0%		0%		0%		0%		-	0%	144.329.751	0%	0.009697141	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Reaksi Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Reaksi Wabah	100%	177.650.001	0%	82.568.612	100%	17.219.684	0%	-	0%		0%		0%		0%		-	0%	82.568.612	0%	0.554704027	Dinas Kesehatan
		2	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar				53.271.645		9.999.777																	
		1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Penderita Malaria yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0%	-	0%	52.706.100	100%	39.134.930	0%	0	0%		0%		0%		0%		-	0%	52.706.100	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	39 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				493.596.820		343.953.100																	
		1	02	02	2.02	39 45	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2.215.656.000		422.961.503																	
E	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																										
		1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Database Informasi Kesehatan	100%	933.240.031	100%	2.511.173.526	100%	466.832.340	0%	-	0%		0%		0%		0%		-	50%	2.511.173.526	50%	18.8466943	Dinas Kesehatan
F	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																										
		1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	100%	133.632.347	0%	199.101.046	100%	18.999.900	0%	-	0%		0%		0%		0%		-	0%	199.101.046	0%	1.495273967	Dinas Kesehatan
III	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																										
10	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota																										
		1	02	03	2.02	02	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Freyanes)	100%	1.000.490.000	100%	39.800.152	100%	18.046.283	0%	0	0%		0%		0%		0%		-	50%	39.809.152	0.5	0.039791632	Dinas Kesehatan
11	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota																										
		1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100%	177.650.031	100%	705.810.694	100%	553.964.103	0%	-	0%		0%		0%		0%		-	50%	705.810.694	50%	3.972249805	Dinas Kesehatan
IV	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																										
12	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																										

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Dari tabel di atas terdapat beberapa program/kegiatan yang memenuhi target dan tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program kegiatan tersebut adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala sehingga banyak penderita Hipertensi yang belum terdiagnosis
2. Belum optimalnya skrining dan surveilans pada ibu hamil, bersalin dan bayi serta anak dan juga terkait dengan gizi di Masyarakat
3. Pemeriksaan ibu hamil oleh dokter pada kunjungan pertama dan kelima di Puskesmas belum optimal
4. Tingginya mobilitas penduduk dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta/peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit baik itu wabah, dan penyakit tidak menular
5. Belum optimalnya surveilans terhadap penyakit menular dan sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit
6. Masih banyak ibu bersalin yang tidak bersedia bayinya dilakukan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)
7. Belum optimalnya ketersediaan data yang *realible* dan valid untuk menggambarkan kondisi dari tingkat kesakitan dari penyakit menular
8. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk mendukung akreditasi dan re-akreditasi fasilitas kesehatan tingkat dasar dan rujukan serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
9. Kurangnya minat ibu yang mempunyai balita untuk membawa anaknya ke Posyandu karena tidak ada lagi PMT Penyuluhan di Posyandu
10. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam upaya penanggulangan masalah gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, imunisasi, dan surveilans.
11. Pelayanan pemeriksaan kesehatan anak sekolah tidak maksimal karena terbatasnya tenaga kesehatan yang turun ke sekolah

Dipindai dengan CamScanner

12. Kurangnya minat masyarakat usia produktif untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan

Kebijakan tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Adanya dukungan anggaran terkait peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Adanya regulasi yang mendukung dalam penanggulangan gizi (stunting)
3. Adanya dukungan anggaran dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit penyakit menular dan tidak menular
4. Adanya regulasi yang mendukung penanganan penyakit dan wabah
5. Pengoptimalkan sistem informasi pelaporan digital dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk penyakit menular dan tidak menular
6. Ada dukungan anggaran dari dana APBD kabupaten dan APBD provinsi serta APBN untuk memenuhi program kegiatan prioritas lainnya
7. Adanya koordinasi dari lintas sektor dan lintas program untuk mendukung pembangunan kesehatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Mengacu terhadap Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dilakukan restrukturisasi organisasi dengan mengintegrasikan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dinas kesehatan adalah tipe A yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai Tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesehatan, yaitu :

Tugas:

Dinas kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesehatan, meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Dipindai dengan CamScanner

Fungsi:

a. Menyelanggarakan pelayanan kesehatan masyarakat;
b. Menyelenggarakan pembinaan kesehatan masyarakat;
c. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
d. Mengadakan pengadaan, pendistribusian, pengawasan obat dan makanan;
e. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan;
g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan di bidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat;
   2. Subbagian Program, Keuangan dan Pengelolaan Aset;
   3. Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
   1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
   2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
   3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
   1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
   2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
   3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan dari :
   1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

Dipindai dengan CamScanner

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah tak bisa lepas dari isu-isu penting terutama dalam bidang kesehatan, baik lokal, nasional maupun global. Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Penempatan tenaga kesehatan di Puskesmas belum merata sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM)
3. Sarana, prasarana, dan alat kesehatan belum memadai dan belum merata
4. Masih tingginya persentase gizi buruk
5. Belum optimalnya skrining dan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular

Setelah menemukan permasalahan dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka akan dilihat juga permasalahan atau isu-isu strategis secara luas yaitu isu internasional, nasional, regional maupun isu lainnya yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong atau menghambat dalam pelayanan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan kesehatan merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan nasional. Berbagai program dan kegiatan strategis dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 3 menyatakan bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan

Sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah Periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Sasaran dari tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah:
   a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT
2. Sasaran dari tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah adalah:
   a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   b. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
3. Sasaran dari tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah adalah:
   a. Meningkatnya pendapatan masyarakat
   b. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja local
   c. Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
4. Sasaran dari tujuan meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan adalah:
   a. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah
   b. Meningkatnya kualitas keparawisataan daerah dan ekonomi kreatif
   c. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata
   d. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan sasaran berdasarkan tujuannya, yaitu:

1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan Masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana tahun 2025								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	09			DINAS KESEHATAN																	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
1	02	01	2.02		Administasi Keuangan Perangkat Daerah																	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dibayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	100%	935 Orang/bulan	935 Orang/bulan	100%	100%	81.549.334.850	81.549.334.550	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/ bulan	89.704.268.305
1	02	01	2.06		Administasi Umum Perangkat Daerah																	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Adanya peralatan & perlengkapan kantor, Bahan Logistik, Batang Cetakan & Penggandaan	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	90.000.000	49.999.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	54.999.900
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Adanya peralatan & perlengkapan kantor, Bahan Logistik, Batang Cetakan & Penggandaan	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	99.000.000	44.958.300	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.454.130
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Adanya peralatan & perlengkapan kantor, Bahan Logistik, Batang Cetakan & Penggandaan	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	4.594.431	1.850.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.755.200
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Adanya peralatan & perlengkapan kantor, Bahan Logistik, Batang Cetakan & Penggandaan	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	90.000.000	115.997.100	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	128.596.810
1	02	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Makroplaning Covid-19	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	50.000.000	110.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	121.000.000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat menyurat	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	5.000.000	2.497.320	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.747.052
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terbayarnya listrik, air, dan internet	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	239.000.000	238.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	261.800.200
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya surat menyurat, terbayarnya listrik, air, dan internet	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	90.000.000	87.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.700.000
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan	Kab. Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	90.000.000	51.469.200	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	56.616.120
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

Dipindai dengan CamScanner

1	02	01	2.09	0302	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan rehabilitasi puskesmas pembantu	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	10 Unit	10 Unit	100%	100%	99.000.000	445.997.991	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	472.897.791

Dipindai dengan CamScanner

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		
1	02	02	2.01		Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten Kota																		
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dikembangkan Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Dikembangkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Tersedianya Puskesmas yang Dikembangkan Sarana, Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Unit	1 Unit	100	100	30.973.953.500	15.076.977.202	DAU		Jumlah Puskesmas yang Dikembangkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	16.570.324.532
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	29 Unit	29 Unit	100	100	226.539.345	215.149.081	DAU		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	29 Unit	227.760.967
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai/Sarana	Jumlah Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	790 Unit	790 Unit	100	100	0	137.250.000	DAK NON FISIK		Jumlah Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar	1	144.749.000
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100	100	1.500.000.000	8.204.899.826	DAU,DAK NON FISIK		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1500000000	8.204.154.168
1	02	02	2.01	0029	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis Pakai, bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanana dan Minuman ke Puskesmas serta	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan,Obat, , Vaksin , Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	25 Paket	25 Paket	100	100	0	149.619.442	DAK NON FISIK		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanana dan Minuman ke Puskesmas serta	0	154.851.386
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
1	02	02	2.02	0001	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	9.755 orang	9580 orang	100	100	230.000.000	2.309.995.500	DAU,DAK NON FISIK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9758 Orang	2.757.595.500
1	02	02	2.02	0002	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	9.315 Orang	9144 orang	100	100	230.000.000	15.592.100	DAU		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9315 Orang	17.151.310
1	02	02	2.02	0003	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	8.871 Orang	8709 orang	100	100	230.000.000	20.866.200	DAU		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8871 Orang	73.004.870
1	02	02	2.02	0004	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0%	41.953 Orang	0%	100	0	230.000.000	0	0		Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	0
1	02	02	2.02	0005	Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	61.062 Orang	95042 orang	100	100	230.000.000	578.234.800	DAU,DAK NON FISIK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.062 Orang	635.858.280
				0006	Pengembangan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0%	241.509 Orang	0%	100	0	230.000.000	0			Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang mendapatkan Pelayanan	0	0

Dipindai dengan CamScanner

1	02	02	2.02	0207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	100%	42.958 Orang	36434 orang	100	100	230.000.000	230.114.200	DAU/DAK NON FISIK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	42.958 Orang	318.756.170
1	02	02	2.02	0208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	86.710 Orang	86675 orang	100	100	230.000.000	23.103.542	DAU		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21940 Orang	29.414.608
1	02	02	2.02	0209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4.765 Orang	4654 orang	100	100	230.000.000	12.868.530	DAU		Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4723 Orang	14.171.305
1	02	02	2.02	0210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	586 Orang	576 orang	100	100	230.000.000	344.537.180	DAU/DAK NON FISIK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	576 Orang	378.990.898
1	02	02	2.02	0211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	9.958 Orang	8570 orang	100	100	230.000.000	576.842.890	DAU/DAK NON FISIK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8213 Orang	744.537.135
1	02	02	2.02	0212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12.609 Orang	10658 orang	100	100	200.000.000	17.592.513	DAU		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6135 Orang	19.351.767
1	02	02	2.02	0214	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	200.000.000	10.502.050	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	11.552.255
1	02	02	2.02	0215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	300.000.000	7.057.740.000	DAU/DAK NON FISIK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	7.763.514.000
1	02	02	2.02	0216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	80%	80%	200.000.000	156.136.513	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	173.349.064
1	02	02	2.02	0217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungann	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab Tapanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	80%	80%	200.000.000	556.705.116	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungann	1 Dokumen	623.375.528

Dipindai dengan CamScanner

1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	50%	210.000.000	95.053.439	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	104.536.783
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	50%	200.000.000	17.999.836	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	19.799.822
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	50%	50%	200.000.000	619.635.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	671.626.500
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	32523 orang	32523 orang	50%	50%	0	256.627.400	DAU, DAK NON FISIK		Jumlah Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	32523 orang	281.190.140
				0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0%	11.000	0%	50%	0%	200.000.000	0	DAU, DAK NON FISIK		Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0%	0
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	200.000.000	21.449.622	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	23.594.604
1	02	02	2.02	0026	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tingkat Kesehatan Masyarakat semakin meningkat	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	50%	35.751.447.000	2.727.039.558	DAU/DAK FISIK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	2.999.743.554
1	02	02	2.02	0028	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Sosialisasi dan Advokasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta tercapainya Sosialisasi Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	50%	36.228.849.108	48.907.979.582	DAU/PAJAK ROKOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	53.798.777.951
1	02	02	2.02	029	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Paket	7 Dokumen	100%	100%	100.000.000	39.308.000	DAK NON FISIK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	7 Dokumen	39.928.000
1	02	02	2.02	0030	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Vaksinasi di Faskes	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	6.667.536.700	10.954.036.552	DAU/DAK FISIK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	12.949.432.652
1	02	02	2.02	031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	0	47.863.192	DAK FISIK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	47.863.192

Dipindai dengan CamScanner

1	02	03	2.01		Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1	02	03	2.01	03**	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmal. Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	50 Orang	50 Orang	98%	98%	400.000.000	400.000.000	DAU-DBHCHT	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	1.549.350.519
1	02	04			PROGRAM PENGADAAN, PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT, VAKSIN, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																	
	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
1	02	04	2.01	03**	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Tasikmal. Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	300.000.000	73.901.787	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	81.291.975
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga																	
1	02	04	2.03	03**	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Tasikmal. Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	200.000.000	15.126.048	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	16.639.253
1	02	04	2.05		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																	
1	02	04	2.05	03**	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Tasikmal. Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	0%	64 Unit %	0	100%	0%	200.000.000,00	0	0	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Bermerk yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0%	0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1	02	05	2.01	03**	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat BOK Puskesmas	Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Tersedianya Dana untuk	Kab. Tasikmal. Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	250.000.000	60.965.333	DAU-HIBAH	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan	1 Dokumen	67.054.666
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1	02	05	2.02	03**	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Tasikmal. Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	200.000.000	12.141.756	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	13.311.932

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentnag Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS KESEHATAN
Jalan Raja Junjungan Lubis, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611
Telepon / Faksimile (0631) 371248

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR: / /SK/V/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu dilakukan terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dipindai dengan CamScanner

Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan semua upaya yang kita kerjakan selalu mendapat rahmat, hidayah dan ridho Allah SWT.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dr. ERWIN H HARAHAP, S.STP, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19761208 199602 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja kolektif serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 telah disusun dengan tujuan memberikan gambaran,perubahan, kebijakan, program, kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi rencana kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan isi rancangan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah dibidang kesehatan secara luas, dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini disusun, kiranya setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya agar dapat memberikan dukungan sepenuhnya. Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, kami membutuhkan saran dari semua pihak untuk penyempurnaannya. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat dalam menyelenggarakan Pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

1	02	05	2.02		Pengembangan dan Penerapan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	02	05	2.02	002	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Penerapan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksanannya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber DAYA masyarakat (UKBM)	Kab Tasanuli Tengah Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[illegible]	[illegible]	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	200.990.000	93.154.139	TAHUN 2025	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	307.254.629
TOTAL																283.231.264.334	189.142.331.995				193.104.335.794

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan dalam Dinas	Jabatan
1	Nurlailan Batubara, S.Kep, M.Kep NIP. 19810717 200903 2 003	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Ketua
2	Abdul Karia Situmeang, S.I.P NIP. 19710512 200604 1 010	Penata Muda (III/a)	Analis Humas	Sekretaris
3	Helmira, SKM NIP. 19790518 200604 2 014	Penata Tk I (III/d)	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
4	Azmal Sihotang,SKM NIP. 19721218 199702 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5	Murni Ariani Harefa,SKM, M.K.M NIP. 19781223 200003 2 002	Penata Tk I (III/d)	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
6	Kristina Tambunan NIP. 19680214 199103 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
7	Roiman Sinaga, SE NIP. 19810801 201101 1 003	Penata Tk I (III/d)	Kasubbag Program, Keuangan, dan Pengelolaan Aset	Anggota
8	Pada Mulia Hasibuan, S.I.P NIP. 19750404 200701 1 006	Penata (III/c)	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

ERWIN H HARAHAP

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan menjadi Pedoman Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
pada tanggal :
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

ERWIN H HARAHAP

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Jl. N. Daulay Telp. (0631) 371978 Pandan 22611, Sumatera Utara

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN 2025

PANDAN – 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) unit kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun harus dibuat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah membuat Laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kepala Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang Pengawasan.

Harapan kami Laporan ini dapat memberikan gambaran sejauh mana kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta rencana kerja di Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih kurang sempurna dan belum dapat memuaskan, untuk itu kami mengharapkan saran ataupun masukan dari pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan ke depan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 20 Mei 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

MUS MULYADI MALAU, S.Sos. M.A.P
PEMBINA TK.I
NIP. 197326 199402 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Daftar Isi		Ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	5
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**.....	9
BAB IV	**PENUTUP**	21

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perubahan Perangkat Daerah (P Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Perubahan Rencana kerja tahunan ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Mencermati visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini disinerjikan dengan Program Kerja Pembinaan Pengawasan Tahunan (PKP2T) untuk terwujudnya tujuan pengawasan : "Menciptakan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel bebas dari korupsi dan mendorong Pimpinan SKPD meningkatkan Pengawasan Melekat pada unit kerja masing-masing, Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan 5 (lima) unsur :

1. Organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi kelembagaan
2. Adanya potensi sumber daya manusia pengawasan, sarana dan prasarana
3. Aspirasi dan komitmen semua aparatur
4. Azas kepemerintahan
5. Pentingnya alat pengukuran kinerja untuk pengembangan pelaksanaan tugas secara sistematis

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk penyusunan Perubahan Rencana kerja Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM)
16. Permendagri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan

17. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Propinsi Sumatera utara 2019-2023
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022
22. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
23. Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan ***Corona Virus Desease 2019*** di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/2020 Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Peyesuaian Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan ***Corona Virus Desease 2019*** (***COVID-19***) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapauli Tengah Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 .

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2025 yang dibiaya dengan P APBD Kabupaten Tahun 2025.
3. Agar seluruh jajaran aparatur di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB.II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB. IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Pencapaian sampai dengan Triwulan II sebagai dasar dalam menuangkan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Tahun 2025. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2025 dan Pencapaian sampai Triwulan kedua dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Anggaran definitif perkegiatan 10 juli 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 28 kegiatan dalam program ini untuk mewujudkan ketersediaan/kesiapan administrasi, yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp.4.909.500,- (90,9%) ; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 5.750.300,- (99,8%); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan realisasi sebesar Rp.2.509.000,- (92,5%); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 3.729.000,- (99,9%); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 3.312.000,-(96,3%); Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar dengan realisasi sebesar Rp.3.822.500,- (98 %); Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 4.123.000,- (98 %) dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan realisasi sebesar Rp.633.000- (19%);, Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan realisasi sebesar Rp.91.862.861,- (92%), Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan fungsi dengan realisasi sebesar Rp.207.928.891,-(99,9%) dan Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp.23.931.500,- (4 %): Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp.8.470.500,- (22%); Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi sebesar Rp.19.902.100,- (99,5%); penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor dengan realisasi sebesar Rp14.997.000,- (99%); penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi sebesar Rp.15.740.000,- (98%); penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi sebesar Rp.8.971.100,- (99,7%); Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp.3.360.000,- (67,3 %) ; Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan

realisasi sebesar Rp.119.677.847,- (97%); Pengadaan Mebel dengan realisasi sebesar Rp 0,- (0%); Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp. 176.545.500,- (71 %); Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0 %); Pengadaan Surat Menyurat realisasi sebesar Rp.9.847.000,- (99%); Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi sebesar Rp.70.914.537,- (89%); Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar Rp.8.841.500,- (98%).; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi sebesar Rp.78.352.200,- (82%); Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan dengan realisasi sebesar Rp.126.499.524,- (97%); Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp.19.804.000,- (99%);, Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp.20.000.000,- (100%).

Pencapaian tujuan program tersebut sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat kepada masyarakat.

Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Jumlah penggandaan / fotocopi dokumen maupun persuratan cenderung meningkat
- Seiring dengan meningkatnya frekuensi kegiatan dan permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi, diperlukan sarana kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaporan untuk mendukung kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
- masih kurangnya SDM aparatur Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Solusi :

- Penyimpanan arsip dalam bentuk digital/softcopy, dan pencetakan baru dilakukan bila benar-benar diperlukan. Penggandaan dokumen sesuai kebutuhan.
- Pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua.
- Agar meningkatkan kualitas SDM aparatur tentang pengawasan.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat melalui 2 Sub kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Pengawasan Internal melalui kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp.257.374.800,- (60%), Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah dengan realisasi sebesar Rp.86.039.000,- (94%), Reviu Laporan Kinerja dengan realisasi sebesar Rp.96.735.500,- (67%), Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp. 113.943.100,- (80%) Pengawasan Dana Desa dengan realisasi Rp.148.079.500,- (100%), Kerjasama Pengawasan Internal dengan realisasi sebesar Rp.21.646.000,- (34%), Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP dengan realisasi sebesar Rp.39.373.573,- (37 %) .

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu melalui kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dengan realisasi sebesar Rp.47.251.500,-, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan realisasi sebesar Rp.403.599.000,- (90%).

Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan standart Audit.

Solusi :

- Agar memberikan Sosialisasi dan konsultasi kepada OPD Terkait.

3. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan Pengawasan Inspektorat melalui 2 Sub kegiatan yaitu : Perumusan kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dengan realisasi sebesar Rp.119.270.593,- (73%), Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan realisasi sebesar Rp.4.034.000,- (45%), Pendampingan Asistensi dengan realisasi sebesar Rp.203.721.090,- (60%).

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Inspektorat melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Daerah . Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka rencana Program dan kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun Rencana Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 28 kegiatan dalam program ini untuk mewujudkan ketersediaan/kesiapan administrasi dengan kegiatan sebagai berikut :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
- Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat daerah

- Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Kegiatan Siosialisasi Peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- KegiatanPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

- Kegiatan Mebel
- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya
- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan
- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Reviu Laporan kinerja
- Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- Kegiatan Pengawasan Dana Desa
- Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan sebagai berikut :

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang pengawasan
- Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahann dan Pemberantasan Korupsi (MCP) KORSUPGAHB KPK
- Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2025 ini mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2029 yang saat ini akan disusun dan berisi program dan kegiatan tahun 2025 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal Inspektorat yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personil di Inspektorat yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan. Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah secara intensif.

Pandan, Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN TAPANULI TENGAH

MUS MULYADI MALAU, S.Sos. M.A.P
PEMBINA TK.I
NIP. 19730326 199402 1 001

Dipindai dengan CamScanner

6	01	03	2.0	01			Meningkatkan		Terlaksananya		Tersusunnya data		Kab. Tapanuli Tengah, Pandan,		100 Persen		100 Persen		1 Dok		1 Dok		1 Dok		199,999,929		162,850,984		Dana Transfer Umum-			Tersusunnya data kebijakan sistem		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025

Unit Organisasi:
Sub Unit Oraganisasi:

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																			
6	01				URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												8,671,871,690	7,980,846,684					
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												69,997,599	28,666,416					
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja dan P Renja	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	9,999,768	4,911,417	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen		
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya RKA	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	9,999,657	5,756,904	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen		
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya RKA Perubahan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	9,999,546	2,709,732	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen		
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya DPA	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	9,999,990	3,731,154	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen		
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya DPA Perubahan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	9,999,879	3,436,338	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen		
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Lakip, Perjanjian Kinerja, IKU	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	9,999,546	3,909,864	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen		

6	01	03	2.0	01		Meningkatkan	Terlaksananya	Tersusunnya data	Kab. Tapanuli	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	199,999,929	162,850,984	Dana Transfer		Tersusunnya data kebijakan sistem	
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	9,999,213	4,211,007	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,420,325,902**	**4,723,853,755**				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung Peningkatan Kinerja Aparatur	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4,415,325,960	4,720,544,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung Peningkatan Kinerja Aparatur	100 Persen
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mendukung Peningkatan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	Terselenggaranya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Pelaporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4,999,942	3,309,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Pelaporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**846,927,152**	**357,146,963**				
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Meningkatkan Pengetahuan Kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya jumlah Paket Pakaian	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	99,940,204	99,940,204				
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Pengetahuan Kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk aparatur Inspektorat	Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Inspektorat	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	667,000,000	208,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Inspektorat	100 Persen
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Inspektorat	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	59,999,718	30,812,379	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Inspektorat	100 Persen
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Pengetahuan Kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya Birntek/Workshop/ Diklat Inspektorat	Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Inspektorat	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	19,987,230	18,394,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Inspektorat	100 Persen
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**313,996,363**	**188,903,670**				
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	19,999,647	19,999,647	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pelayanan Perkantoran	100 Persen
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	29 jenis	29 jenis	29 jenis	29 jenis	19,999,536	15,155,052	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Makanan/Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan/Minuman,	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	19,997,760	15,999,318	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi kantor	Terselenggranya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	19,999,980	9,000,213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatkan Pelayanan Administrasi kantor	100 Persen

6	01	03	2.0	01		Meningkatkan Pemahaman	Terlaksananya	Tersusunnya data kebijakan sistem	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan,	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	199,999,929	162,850,984	Dana Transfer		Tersusunnya data kebijakan sistem	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi kantor	Terselenggranya administrasi perkantoran	Tersedianya Bahan Bacaan koran dan majalah	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	16 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	4,999,440	4,999,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi kantor	100 Persen
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Penyelenggaraan koordinasidan konsultasi	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi perkantoran	Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Dalam Kota dan Luar Daerah	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 SPT	100 SPT	100 SPT	100 SPT	229,000,000	123,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatkan Penyelenggaraan koordinasidan konsultasi	100 Persen
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**368,688,776**	**368,688,776**				
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor	Tersedianya Mebeluer	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	Kursi, Meja, Lemari	Kursi, Meja, Lemari	Kursi, Meja, Lemari	Kursi, Meja, Lemari	39,876,917	39,876,917	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100 Persen
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	Laptop, TV,Printer	Laptop, TV,Printer	Laptop, TV,Printer	Laptop, TV,Printer	249,743,784	249,743,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100 Persen
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	AC, Meter, Horden	AC, Meter, Horden	AC, Meter, Horden	AC, Meter, Horden	79,068,075	79,068,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100 Persen
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**198,029,904**	**194,031,906**				
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Materai	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	300 Lembar	300 Lembar	300 Lembar	300 Lembar	9,989,200	9,989,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatnya Pelayanan Kantor	100 Persen
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatnya Pelayanan Kantor	100 Persen
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	16 Jenis	13,041,390	9,043,392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Meningkatnya Pelayanan Kantor	100 Persen
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Alat/Bahan Kebersihan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	94,999,314	94,999,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Kantor	100 Persen
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**169,908,060**	**169,908,060**				
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Mendukung Operasional Kedinasan	Meningkatnya pelayanan operasional kedinasan	Tersedianya BBM, Oli dan Pajak Kenderaan Dinas dan Pemeliharaan Kenderaan Dinas	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	3 Unit Mobil, 12 unit sepeda motor	3 Unit Mobil, 12 unit sepeda motor	3 Unit Mobil, 12 unit sepeda motor	3 Unit Mobil, 12 unit sepeda motor	129,908,060	129,908,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya BBM, Oli dan Pajak Kenderaan Dinas dan Pemeliharaan Kenderaan Dinas	100 Persen
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung Operasional Kedinasan	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpeliharanya Gedung Kantor	100 Persen

									Ikebijakan sistem	Tengah, Pandan,										Transfer Umum-		kebijakan sistem	
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana da Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung Operasional Kedinasan	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Gedung Kantor	100 Persen
6	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**																		
6	01	02	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**1,209,999,082**	**1,126,302,906**				
6	01	02	2.01	01	**Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**	**Meningkatkan Pengawasan secara Internal dan Eksternal**	Terlaksananya Pengawasan Internal	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat kepada OPD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	36 Dok	36 Dok	36 Dok	36 Dok	449,999,801	429,824,046	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat kepada OPD	100 Persen
6	01	02	2.01	02	**Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**	**Meningkatkan Pengawasan secara Internal dan Eksternal**	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	99,999,816	91,452,372	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	100 Persen
6	01	02	2.01	03	**Reviu Laporan Kinerja**	**Meningkatkan Pengawasan Reviu laporan Kinerja**	Terlaksananya Reviu laporan Kinerja	Tersedianya laporan Reviu Kinerja	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	68 Dok	68 Dok	68 Dok	68 Dok	149,999,767	144,611,161	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Laporan Hasil Reviu Pemeriksaan Inspektorat kepada OPD	100 Persen
6	01	02	2.01	04	**Reviu laporan keuangan**	**Meningkatkan Pengawasan Reviu laporan Keuangan**	Terlaksananya Reviu laporan Keuangan	Tersedianya laporan Reviu Keuangan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	149,999,988	142,584,744	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya Laporan Hasil Reviu Pemeriksaan Inspektorat kepada OPD	100 Persen
6	01	02	2.01	05	**Pengawasan Dana Desa**	Meningkatkan Pengawasan Dana Desa secara	Terlaksanaya Pengawasan Dana Desa	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	80 Dok	80 Dok	80 Dok	80 Dok	159,999,980	148,202,678	Dana Transfer Umum-		Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan	100 Persen
6	01	02	2.01	06	**Kerjasama Pengawasan Internal**	**Meningkatkan Pengawasan secara Internal dan Eksternal**	Terlaksaanya Kesepakatan pengawasan internal	Tersedianya laporan kesepakatan pengawasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	79,999,924	64,223,045	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Tersedianya laporan kesepakatan pengawasan	100 Persen
6	01	02	2.01	07	**Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**	**Meningkatkan Pengawasan secara Internal dan Eksternal**	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	119,999,806	105,404,860	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi	100 Persen
6	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**											**603,999,608**	**495,206,324**				
6	01	02	2.02	01	**Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah**	Meningkatkan Pengawasan secara Internal dan Eksternal	Terlaksananya Audit Investigasi	Tersedianya laporan Audit Investigasi	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	53,999,880	48,600,507	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Tersedianya laporan Audit Investigasi	100 Persen
6	01	02	2.02	02	**Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Meningkatkan Pengawasan secara Internal dan Eksternal	Tersedianya laporan pengawasan bidang perijinan	Tersedianya laporan pengawasan bidang perijinan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	549,999,728	446,605,817	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Tersedianya laporan pengawasan bidang perijinan	100 Persen
6	01	03			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**																
6	01	03	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**											**209,999,757**	**171,851,368**				

6	01	03	2.01	01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**	Meningkatkan Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP	Tersusunnya data kebijakan sistem dan prosodur pengawasan SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen							Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		kebijakan sistem dan prosedur pengawasan SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP	100 Persen
6	01	03	2.01	02	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Fasilitasi Pengawasan**	Meningkatkan Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya koordinasi LHKPN dan LHKASN	Tersedianya laporan Koordinasi LHKPN dan LHKASN	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	9,999,828	9,000,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya laporan Koordinasi LHKPN dan LHKASN	100 Persen
6	01	03	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**											**259,999,487**	**156,286,540**				
6	01	03	2.02	01	**Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatkan Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	79,999,879	41,009,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	100 Persen
6	01	03	2.02	02	**Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi**	Meningkatkan Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	49,999,877	35,001,214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	100 Persen
6	01	03	2.02	03	**Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCP) KORSUPGAH KPK**	Meningkatkan Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	79,999,854	48,521,797	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	100 Persen
6	01	03	2.02	04	**Pendampingan Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas**	Meningkatkan Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	49,999,877	31,753,989	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	100 Persen

Pandan, 20 Mei 2025

INSPEKTUR KABUPATEN TAPANULI TENGAH

MUS MULYADI MALAU,S.Sos, M.A.P.
PEMBINA TK.I
NIP. 19730326 199402 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
JL. N. Daulay No. 5 Pandan Telp. (0631) 372359 , Pandan 22611, Sumatera Utara

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
JL. N. Daulay No, 5 Pandan (0631) 372359 – Pandan 22611

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. N. Daulay No.5 Telp. : (0631) 372359
P A N D A N - 22611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 2550/DPPKB/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2022, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008,tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025;

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM
PENATA TK. I
NIP. 19840218 200502 2 001

Tembusan :
1. Bapak Bupati Tapanuli Tengah
2. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Pertinggal

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor : **2550/DPPKB/V/2025**
Tanggal : Mei 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Anggaran 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan dalam Dinas	Jabatan
1	Sondang Rosmauli Malau, A.Md NIP. 19840218 200502 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Plt. Kepala Dinas	Ketua
2	Efvi Ulina Sirait, SKM NIP. 19870609 201001 2 022	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3	Maafdi Hasiholan Saragih, SKM NIP. 19830417 201001 1 019	Penata (III/c)	Kasubbag Keuangan dan Sarana	Anggota
4	Roslinawati Sianipar, SKM NIP. 19800724 200312 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Keluarga Berencana	Anggota
5	Tirzah Manalu, SE NIP. 19731128 200312 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Penyuluhan dan Penggerakan	Anggota
6	Halimah Nurlillah Sormin, SKM.,MKM NIP. 19790529 199803 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM
PENATA TK. I
NIP. 19840218 200502 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P- Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA-P merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RENJA.

Dalam penyusunan P-RENJA Tahun 2025, dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada dua triwulan sebelumnya, pencapaian target RENSTRA OPD.

Dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Program maupun Kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura,Sarana Prasaran Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, **20 Mei** 2025

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM
PENATA TK. I
NIP. 19840218 200502 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I **PENDAHULUAN** 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025** 7

BAB III **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**..... 8

BAB V **PENUTUP** 9

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025

TABEL 3.1 Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan Pada Rencana Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan Tahun 2025 (Form 1)

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu:1. Penduduk tidak hanya di perlakukan sebagai Objek tetapi juga Subjek pembangunan. 2. Ketika Penduduk memiliki peran sebagai subjek pembangunan.maka di perlukan upaya perdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan Sumber daya manusia yang berkualitas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini ditunjukkan oleh terbentuknya Kampung KB yang merupakan wujud dan peran serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita.

Kegiatan ini merupakan Perwujudan CITA ke -3, ke – 5 dan ke- 8, serta mencapai target atau sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 yakni :

“MEMBANGUN TAPANULI TENGAH ADIL UNTUK SEMUA, LESTARI, DAN BERKEADABAN”

Peran serta Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Pendudukmenjadi salah satu pilar Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah,sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mendukungnya dengan menitik beratkan pada pencapaian Misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yakni, **“ Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang bermutu bagi masyarakat”.**

Tujuan Pengendalian Penduduk sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2023-2026 adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dengan Sasaran : Terlaksananya Pelayanan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I serta Terlayaninya PUS untuk menjadi peserta KB Baru dan Aktif.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan P-RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RENJA (Rancangan Akhir). Dalam penyusunan P-RENJA dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan berjalan.

Dokumen P-Renja OPD Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006–2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020.
21. Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
22. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
24. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
31. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006–2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;
40. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

1. Mengevaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II berjalan berdasarkan pencapaian target RENJA Perangkat Daerah, usulan masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif, yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan RENJA-P Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini adalah :

1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

d. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Dokumen Renja-P

BAB II. EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan II Tahun 2025 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Daerah merupakan Rancangan Perubahan Renja OPD, terdiri dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Lokasi Kegiatan dan alasan perubahan, yang disajikan pada Tabel Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025.

BAB IV
PENUTUP

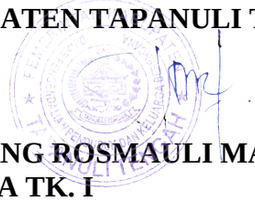
Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mendasarkan pada adanya evaluasi per triwulan yang telah dilaksanakan, serta adanya kondisi nasional yang mengharuskan perlunya dilakukan percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Dasar dalam melakukan Perubahan Renja TA.2025 tetap mengacu pada RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 sebagai acuan di tingkat vertikal, serta dokumen perencanaan ditingkat vertikal lainnya baik ditingkat provinsi maupun nasional, dengan berorientasi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya pada tahun anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM
PENATA TK. I
NIP. 19840218 200502 2 001

Laporan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah
Periode Pelaksanaan : TRIWULAN II 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		15 = 14/6 x 100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkanya kualitas sumber daya	2 08 2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOYTA																						
		2 14 1 02.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	13,470,001	98%	12,690,001	100%	2,500,000	0%	0	45%	1,120,500	0%	-	0%	-	45%	1,120,500	72%	13,810,501	72%	1.025278395	DPPKB
		2 14 1 02.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	4,480,000	0%	4,210,001	100%	1,500,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	DPPKB
		2 14 1 02.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaia Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	100%	8,990,001	98%	8,450,001	100%	2,500,000	0%	0	47%	1,177,500	0%	-	0%	-	47%	1,177,500	73%	9,627,501	73%	1.070912117	DPPKB
		2 14 1 02.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	100%	5,306,460,001	99%	4,718,420,001	100%	4,582,156,000	27%	1,227,515,534	54%	2,469,774,314	0%	-	0%	-	81%	3,697,289,848	90%	8,415,709,849	90%	1.585936735	DPPKB
		2 14 1 02.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	2,680,001	0%	2,510,001	100%	10,000,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	2,510,001	0%	0.936567188	DPPKB
		2 14 1 02.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	54,050,253	90%	50,929,366	100%	50,000,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	45%	50,929,366	45%	0.94225953	DPPKB
		2 14 1 02.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	100%	34,180,000	99%	32,240,000	100%	15,000,000	18%	2,712,000	45%	6,780,000	0%	-	0%	-	63%	9,492,000	81%	41,732,000	81%	1.220947923	DPPKB
		2 14 1 02.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	8,990,001	60%	8,450,001	60%	15,000,000	11%	1,590,000	23%	3,447,500	0%	-	0%	-	34%	5,037,500	47%	13,487,501	47%	1.500278031	DPPKB
		2 14 1 02.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	100%	198,160,000	85%	186,700,001	100%	100,000,000	17%	17,419,300	39%	38,763,944	0%	-	0%		56%	56,183,244	70%	242,883,245	70%	1.225692597	DPPKB
		2 14 1 02.07 11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	0	0%	-	100%	35,000,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	#DIV/0!	DPPKB
		2 14 1 02.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	3,570,000	100%	3,370,001	100%	3,000,000	0%	0	33%	1,000,000	0%	-	0%	-	33%	1,000,000	67%	4,370,001	67%	1.224089916	DPPKB
		2 14 1 02.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	90,040,001	88%	84,850,001	100%	90,000,000	16%	14,491,031	33%	29,486,877	0%	-	0%	-	49%	43,977,908	69%	128,827,909	69%	1.430785291	DPPKB
		2 14 1 02.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	44,990,000	96%	42,420,000	100%	10,000,000	20%	1,995,000	54%	5,445,000	0%	-	0%	-	74%	7,440,000	85%	49,860,000	85%	1.108246277	DPPKB
		2 14 1 02.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	139,570,001	90%	131,530,001	100%	95,302,000	10%	9,400,000	42%	40,434,400	0%	-	0%	-	52%	49,834,400	71%	181,364,401	71%	1.299451169	DPPKB
		2 14 1 02.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	100%	108,070,001	88%	101,830,000	100%	25,000,000	20%	5,120,000	54%	13,531,863	0%	-	0%	-	75%	18,651,863	81%	120,481,863	81%	1.114850207	DPPKB
		2 14 1 02.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	124,680,000	99%	84,850,001	100%	20,000,000	19%	3,775,000	46%	9,146,863	0%	-	0%	-	65%	12,921,863	82%	97,771,864	82%	0.784182419	DPPKB
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	10%	1,284,017,865	32%	2,620,108,761	0%	-	0%	-	42%	3,904,126,626					
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keluarga Berencana	2 08 2 08 01	Program Pengendalian Penduduk																						
		14 2 02.01 04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan		100%	-	0%	-	0%	54,562,264	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	DPPKB
		2 14 2 02.01 07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	100%	90,040,001	92%	84,850,001	100%	50,000,000	0%	0	30%	14,911,000	0%	-	0%	-	30%	14,911,000	61%	99,761,001	61%	1.107963126	DPPKB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	14	2	02.01	09	Advokasi,Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	100%	180,120,000	100%	169,740,000	100%	50,000,000	0%	0	0%	-	0%		0%		0%	0	0%	-	0%	0	DPPKB
		2	14	2	02.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan formal dan Non formal	100%	90,040,001	74%	169,740,000	100%	158,180,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	37%	169,740,000	37%	1.885162129	DPPKB
		2	14	2	02.01	23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana		100%	72,030,001	0%	67,860,000	100%	30,000,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	DPPKB
		2	14	2	02.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		100%	72,030,001	88%	-	100%	60,000,000	0%	0	26%	15,320,000	0%	-	0%	-	0%	15,320,000	0%	-	0%	0	DPPKB
		2	14	2	02.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga	100%	26,980,000	90%	25,430,000	100%	29,254,475	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	45%	25,430,000	45%	0.942550037	DPPKB
		2	14	2	02.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0%	0	0%	-	100%	173,400,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	DPPKB
		2	14	2	02.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	100%	139,570,001	28%	131,530,001	100%	888,000,000	0%	0	2%	16,104,000	0%	-	0%	-	0%	16,104,000	14%	147,634,001	14%	1.057777459	DPPKB
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0%	0	6%	46,335,000	0%	-	0%	-	3%	46,335,000					
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah						
3	Meningkatnya Kualitas	**2**	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**																							
		2	**14**	**3**	02.01	01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	100%	45,610,895	64%	42,781,897	100%	245,981,749	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	32%	42,781,897	32%	0.937975389	DPPKB
		2	14	3	02.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar	100%	44,990,000	92%	42,420,000	100%	125,000,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	46%	42,420,000	46%	0.942876195	DPPKB
		2	14	3	02.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga , Kependudukan , dan Keluarga Berencana)	100%	135,090,001	59%	127,280,000	100%	400,000,000	13%	51,984,000	20%	79,984,000	0%	-	0%	-	33%	131,968,000	46%	259,248,000	46%	1.919076157	DPPKB
		2	14	3	02.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan	100%	2,252,070,000	73%	2,122,020,001	100%	980,000,000	9%	83,952,000	22%	219,022,000	0%	-	0%	-	31%	302,974,000	52%	2,424,994,001	52%	1.07678447	DPPKB
		2	14	3	02.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Loakal	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	100%	90,040,001	100%	84,850,001	100%	50,000,000	0%	0	44%	22,140,300	0%		0%	-	44%	22,140,300	72%	106,990,301	72%	1.188252997	DPPKB
		2	14	3	02.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	1,351,230,000	91%	1,273,210,001	100%	845,600,000	0%	0	19%	158,800,000	0%	-	0%	-	19%	158,800,000	55%	1,432,010,001	55%	1.059782569	DPPKB
		2	14	3	02.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	100%	90,040,001	0%	84,850,001	100%	80,500,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	84,850,001	0%	0.942358952	DPPKB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	14	3	02.02	06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembanagan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	100%	3,783,500,001	91%	3,565,020,001	100%	2,060,400,000	16%	330,000,000	40%	823,000,000	0%	-	0%	-	56%	1,153,000,000	74%	4,718,020,001	74%	1.246998811	DPPKB
		2	14	3	02.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	100%	60,030,000	93%	59,400,001	100%	33,191,000	0%	0	47%	15,614,000	0%	-	0%	-	47%	15,614,000	70%	75,014,001	70%	1.249608546	DPPKB
		2	14	3	02.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	100%	1,351,230,000	0%	1,273,210,001	100%	1,487,363,000	0%	0	20%	292,167,000	0%	-	0%	-	20%	292,167,000	10%	1,565,377,001	10%	1.158483013	DPPKB
		2	14	3	02.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan	100%	0	0%	-	0%	30,000,000	16%	4,890,000	15%	4,560,000	0%	-	0%	-	0%	9,450,000	0%	9,450,000	0%	0	DPPKB
		2	14	3	02.04	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	33,940,001	0%	-	100%	173,674,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	DPPKB
		2	14	3	02.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	100%	26,980,000	77%	25,430,000	100%	30,150,000	20%	5,995,000	43%	12,965,000	0%	-	0%	-	63%	18,960,000	70%	44,390,000	70%	1.645292809	DPPKB
		2	14	3	02.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	100%	135,090,001	92%	127,280,000	100%	90,000,000	0%	0	27%	24,463,000	0%	-	0%	-	27%	24,463,000	60%	151,743,000	60%	1.123273365	DPPKB
		2	14	3	02.04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100%	0	91%	-	0%	599,500,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	46%	-	46%	#DIV/0!	DPPKB
		2	14	3	02.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100%	90,081,000	100%	848,790,000	100%	313,600,000	12%	38,640,000	25%	77,280,000	0%	-	0%	-	37%	115,920,000	68%	964,710,000	68%	10.70936157	DPPKB
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		5%	515,461,000	19%	1,729,995,300	0%	-	0%	-	22%	2,245,456,300				
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah				
4	**Meningkatnya Kualitas**	**2**	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**																						
		2	14	4	02.01	15	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL		100%	-	0%	-	0%	100,000,000	0%	0	8%	8,016,000	0%	-	0%	-	0%	8,016,000	0%	0	0%	0	DPPKB
		2	14	4	02.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	-	100%	-	0%	192,000,000	10%	19,600,000	14%	27,600,000	0%	-	0%	-	0%	47,200,000	0%	239,200,000	0%	0	DPPKB
		2	14	4	02.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		100%	315,250,001	0%	-	100%	845,400,000	0%	0	0%	-	0%		0%		0%	0	0%	845,400,000	0%	0	DPPKB
		2	14	4	02.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	100%	900,810,000	78%	848,790,000	100%	130,000,000	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	39%	130,000,000	39%	0.144314561	DPPKB
		2	14	4	02.02	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	90,913,244	95%	85,719,459	100%	46,464,619	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	48%	46,464,619	48%	0.51108746	DPPKB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		15 = 14/6 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	14	4	02.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	135,090,001	0%	127,280,000	100%	83,174,181	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	83,174,181	0%	0.615694577	DPPKB
							Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting ((termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/	100%	0	0%	-	0%	837,000,000	0%	0	29%	246,300,000	0%		0%		29%	246,300,000	15%	1,083,300,000	15%	0	DPPKB
							Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita) yang	100%	0	0%	-	0%	1,001,400,000	0%	0	30%	295,560,000	0%		0%		30%	295,560,000	15%	1,296,960,000	15%	0	DPPKB
								Rata-rata Capaian Kinerja (%)							1%	19,600,000	10%	577,476,000	0%	-	0%	-	10%	597,076,000				
								Predikat Kinerja							Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah					

Pandan, Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TAPANULI TENGAH

SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM
PEMBINA TK. I
NIP. 19840218 200502 2 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**17.352.748.720,96**	**17.330.753.288,00**	**17.134.757.114,00**	**-217.991.606,96**							**22.661.250.266,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.352.748.720,96**	**17.330.753.288,00**	**17.134.757.114,00**	**-217.991.606,96**							**22.661.250.266,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**17.352.748.720,96**	**17.330.753.288,00**	**17.134.757.114,00**	**-217.991.606,96**							**22.661.250.266,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD**				**85 %**	**85 %**	**5.056.964.800,00**	**5.056.958.000,00**	**5.105.436.367,00**	**48.471.567,00**					**Pegawai Dinas PPKB**		**6.430.700.260,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.500.000,00	6.500.000,00	3.072.957,00	-3.427.043,00							26.940.002,00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.633.660,00	-866.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			13.470.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*				0 0	0 0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.480.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	1.439.297,00	-1.060.703,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.990.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.582.156.000,00	4.582.156.000,00	4.630.310.610,00	48.154.610,00							5.306.460.001,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4.582.156.000,00	4.582.156.000,00	4.630.310.610,00	48.154.610,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.306.460.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	8.759.293,00	8.759.293,00							9.000.000,00	
	2.14.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.759.293,00	8.759.293,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			9.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	190.000.000,00	190.000.000,00	174.791.507,00	-15.208.493,00							315.380.254,00	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	36.407.667,00	-13.592.333,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			54.050.253,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				0 0	0 0	15.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	13.383.840,00	-1.616.160,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.990.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			198.160.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00							240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	198.308.800,00	198.302.000,00	185.502.000,00	-12.806.800,00							278.170.002,00	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.570.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	75.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.040.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			44.990.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	95.308.800,00	95.302.000,00	95.502.000,00	193.200,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			139.570.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	68.000.000,00	23.000.000,00							254.750.001,00	
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			108.070.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	3 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			124.680.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	5 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	3 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk**				**1,46 %**	**1,46 %**	**1.433.396.739,96**	**1.493.396.739,00**	**1.270.007.587,00**	**-163.389.152,96**					**Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI, SLTP/MTS, SMA/SMK sederajat**		**1.247.180.002,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (Dengan Satuan:Sektor)				5 Sektor	5 Sektor	342.742.264,00	342.742.264,00	148.334.232,00	-194.408.032,00							540.200.002,00	
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	*Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan*				1 Dokumen	1 Dokumen	54.562.264,00	54.562.264,00	0,00	-54.562.264,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			60.040.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota*				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	33.628.863,00	-16.371.137,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			60.040.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal*				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	23.290.110,00	-26.709.890,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			180.120.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	*Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal*				10 Kegiatan	10 Kegiatan	158.180.000,00	158.180.000,00	78.635.059,00	-79.544.941,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	12.780.200,00	-17.219.800,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (Dengan Satuan:Tahun)				21.41 Tahun	21.41 Tahun	1.090.654.475,96	1.150.654.475,00	1.121.673.355,00	31.018.879,04							706.980.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*				-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*				1 Laporan	1 Laporan	173.400.000,00	173.400.000,00	173.400.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*				12 Dokumen	12 Dokumen	888.000.000,00	888.000.000,00	888.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	*Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*				1 Dokumen	1 Dokumen	29.254.475,96	29.254.475,00	10.273.355,00	-18.981.120,96	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			26.980.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Kelahiran Total**				**1,91 orang**	**1,91 orang**	**8.660.813.000,00**	**7.544.959.749,00**	**7.392.274.071,00**	**-1.268.538.929,00**					**Fasilitas Kesehatan, jaringan dan Jejaringnya Kampung KB Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan PUS, Kelompok Tribina, Mitra Kerja dan Stakeholders**		**11.430.370.004,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	2.057.000.000,00	1.800.981.749,00	1.780.778.000,00	-276.222.000,00							3.155.140.001,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			63.030.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				20 Laporan	20 Laporan	1.172.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00	-192.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			2.252.070.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan*				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.778.000,00	-24.222.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			90.040.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*				215 Organisasi	215 Organisasi	250.000.000,00	245.981.749,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Dengan Satuan:Jumlah PKB/PLKB)				290 PKB/PLKB	290 PKB/PLKB	3.860.900.000,00	2.986.500.000,00	2.928.968.071,00	-931.931.929,00							3.890.040.001,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*				1021 Orang	1021 Orang	1.720.000.000,00	845.600.000,00	845.600.000,00	-874.400.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*				250 Organisasi	250 Organisasi	80.500.000,00	80.500.000,00	57.619.804,00	-22.880.196,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			90.040.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)*				12 Laporan	12 Laporan	2.060.400.000,00	2.060.400.000,00	2.025.748.267,00	-34.651.733,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			3.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.739.813.000,00	1.754.378.000,00	1.739.378.000,00	-435.000,00							3.655.010.000,00	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				4 Laporan	4 Laporan	33.300.000,00	33.191.000,00	33.191.000,00	-109.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			63.030.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*				3250 Orang	3250 Orang	1.487.363.000,00	1.487.363.000,00	1.487.363.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*				20 Unit	20 Unit	159.000.000,00	173.674.000,00	173.674.000,00	14.674.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				43 Laporan	43 Laporan	30.150.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			56.980.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	1.003.100.000,00	1.003.100.000,00	943.150.000,00	-59.950.000,00							730.180.002,00	
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				5 Organisasi	5 Organisasi	90.000.000,00	90.000.000,00	30.050.000,00	-59.950.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			135.090.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*				38 Dokumen	38 Dokumen	599.500.000,00	0,00	0,00	-599.500.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			135.090.001,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*				-	109 Unit	0,00	599.500.000,00	599.500.000,00	599.500.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				38 Kampung	38 Kampung	313.600.000,00	313.600.000,00	313.600.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			460.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**2.201.574.181,00**	**3.235.438.800,00**	**3.367.039.089,00**	**1.165.464.908,00**					**Kelompok Beresiko Stunting PUS, Kelompok Tribina, Mitra Kerja dan Stakeholders**		**3.553.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	363.174.181,00	1.397.038.800,00	1.531.184.473,00	1.168.010.292,00							1.807.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	*Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia*				5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.833.157,00	-69.166.843,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*				20 Laporan / Dokumen	20 Laporan / Dokumen	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*				-	215 Laporan	0,00	845.400.000,00	845.400.000,00	845.400.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*				10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*				300 Orang	300 Orang	83.174.181,00	83.174.181,00	199.770.790,00	116.596.609,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)*				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	46.464.619,00	133.180.526,00	83.180.526,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	1.838.400.000,00	1.838.400.000,00	1.835.854.616,00	-2.545.384,00							1.746.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*				12 laporan	12 laporan	837.000.000,00	837.000.000,00	835.956.790,00	-1.043.210,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			840.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*				12 laporan	12 laporan	1.001.400.000,00	1.001.400.000,00	999.897.826,00	-1.502.174,00	Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia			906.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								**17.352.748.720,96**	**17.330.753.288,00**	**17.134.757.114,00**	**-217.991.606,96**							**22.661.250.266,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

P-RENJA 2025

(PERUBAHAN RENCANA KERJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



JL. Dr. F. L. TOBING NO. 18
Pandan 22611

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan anugerahNya kami dapat menyelesaikan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD dan RENSTRA serta RENJA.

Dalam pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 dimaksud sangat diharapkan kepada OPD terkait yang menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 dapat menampung anggaran kegiatan yang disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025.

Demikianlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dan disampaikan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam P-APBD Tahun 2025. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 20 Mei 2025

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUDI JONIAR H. SIAHAAN, S.E., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19761124 200212 1 003

Dipindai dengan CamScanner

NO	RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**100%**		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**100%**		-		Badan Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%		-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	750,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	750,000,000	-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	7,500,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	7,500,000	-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,000,000	-		Badan Kesbangpol
TOTAL				**4,392,061,200**				**4,792,061,200**	**400,000,000**		

NO	RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban**	**100%**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban**	**100%**		-		Badan Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	100%		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	100%		-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	70,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	70,000,000	-		Badan Kesbangpol
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	400,000,000	400,000,000		Badan Kesbangpol

NO	RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	**Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Nilai-Nilai Persatuan dan Kebangsaan**	**100%**		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Nilai-Nilai Persatuan dan Kebangsaan**	**100%**		-		Badan Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	100%		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	100%		-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	300 Orang	602,042,350	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	300 Orang	602,042,350	-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1 Laporan	19,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1 Laporan	19,000,000	-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas	2 Kegiatan	277,799,900	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas	2 Kegiatan	277,799,900	-		Badan Kesbangpol

NO	RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	118,496,900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	118,496,900	-		Badan Kesbangpol
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100%		-		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	10 Unit	20,709,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	10 Unit	20,709,800	-		Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	**Persentase kualitas wawasan kebangsaan masyarakat akan nilai**	**100%**		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER**	**Persentase kualitas wawasan kebangsaan masyarakat akan nilai**	**100%**		-		Badan Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang	100%		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang	100%		-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 Orang	330,081,400	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 Orang	330,081,400	-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	1 Laporan	7,999,700	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	1 Laporan	7,999,700	-		
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	10 Dokumen	-	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	10 Dokumen	-	-		Badan Kesbangpol
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	25 Orang	55,000,000	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	25 Orang	55,000,000	-		Badan Kesbangpol

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

OPD: BADAN KESBANGPOL KAB. TAPANULI

NO	RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)				RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor**	**100%**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor**	**100%**				Badan Kesbangpol
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tercapai	1 Tahun		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tercapai	1 Tahun				Badan Kesbangpol
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	1,976,928,750	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	1,976,928,750	-		Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	19,800,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	19,800,000	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	100%		-		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,215,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,215,000	-		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5,831,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5,831,800	-		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1 Paket	5,442,100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1 Paket	5,442,100	-		Badan Kesbangpol
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	45,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	45,000,000	-		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100%		-		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	549,900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	549,900	-		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan	6,750,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36 Laporan	6,750,000	-		Badan Kesbangpol
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Laporan	4,913,600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Laporan	4,913,600	-		Badan Kesbangpol

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P-APBD dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan melakukan review realisasi anggaran tahun berjalan.

Rencana kerja dan Pendanaan Daerah merupakan Rancangan Perubahan Renja OPD, terdiri dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Lokasi Kegiatan dan alasan perubahan, yang disajikan pada Tabel Daftar Perubahan Program dan Kegiatan pada Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025. (Data excel).

1	8.1.6.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		FORKOPIMDA, BNN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kantor Kecamatan, UD. Dimpu, RM. Daulay	750,000,000			-	0.0%		750,000,000	APBD	
2	8.1.6.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		FORKOPIMDA, BNN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kantor Kecamatan, UD. Dimpu, RM. Daulay	29,999,800			-	0.0%		29,999,800	APBD	
3	8.1.6.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		FORKOPIMDA, BNN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kantor Kecamatan, UD. Dimpu, RM. Daulay	120,000,000			-	0.0%		120,000,000	APBD	
Jumlah VIII							**899,999,800**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**		**899,999,800**		
TOTAL							**4,516,535,000**	**-**	**503,085,140**	**503,085,140**	**11.1%**	**-**	**4,013,449,860**		

I	**8.1.4.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Tercapai**											
1	8.1.4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		FKUB	70,000,000	-	-	-	0.0%		70,000,000	APBD	
Jumlah VII							**70,000,000**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**		**70,000,000**		
E	**8.1.6**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**											
I	**8.1.6.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Tercapai**											

2	8.1.3.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		UD. Dimpu, Rumah Makan Daulay, LSM, Ormas, Kantor Kecamatan	30,000,000			-	0.0%		30,000,000	APBD	
3	8.1.3.2.01.6	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan tugas Paskibraka di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan, Rumah Makan, Hotel, Tailor,	277,799,900			-	0.0%		277,799,900	APBD	
Jumlah VI							**909,842,250**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**		**909,842,250**		
D	**8.1.4**	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Stabilitas Keamanan dan Ketertiban**											

I	**8.1.3.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik yang Tercapai**											
1	8.1.3.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Partai Politik, Bank Sumut	602,042,350			-	0.0%		602,042,350	APBD	

3	8.1.2.2.01.7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan, Rumah Makan, Hotel, Tailor,	30,000,000				0.0%		30,000,000	APBD	
4	8.1.2.2.01.8	Pembentukan Paskibraka	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembentukan Paskibraka di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan, Rumah Makan, Hotel, Tailor,	55,000,000		27,832,757	27,832,757	50.6%		27,167,243	APBD	
Jumlah V							**418,686,100**	**-**	**27,832,757**	**27,832,757**	**6.6%**	**-**	**390,853,343**		
C	**8.1.3**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase pendidikan politik masyarakat dalam permusyawaratan dan perwakilan**											

1	8.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		JM. Service, Regar Service, Kantor Samsat Pandan	20,709,800		4,600,000	4,600,000	22.2%		16,109,800	APBD	
Jumlah IV							**20,709,800**	**-**	**4,600,000**	**4,600,000**	**22.2%**		**16,109,800**		
B	**8.1.2**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase kualitas wawasan kebangsaan masyarakat akan nilai kehidupan berbangsa**											
I	**8.1.2.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Tercapai**											
1	8.1.2.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan	303,686,400			-	0.0%		303,686,400	APBD	
2	8.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan	29,999,700			-	0.0%		29,999,700	APBD	

III	**8.1.1.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercapai**											
1	8.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kantor Pos Pandan	549,900			-	0.0%		549,900	APBD	
2	8.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		PT. Telkom, Indomaret	6,750,000		1,002,114	1,002,114	14.8%		5,747,886	APBD	
3	8.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		UD. Dimpu	4,913,600			-	0.0%		4,913,600	APBD	
4	8.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		UD. Dimpu, Bank Sumut, BPJS Ketenagakerjaan , BPJS Kesehatan	118,496,900		24,000,000	24,000,000	20.3%		94,496,900	APBD	
Jumlah III							**130,710,400**	**-**	**25,002,114**	**25,002,114**	**19.1%**	**-**	**105,708,286**		
IV	**8.1.1.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercapai**											

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH
LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	NAMA REKANAN (UD/ CV/ PT)	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (RP)			REALISASI (%)		SISA ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	KET
								TW. LALU	TW. INI	S/D TW. INI	KEUANGAN	FISIK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8	**Unsur Pemerintahan Umum**													
	8.1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**													
A	**8.1.1**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase tingkat ketersediaan kebutuhan operasional pelayanan administrasi kantor**											
I	**8.1.1.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tercapai**											
1	8.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		PT. Bank SUMUT Pandan	1,976,928,750		425,095,768	425,095,768	21.5%		1,551,832,982	APBD	
2	8.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		PT. Bank SUMUT Pandan	19,800,000		4,950,000	4,950,000	25.0%		14,850,000	APBD	
Jumlah I							**1,996,728,750**	**-**	**430,045,768**	**430,045,768**	**21.5%**		**1,566,682,982**		
II	**8.1.1.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Tapanuli Tengah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercapai**											
1	8.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan		UD. Dimpu	8,584,000			-	0.0%		8,584,000	APBD	
2	8.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		RM. Abel	5,831,800			-	0.0%		5,831,800	APBD	
3	8.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		UD. Dimpu	5,442,100		1,461,500	1,461,500	26.9%		3,980,600	APBD	
4	8.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bus Travel, Hotel, Penyelenggara Acara	50,000,000		14,143,001	14,143,001	28.3%		35,856,999	APBD	
Jumlah II							**69,857,900**	**-**	**15,604,501**	**15,604,501**	**22.3%**		**54,253,399**		

fasilitasi Penanganan Konflik Sosial realisasi capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

Narasi di atas dapat dilihat pada tabel realisasi di bawah ini: (Data excel).

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik realisasi capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan realisasi capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II (dua) yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/ kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota realisasi capaian kinerja 21,43% sebesar Rp475.252.383,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila danKarakter Kebangsaan.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan realisasi capaian kinerja 6,65% sebesar Rp27.832.757,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pasal 360; Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
13. DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 4 Januari 2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perubahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun berjalan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Dengan cara demikian diharapkan

Daerah. Tahapan persiapan meliputi persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Dalam mewujudkan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, tema yang diangkat yakni:

"MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.".

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap dalam Penyusunan Perubahan RKPD. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD memiliki kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renja OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 OPD disusun menjadi dasar adanya Program/ Kegiatan yang tidak/ belum selesai akan tetapi pada tahun berjalan dana yang ditampung tidak memenuhi atau ada kegiatan baru yang harus dilaksanakan sedangkan pada Renja belum ditampung pagu anggarannya. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 16

BAB IV PENUTUP 22

BAB IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2025, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya pada tahun anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu membe

Pandan, 20 Mei 2025

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUDI JONIAR H. SIAHAAN, S.E., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19761124 200212 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Jl.Imam Bonjol No.18 Tlp.0631-371824, Fax.0631-371143
Pandan 22611, Provinsi Sumatera Utara

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

JL. Zainul Basri Hutagalung NO. Telp. (0631) 371346
PANDAN - 22611

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA OPD, usulan dari masyarakat/pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya meningkatkan dan memberhasilkan Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mempedomani Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030.

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Program maupun Kegiatan Pembangunan Bidang Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, sangat diperlukan sumbangan saran dan pendapat. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan hal tersebut agar tujuan

Dipindai dengan CamScanner

dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dapat tercapai.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode satu tahun ke depan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 20 Mei 2025

Plh.KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

LISNAWATY LUMBANTOBING,S.SOS,MM
PEMBINA
NIP. 19850220 201001 2 015

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang 1
Landasan Hukum 2
Maksud dan Tujuan 3
Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renja Perangkat Daerah..... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 8
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah..... 11
2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat..... 12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 13
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 14

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025..... 15

BAB V PENUTUP..... 22

DAFTAR TABEL :

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Kerja Progam dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 18

Dipindai dengan CamScanner

BAB. I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan proses pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan dengan unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) untuk Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah Rencana Kerja tahunan yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai pengendali dalam pencapaian sasaran. Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 dan merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian rencana kerja peningkatan prasarana, saranan dan penyuluh, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini disusun selaras dan tidak bertentangan dengan rencana dalam berbagai tingkatan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas maka ditetapkanlah prioritas Program / Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

II. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah tentang Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemetaan (Mapping) Organisasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Seri E);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020
15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Annggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Mengevaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya berdasarkan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah, usulan masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif, yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Tersusunnya kegiatan dan anggaran secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan untuk mendukung tumbuhnya Agro Industri berbasis sumber daya local yang inovatif sehingga dapat meningkatkan sistem penyelenggaraan ketahanan pangan dengan meningkatkan SDM dan sarana dan prasarana pertanian Tahun 2025.

IV. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 yang mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan penganggaran tahunan yang disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

a. Latar Balakang
b. Dasar Hukum
c. Maksud dan Tujuan
d. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Selama Tahun 2025 ini Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dalam periode Dokumen Perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena Periode RPJMD dan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan 2023-2026 telah berakhir, sedangkan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 sedang dalam proses penyusunan, maka nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2025 masih mengacu dokumen RENSTRA 2023-2026, sesuai dengan nomenklatur yang disediakan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemetaan (Mapping) organisasi.

Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena hal tersebut diatas maka dibentuklah Dinas Ketahanan Pangan yang awalnya melekat di Dinas Pertanian. Sehingga Dinas Ketahanan Pangan memiliki urusan wajib dan program serta kegiatan terkait Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, bidang Penyuluhan dialihkan ke Dinas Pertanian.

Dipindai dengan CamScanner

Program dan kegiatan yang ada dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan sampai Tahun Anggaran 2025 secara singkat sebagai berikut :

I. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

II. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN

III. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan bahan logistik kantor;
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

IV. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

V. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

VI. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

Dipindai dengan CamScanner

VII. Program Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan;
3. Penyusunan neraca bahan makanan (NBM)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka daerah kabupaten / kota wajib melekukan pemetaan terhadap program yang ada di RPJM di mana Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dalam RPJMD 2025 – 2030 masih mengadopsi program kegiatan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasi pemetaan yang dimaksud sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

II. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN

III. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan bahan logistik kantor;
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Dipindai dengan CamScanner

IV. ***Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

V. ***Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

VI. ***Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

1. Penyediaan jasapemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

I. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan;
3. Penyusunan neraca bahan makanan (NBM)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keluaran (output} dari kegiatan Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan sehingga menghasilkan pelayanan prima pada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain : Penyedian jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan

Dipindai dengan CamScanner

komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah, Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Keluaran (output} dari Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan kendaraan dinas operasional, Pendangadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan mobeleur, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Rehabilitasi gedung Eks Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Keluaran (output} Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah mewujudkan SDM aparatur yang memiliki kualitas, untuk meningkatkan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

4. **Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**

Keluaran (output} Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah meningkatnya laporan dan capaian keuangan Dinas Ketahanan Pangan dengan melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD.

5. **Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**

Keluaran (output} dari program peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) adalah peningkatan keanekaragaman produksi dan ketersediaan serta yang bersumber dari tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan kelembagaan pangan yang mampu mendukung peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan dan mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif, menghindari manapoli usaha bisnis pangan serta mengupayakan pangan dan gizi yang cukup bagi masyarakat.

Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi, Pemanfaatan pekarangan untuk pengmbangan pangan, Promosi produk unggulan pangan,

Dipindai dengan CamScanner

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Penanganan Daerah Rawan Pangan, Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

6. **Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan**

   Keluaran (output} Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan adalah meningkatkan SDM desa mandiri pangan Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

7. **Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan**

   Keluaran (output} dari program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan adalah membantu dalam pendistribusian dan mempelancar akses pangan masyarakat serta tersedianya data dan informasi harga pangan pokok dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Pasar dan Monitoring Harga Pangan Pokok dan Strategis.

8. **Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**

   Keluaran (output} dari program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan adalah membina, memantau dan mengawasi keamanan pokok dikabupaten Tapanuli Tengah serta membantu dalam menjamin ketersediaan pangan, Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan Program Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan adalah Pembuinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Demplot Pangan Organik/Keamnan Pangan.

9. **Program Pengembangan Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah**

   Keluaran (output} dari Program Pengembangan Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah adalah menguji kualitas produk-produk hasil pangan yang diproes atau diolah oleh kelompok-kelompok usaha home indrustri guna masyarakat tidak ragu dalam mengkonsumsi produksi olahan tersebut, adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan Program Pengembangan Otoritas Komponen Keamanan Pangan adalah Sertfikasi dan Pelebelan Produk Pangan Organik.

10. **Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan**

    Keluaran (output} dari program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan adalah menekan jumlah masyarakat yang kekurangan gizi melalui pelatihan mengolah bahan pangan agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan

Dipindai dengan CamScanner

melaksanakan kegiatan berupa Gerakan Makan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman.

11. Program Pengembangan Produk Pangan Lokal/ Makanan Tradisional

Keluaran (output} dari program Pengembangan Produk Pangan Lokal/ Makanan Tradisional adalah memperkenalkan produk pangan lokal/tradisional kepada masyarakat melalui perlombaan olahan pangan yang dapat dikembangkan menjadi usaha kecil serta tersedianya data pangan lokal di Kabupaten Tapanuli Tengah melalui kegiatan Inventarisasi Makan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman, Pengembangan Teknologi Olahan Pangan yang Berorientasi Pasar dan Promosi/Pameran produk Olahan Pangan Lokal Unggulan.

2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Respon terhadap dinamika lingkungan strategi bik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan kinerja instansi, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan perannya dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan dalam lima tahun kedepan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga terjadi perubahan peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi Pembangunan sehingga upaya mendukung tercapainya visi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 – 2030.

Perumusan isu-isu strategis tersebut selain berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kekurangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi Dinas Ketahanan Pangan maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam merencanakan program dan kegiatan yang diperioritaskan selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan harga pangan di daerah
2. Belum optimalnya pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3. Masih belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan
4. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
5. Perlunya diversifikasi pangan sehingga terwujudnya ketersediaan pangan

Dipindai dengan CamScanner

6. Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam penyerapan dan penerapan paket-paket teknologi
7. Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh pertanian relatif rendah belum memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelayanan penyuluhan
8. Semakin sempitnya luas lahan / potensi lahan pertanian.
9. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung penyelengaraan penyuluhan. Terbatasnya pembiayaan kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhandalam peyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up, aspirasi masyarakat harus senantiasa dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Menindaklanjuti hal tersebut OPD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok yang mengajukan usulan dan meninjau lokasi yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan kedalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan perangkat daerah di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah harus mengacu pada Kebijakan Nasional maupun Provinsi Sumatera Utara, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan ditingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian :

Tabel 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
	Arah Kebijakan Nasional	**RPJMN 2025-2030**	
1.	**Peningkatan Produksi padi dan pangan lain** : (i) Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Panngan lain; (ii) Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan; (iii) Pengendalian Konversi lahan padi; (iv) Reforma Agraria; (v) Bantuan Alsintan; (vi) Penyaluran subsidi pupuk dan Benih; pengembangan Desa Mandiri Benih; (vii) Rehabilitasi Jaringan Irigasi;Pembangunan Waduk dan embung (viii) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian.		
2.	**Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat** : (i) Pemantauan dan pengendalian harga pangan; (ii) Cadangan Pangan Pemerintah; (iii) Pengendalian impor dan tata niaga pangan; (iv) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan; (v) Penyaluran beras sejahtera (Rastra).		
3.	**Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat**; (i) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman dan bergizi; (ii) Advokasi diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan); (iii) Penanganan rawan pangan dan kurang gizi; (iv) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan.		

Dipindai dengan CamScanner

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 – 2030 serta hasil analisis terhadap kebutuhan organisasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan kabupaten tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	TUJUAN	SASARAN
1	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
2	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya pencapaian Misi, Dinas Ketahanan Pangan berkaitan dengan Misi ke 3 dan 9 yakni :

Misi 3 : **Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif .**

Visi 9 : **Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk semua, Lestari, dan Berkeadaban**

maka Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 mendukungnya melalui 2 (Dua) Program Pembangunan.

Program pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, terdiri dari 2 (Dua) Program terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Bupati No 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan yakni bertugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Program dan Kegiatan yang di rencanakan akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- **Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

  Sub. Kegiatan :

  a. Penyediaan jasa surat menyurat
  b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
  d. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Dipindai dengan CamScanner

- **Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

  Sub. Kegiatan :

  a. Penyediaan Bahan logistik kantor
  b. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  c. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
  d. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
  e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

- **Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

  Sub. Kegiatan :

  a. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

- **Kegiatan : Pemeliharaan Barang Untuk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

  Sub. Kegiatan :

  a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional

- **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

  Sub. Kegiatan :

  a. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
  b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

  Sub. Kegiatan :

  a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

II. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- **Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan**

  Sub. Kegiatan :

  a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
  b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
  c. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target/ Persen	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	09	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**14.500.000**	DAU		Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	**37.500.000**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	Dinas Ketapang	12 Bulan	7.500.000	DAU	Minimnya Anggaran Perencanaa selama 12 bln	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	25.000.000
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketapang	12 Bulan	7.000.000	DAU	Minimnya Anggaran Perencanaa selama 12 bln	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	12.500.000
2	09	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.068.999.000**	DAU		Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	**2.068.999.000**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketapang	12 Bulan	2.068.999.000	DAU		Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	2.068.999.000
2	09	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**53.766.700**	DAU		Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	**90.000.000**
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Dinas Ketapang	12 Bulan	1.000.000	DAU	Minimnya Anggaran Komponen Listrik selama 12 bln	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	2.000.000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Ketapang	12 Bulan	7.766.700	DAU	Minimnya Anggaran Peralatan dan Perlengkapan selama 12 bln	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	15.000.000
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Dinas Ketapang	12 Bulan	2.000.000	DAU	Minimnya Anggaran Logistik selama 12 bln	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	3.000.000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Ketapang	12 Bulan	3.000.000	DAU	Minimnya Anggaran Cetakan selama 12 bln	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	5.000.000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.000.000		Mendukung Kegiatan DAK Non Fisik	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	65.000.000
2	09	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**35.000.159**			Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	**75.000.000**
2	09	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Ketapang	12 Bulan	35.000.159	DAU	Minimnya Sarana Peralatan dan Perelngkapan Kantor	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	75.000.000
2	09	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**197.400.000**	DAU		Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	**280.500.000**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Dinas Ketapang	12 Bulan	1.500.000	DAU	Minimnya Anggaran Surat Menyurat selama 12 bulan	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	3.500.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketapang	12 Bulan	30.600.000	DAU	Peningkatan Daya dan Kapasitas Internet	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	40.000.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketapang	12 Bulan	5.000.000	DAU		Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	7.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Ketapang	12 Bulan	160.300.000			Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	230.000.000

Dipindai dengan CamScanner

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target/ Persen	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**45.000.000**					
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketapang	12 Bulan	45.000.000	DAU		Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100	50.000.000
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**							Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	100	1.365.000.000
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**				**1.095.998.820**			Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	100	1.365.000.000
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Ketapang	12 Bulan	999.998.820	DAK		Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (dengan satuan persen)	100	1.000.000.000
2	09	03	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Dinas Ketapang	12 Bulan	48.000.000	DAU	Gaji Non ASN	Persentase k dan tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten	100	150.000.000
2	09	03	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dinas Ketapang	12 Bulan	48.000.000	DAU	Gaji Non ASN	Persentase k dan tersalurnya Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten	100	150.000.000
2	09	03	2.01	17	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Gerakan Pasar Murah (GPM) di Kabupaten Tapanuli Tengah			-	DAU	Program Perioritas Pemerintah Pusat	Persentase k dan tersalurnya Pangan Pokokatau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten	100	65.000.000
Total Tahun 2025									**3.510.664.679**					**3.966.999.000**

Plh. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

LISNAWATY LUMBANTONING,S Sos,MM
PEMBINA
NIP. 19850220 201001 2 015

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mendasarkan pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2030, Rancangan P-RKPD 2025 serta Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan di tingkat vertikal, serta dokumen perencanaan ditingkat vertikal lainnya baik ditingkat provinsi maupun nasional, dengan berorientasi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pada kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Proses penyusunan perubahan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasidari semua komponen di masyarakat dan di internal Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personil di Dinas Ketahanan Pangan yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Dinas Ketahanan Pangan KabupatenTapanuli Tengah.

Plh.KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

LISNAWATY LUMBANTOBING,S.SOS,MM
PEMBINA
NIP. 19850220 201001 2 015

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

JL. ZA.GLR. Sutan Kumala Pontas No.1 PANDAN - 2261
Email :koperasitapteng@gmail.co

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-NYa, sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat disusun. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritis program/kegiatan serta pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil di KabupatenTapanuli Tengah Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 - 2026. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada rancangan RKPD, Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) Tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan Kegiatan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini disusun untuk dapat disinergikan dengan program dan kegiatan Renja SKPD serta dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 20 Mei 2025
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

ERMAN SYAHRIN LUBIS,S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770120 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULIUAN 1

a.....Latar Belakang 1

b.....Landasan Hukum 2

c.....Maksud dan Tujuan 3

d.....Sistematika 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

a.....Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah 5

b.....Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah 10

c.....Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah 12

d.....Review Terhadap Rancangan RKPD 14

e.....Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 18

a.....Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 18

b.....Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah 23

BAB IV RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025 DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

a.....Program dan Kegiatan 25

BAB V PENUTUP 31 31

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (P-Renja OPD). P-Renja OPD diartikan sebagai "**Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun**" (Pasal 1 Butir 11). Lebih lanjut diuraikan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut, "P-Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat" (Pasal 7 ayat 2).

Adapun program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Organisasi Perangkat Daerah tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen P-Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Disusun Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masing-masing OPD perlu Menyusun Rancangan Perubahan Renja OPD dan demikian halnya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terkecuali. Sebelum menjadi Rencana Kerja Final (Rancangan Akhir Renja) maka sebelumnya disusunlah Rancangan Perubahan Renja sebagai acuan dan bahan pembahasan untuk menetapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) OPD. Setelah Rancangan Perubahan Renja dibahas, kemudian Rancangan Perubahan Renja tersebut menjadi Rancangan Akhir Renja .

Dengan demikian, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini menyusun Rancangan Perubahan renja sebagai hasil dari pembahasan dari Renja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang telah diajukan dan diusulkan dalam forum perangkat daerah.

B. Landasan Hukum

Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang - Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara *Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;*
10. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Renja ini adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025, yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi dan UKM;
2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

D. Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Rancangan Akhir Renja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. ***Latar Belakang,*** Menguraikan gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD, pengertian ringkas tentang Rancangan Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan antara Rancangan Perubahan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Rancangan Perubahan Renja K/L dan Rancangan Perubahan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. ***Landasan Hukum***, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

C. ***Maksud dan Tujuan***, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD.

D. ***Sistematika Penulisan,*** Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja dan Capaian Rencana Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

C. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

D. Review Terhadap Rancangan RKPD

E. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV : RANCANGAN PERUBAHAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja dan Capaian Rencana Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap rencana pembangunan tersebut adalah sebagai tolak ukur untuk menilai capaian kinerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, baik dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah ditetapkan indicator kinerja programnya (Outcome) maupun kegiatan (Output) serta target kinerja capaian program /kegiatan dan realisasinya.

Evaluasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan anggaran program / kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat Tahun 2024 maka realisasi renja adalah 93,01 %..

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah telah merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 95,1%, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 99,43%, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 99,69%.

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan dan triwulan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut yang tertuang dalam Tabel 2.1 berikut:

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 2. 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH S/D TAHUN 2024

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ kegiatan(output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
01			**ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Tersdianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	99%	100,00%	95,17%	0,9517	100,00%	2,9417	0,735425
01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	90%	81%	100,00%	82,14%	0,8214	100,00%	2,6314	0,65785

Dipindai dengan CamScanner

7	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
7	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90%	0	0	0	0	100,00%	1	0,25
7	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
7	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	90%	100%	100,00%	100,00%	1	100,00%	3	0,75
7	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90%	0	100,00%	100,00%	1	100,00%	2	0,5
7	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	90%	100%	100,00%	99,99%	0,9999	100,00%	2,9999	0,749975
7	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	90%	100%	100,00%	100,00%	1	100,00%	3	0,75
7	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Trselenggaranya Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	90%	100%	100,00%	98,22%	0,9822	100,00%	2,9822	0,74555
7	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah**									
7	01	2.07	10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90%	101%	100,00%	100,00%	1	100,00%	3,01	0,7525
7	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
7	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90%	100%	100,00%	99,00%	0,99	100,00%	2,99	0,7475
7	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90%	76%	100,00%	67,31%	0,6731	100,00%	2,4331	0,608275
7	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90%	100%	100,00%	100,00%	1	100,00%	3	0,75

Dipindai dengan CamScanner

	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	90%	96%	100,00%	98,84%	0,9884	100,00%	2,9484	0,7371
	01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90%	100%	100,00%	100,00%	1	100,00%	3	0,75
	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90%	133%	100,00%	96,66%	0,9666	0,00%	2,2966	0,57415
	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**									
	05	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	90%	109%	100,00%	97,80%	0,978	100,00%	3,068	0,767
	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**									
	06	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan	90%	0	100,00%	99,97%	0,9997	100,00%	1,9997	0,499925
	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**									
	07	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Kordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**									

Dipindai dengan CamScanner

07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	90%	0	100,00%	96,90%	0,969	100,00%	1,969	0,49225
07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	90%	0	0,00%	0,00%	0	100,00%	1	0,25
07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90%	0	100,00%	96,83%	0,9683	0	0,9683	0,242075
08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**									
08	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**									
08	2.01	01	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	90%	38%	100,00%	99,50%	0,995	100,00%	2,375	0,59375

Pandan, 20 Mei 2025

KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

ERMAN SYAHRIN LUBIS,S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 199770120 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah

Analisis Kerja Pelayanan Perangkat Daerah adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Penyelenggaraan Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 diarahkan dalam usaha mewujudkan koperasi dan usaha kecil menegah yang memiliki tingkat produktifitas tinggi, memiliki kemandirian, berdaya saing ekonomi, sosial dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan melalui penekanan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program-program strategis dalam upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah, fasilitasi pengembangan kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan instansi/stakeholders terkait, melakukan inovasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan KUKM khususnya dalam pengembangan dan peningkatan usaha dan optimalisasi pendampingan KUKM melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

Program-program strategis yang dilaksanakan selama 2023-202 antara lain berupa program penciptaan iklim UKM yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi UMKM dan Koperasi, program peningkatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUKM, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan program pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha koperasi.

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 Sebanyak 25.535 UMKM, pada tahun 2022 UMKM sebanyak 25.650 UMKM, pada tahun 2023 UMKM sebanyak 25.750, pada tahun 2024 UMKM menurun menjadi 18.889.

Untuk lebih detilnya tentang Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 di bawah ini.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	BASELINE			TARGET					KET	GROWTH
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
2	3	4	5	6	7	9	8			9		11
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian Pada Level Kabupaten (%)		Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat	56,00	60	70	801	85,00	87,00	90,00	95		0,93519725
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat	0,07	0,07	0,07	0,9	0,12	0,16	0,20	0,26		1,29060374

Pandan, Agustus 2025
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

ERMAN SYAHRIN LUBIS,S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770120 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

C.....Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahan dilihat dari rumusan masalah pokok. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah pokok antara lain rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, rendahnya daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM dan Koperasi yang berbasis potensi lokal, belum optimalnya pengembangan akses pemasaran hasil industri UMKM dan Koperasi. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat	Masih rendahnya sumber daya manusia atau rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat
		Rendahnya penghasilan atau sedikitnya lapangan pekerjaan	Perencanaan pembangunan yang tidak merata
		Kesenjangan sosial	
		Rendahnya daya beli masyarakat	
2	Rendahnya daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM dan Koperasi yang berbasis potensi local	Belum optimalnya potensi unggulan daerah	Rendahnya produktifitas potensi unggulan daerah
		Rendahnya kualitas SDM usaha UMKM dalam pengaplikasian teknologi tepat guna	Kualitas produk lokal masih rendah
		Kurangnya fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk	Rendahnya penataan dan pengembangan kelompok UMKM dan Koperasi
3	Belum optimalnya pengembangan akses pemasaran hasil industri UMKM dan Koperasi	Kurangnya akses pemasaran produk usaha UMKM dan Koperasi	Kurangnya promosi produk unggulan daerah melalui akses dan teknologi
4	Belum Optimalnya	Masih terbatasnya fasilitasi	Belum optimalnya penyusunan

Dipindai dengan CamScanner

	Pendampingan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi	akses permodalan dan skema pembiayaan UMKM dan Koperasi	regulasi mengenai permodalan, dan investasi UMKM
		Rendahnya pengawasan terhadap kualitas produk-produk unggulan	Rendahnya kualitas produk sesuai dengan baku mutu dan industry kreatif
		Rendahnya kemitraan UMKM dan Koperasi	Rendahnya kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat
5	Kurangnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup secara intensif
		Adanya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan	Kurang optimalnya pengurangan resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan internal dan eksternal, selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis yang merupakan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Berikut disampaikan isu-isu strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya daya saing pelaku usaha koperasi dalam penguasaan teknologi
b. Kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi belum optimal
c. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik.
d. Rendahnya kinerja koperasi menyebabkan pelayanan prima koperasi belum optimal
e. Jaringan kemitraan koperasi masih terbatas
f. Akses modal bagi koperasi dan UKM masih terbatas
g. Rendahnya produktifitas UKM menyebabkan skala yang dikelola merupakan skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi
h. Terbatasnya akses sumberdaya produktif dalam meningkatkan kapasitas usahanya terutama dalam memperoleh akses pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan
i. Iklim dunia usaha kurang kondusif
j. Rendahnya daya saing UKM dalam hal keterbatasan inovasi dan jaminan mutu produk UKM
k....Jaringan kemitraan UKM dan pengembangan pasar masih terbatas

Dipindai dengan CamScanner

D.....Review Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah bagian yang berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Berdasarkan review Rencana Awal Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, terdapat hal sebagai berikut ini:

a. Beberapa Program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program Fasilitasi Usaha Pendapatan – pendapatan Keluarga (UP2K);
b. Adanya Perubahan Nomenklatur pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka perlu penambahan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan koperasi perlu diakomodir dalam Rancangan Rencana Kera Tahun 2025.

Uraian hasil review terhadap Rancangan Awal Renja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.4
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7
BIDANG URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				**2.182.074.264,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**1.799.654.055,00**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	KAB. TAP. TENG	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		14.266.698,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB. TAP. TENG	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.439.821.200,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KAB. TAP. TENG	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. TAP. TENG	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		44.760.012,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. TAP. TENG	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		39.999.738,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. TAP. TENG	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		233.806.407,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. TAP. TENG	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27.000.000,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				**145.239.116,00**	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB. TAP. TENG	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		145.239.116,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)				**237.181.093,00**	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Kordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	KAB. TAP. TENG	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Kordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		237.181.093,00	

Dipindai dengan CamScanner

E. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrembang kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan Rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan.

Dalam urusan bidang koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Tapanuli Tengah jumlah usulan dari kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan anggaran. Sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif, selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya urusan koperasi usaha kecil dan menengah maka peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

A...Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2020-2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2025.

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2025, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025, adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warrga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Keterkaitan RPJMN 2020-2025 dengan Visi Indonesia 2045

RPJMN 2020-2025 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Tahun 2020-2025 adalah awal dimulai transformasi ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju 2045.

5 Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut dalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi, dan

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi.

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 Agenda Pembangunan

Dalam RPJMN 2020-2025 ditetapkan 7 Agenda Pembangunan sebagai penerjemahan dari RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2014, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prinsip Dasar Pembangunan

RPJMN 2020-2025 menggariskan 3 (tiga) prinsip dasar pembangunan, yaitu:

1. Membangun Kemandirian

   Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

   Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

3. Menjaga Keberlanjutan

Dipindai dengan CamScanner

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Adapun Visi dan Misi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Presiden. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya ada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UMKM adalah:

"Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk mendukung Presiden mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.".

Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran dari pokok visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern;
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
   a. Modernisasi Koperasi;
   b. Melahirkan Wirausahawan Baru *(New Entrepreneur)*.
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
   a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains* (GVC);
   b. UMKM Naik Kelas *(Scalling Up)*.
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
   a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
   b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2024 ditetapkan visinya adalah:

"Terwujudnya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh, Mandiri, Memiliki daya saing dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong."

Visi tersebut dijabarkan dalam misi yang diuraikan seperti yang tertuang di bawah ini:

Dipindai dengan CamScanner

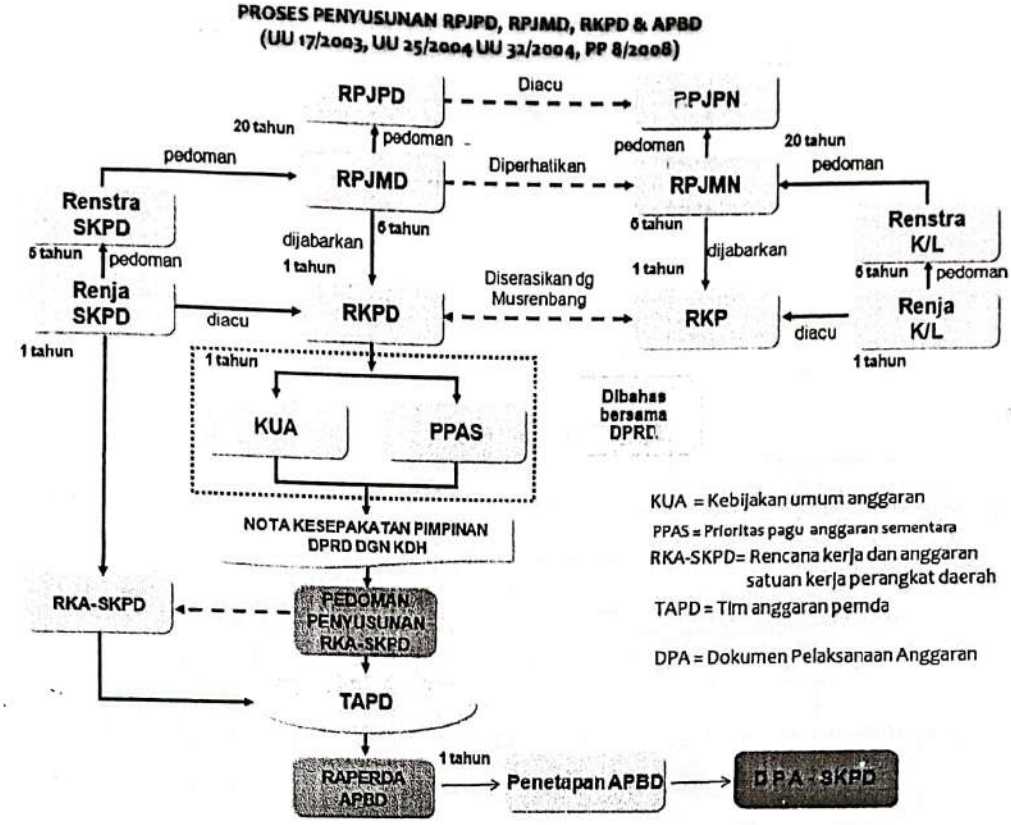
1. Mengurangi jumlah pengangguran melalui penciptaan wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Meningkatkan dukungan terhadap usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta akses Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap sumber daya produktif;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
5. Meningkatkan Pertumbuhan dan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
6. Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi di Sektor Informal yang berskala Mikro dan Kecil;
7. Membina dan mengembangkan jiwa dan semangat berusaha yang berwawasan lingkungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Rencana Awal merupakan dokumen perencanaan kerja Dinas Koperasi dan UKM dalam satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJP. Rencana Awal Dinas Koperasi Dan UKM memuat program prioritas Dinas Koperasi Dan UKM, pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Secara substansi, keberadaan Rencana Awal membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2016, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013 -2022, RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2006-2026 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 - 2026.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-Rencana Awal dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Keterkaitan Rencana Awal dengan dokumen Perencanaan yang lain dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Dipindai dengan CamScanner



Gambar 3.1. Proses penyusunan dan keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya

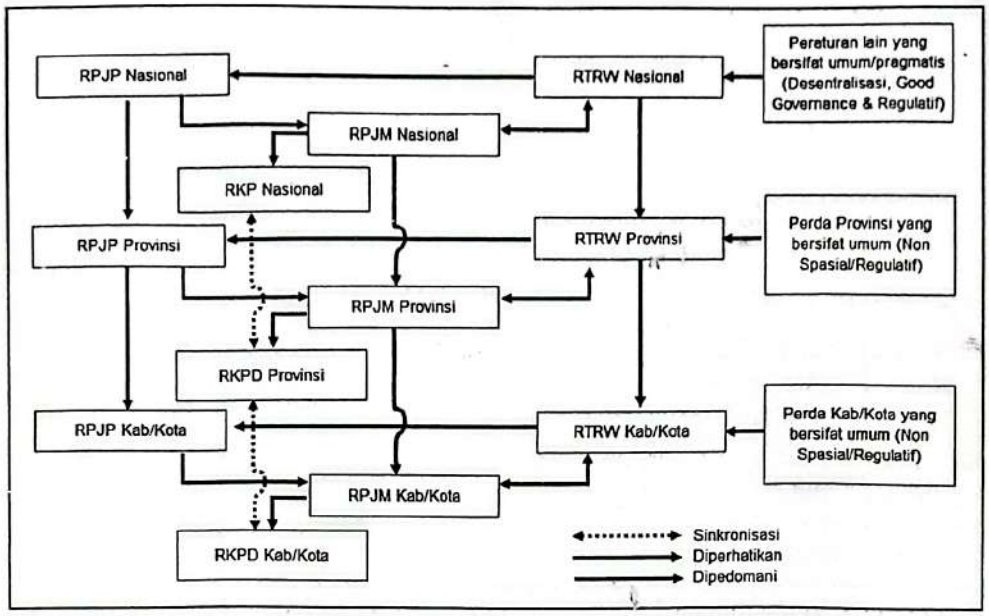
Dari Gambar. 3.1. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan Rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas dan RPJPD Propinsi Sumatera Utara serta RPJMD Propinsi Sumatera Utara melalui mekanisme Musrenbang Propinsi. Rencana Kerja disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RENSTRA yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.Penyusunan Renja Dinas Koperasi Dan UKM disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Dan UKM.Rencana Awal Dinas Koperasi Dan UKM kemudian disusun menjadi Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Dinas Koperasi Dan UKM yang selanjutnya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP Nasional, Renja K/L, RKPD Propinsi Sumatera Utara, RKPD Tapanuli Tengah. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024-2026.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 3.2 berikut ini.



Gambar 3.2. Bagan keterkaitan RENJA Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B...Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tapanuli Tengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Tujuan jangka menengah dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

1. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat

Sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin dicapai dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM dan Koperasi yang berbasis potensi lokal.
b. Meningkatkan Pendampingan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
c. Meningkatkan jumlah koperasi yang aktif
d. Meningkatkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah beserta indikator sasaran disajikan dalam tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada tahun Ke-				
				Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Target	Target	Target	Target
1a	Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat	Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM dan Koperasi yang berbasis potensial lokasi	Jumlah UMKM	25.650	18.889	25.850	25.950	26.150
			Jumlah Koperasi	375	378	381	384	390
			Persentase Koperasi Aktif	50%	51%	52%	53%	54%
			Jumlah Tenaga Kerja UMKM	53.300	53.500	53.700	53.900	54.100
			Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	1272	1281	1290	1299	1310
			Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	25.645	25.745	25.845	25.945	26.045
1b		Meningkatkan pendampingan dan pembinaan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Jumlah wirausaha baru mikro dan kecil	100	100	100	100	100
			Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	50	50	50	50	50

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A.....Program dan Kegiatan

Program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024-2026. Secara umum, perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tertuang dalam 3 (tiga) Program, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tapanuli Tengah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Kordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan pendanaan/ anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2025. Adapun rencana kerangka anggaran untuk Rancangan Perubahan RENJA Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat pada tabel berikut ini:

Dipindai dengan CamScanner

No.	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Awal Periode Renstra	Realisasi Capaian (RPJMD)	Prediksi Capaian Target (RPJMD)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)								Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	2025	2026	2027			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
	17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan (Dengan Satuan persen)				80 %	80 %											
	17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen							1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	17 01 2.01 0000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen				Nihil, Tersentuh, Tertolak, Pemilu, Pemilukada	Dana Alokasi Umum (DAU)		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
	17 01 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen				Nihil, Tersentuh, Tertolak, Pemilu, Pemilukada	Dana Alokasi Umum (DAU)		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
	17 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen				Nihil, Tersentuh, Tertolak, Pemilu, Pemilukada	Dana Alokasi Umum (DAU)		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan				
	17 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan				Nihil, Tersentuh, Tertolak, Pemilu, Pemilukada	Dana Alokasi Umum (DAU)		1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
	17 01 2.01 0004	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.750,00	1.949.750,00	Kab. Tapanuli Tengah,	Dana Alokasi Umum	-	5. Peningkatan Tata			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.439.821.200,00	1.439.821.200,00	1.439.821.200,00			-	5. Peningkatan Tata	Dinas Koperasi Usaha		1.439.821.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.439.821.200,00	1.439.821.200,00	1.569.481.298,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.439.821.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			3 Orang	3 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah			18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	49.338.430,00	49.333.212,00	49.333.212,00			-	5. Peningkatan Tata	Dinas Koperasi Usaha		49.338.430,00	DINAS KOPERASI, USAHA
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.996.446,00	1.996.446,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.338.430,00	4.337.769,00	4.337.769,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola			4.338.430,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.000,00	35.425.800,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.999.997,00	2.999.997,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dipindai dengan CamScanner

	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	39.999.738,00	39.999.738,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	39.999.738,00	39.999.738,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	213.600.000,00	233.806.407,00	233.806.407,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		213.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	990.897,00	990.897,00	Kab. Tapanuli Tengah,	Dana Alokasi Umum	-	5. Peningkatan Tata			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alr dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.997.910,00	4.997.910,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	186.000.000,00	206.217.600,00	206.217.600,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			186.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					

Dipindai dengan CamScanner

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya di Kabupaten Tapanuli Tengah (Dengan Satuan:jumlah)				1299 Unit	1299 Unit	43.163.048,00	286.125.975,00	322.238.947,00							280.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-			20 Unit	20 Unit	43.163.048,00	286.125.975,00	286.125.975,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat	Kelompok Koperasi		280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	20 Orang	43.163.048,00	286.125.975,00	322.238.947,00	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup			280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku UMKM Yang Naik Kelas				1299 Unit Usaha	1299 Unit Usaha	43.163.048,00	329.999.450,20	437.180.984,20							280.000.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang Memiliki Ijin Berusaha dan Telah dilakukan Pendataan	-			20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	43.163.048,00	329.999.450,20	329.999.450,20			-	4. Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat	Pelaku UKM		280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																			
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	43.163.048,00	329.999.450,20	437.180.984,20	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat			280.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
												JUMLAH	1.909.103.326,00	2.459.102.680,20	2.718.734.084,20							2.382.777.230,00	

KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

ERMAN SYAHRIN LUBIS, S.Sos M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770120 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2025 ini merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah 2023-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Tengah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami berharap agar rancangan ini dapat ditetapkan menjadi Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 dengan adanya masukan dan perbaikan dari berbagai pihak. Atas masukan dan perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 20 Mei 2025

KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

ERMAN SYAHRIN LUBIS,S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770120 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan N. Daulay No. Telp/Fax : (0631) 371142
PANDAN – 22611

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025







DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini dapat disusun. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritisasi program/kegiatan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan amanah yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalamm Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Renja yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebelum pelaksanaan pembangunan bahwa semua sesuai Tugas Pokok dan Fungsi diwajibkan terlebih dahulu menyusun suatu Rencana Kerja dimana pengalokasian sumber dana urusan wajib ataupun urusan pilihan disesuaikan dengan kewenangan masing – masing tingkat Perencanaan Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini didasarkan pada kondisi kenyataan yang ada dimana tingkat permintaan terhadap kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar ke PU-an sebagai urusan wajib sangat tinggi/besar, sedangkan disisi lain dana yang tersedia sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan /aspirasi masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah mengacu kepada skala prioritas yang diperoleh dari hasil konsultasi Tim Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pihak terkait.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Renja-P Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

Pandan, 20 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HASUDUNGAN NAIK P. SAMOSIR, ST, MM
PEMBINA
NIP. 19730508 200502 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I P E N D A H U L U A N 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 37

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 42

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 43

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 57

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 59

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 59

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 61

3.3. Program dan Kegiatan 62

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 65

BAB V PENUTUP 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam setiap pelaksanaan Tahun Anggaran perlu disusun sebuah Rencana Kerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud pembangunan yang terencana. Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang harus sesuai dengan kemampuan sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati 20 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli tengah.

Sesuai dengan amanah yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalamm Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah adalah

1. Landasan Idiil :Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. LandasanOperasional :

1) Undang – Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tapanuli Tengah Tahun 2017 – 2022;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

14) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

15) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah

16) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

17) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Renstra

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip ***GOOD GOVERMENT.***

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan penganggaran tahunan yang disusun dengan sistimatika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi Lima BAB dirumuskan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, memuat *Latar Belakang* yang menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta keterkaitan tindak lanjutnya dengan proses penyusuna RAPBD, *Landasan Hukum,* yang menginformasikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, *maksud dan tujuan,* yang menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, dan *Sistematika penulisan,* yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II adalah Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang memuat Evaluasi Pelaksanaan *Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD,* yang berisikan informasi mengenai realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja; implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, *Analisa Kinerja Pelayanan PD,* yang berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan, *Isu-isu penting Penyelenggaraa Tugas dan Fungsi PD,* yang menguraikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD, permasalan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; dampaknyaa terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti; *Reviuw terhadao RKPD, yang berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Ranwal RKPD misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, yang menyajikan penjelasan tentang bagaimana usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Tengah.*

Bab III adalah tujuan dan sasaran yang memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, yang berisikan penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi PD, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, yang menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas an fungsi PD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, serta Program dan kegiatan, yang berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV adalah Penutup yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kinerja tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tabel Realisasi Kegiatan Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.493.173.954	4.399.749.599	97,92
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.778.000	19.720.000	99,71
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsinya	80.000.000	56.430.000	70,54
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
4	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.990.544	18.608.500	88,65
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.235.291	122.357.800	87,25
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.143.040	38.768.000	99,04
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.998.502	54.754.850	99,56
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.000.000	191.535.700	78,18
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
9	Pengadaan Mebel	52.575.164	49.800.000	94,72
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.979.320	109.450.000	96,03
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.639.611	80.400.000	97,29
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	25.000.000	100,00
13	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	11.822.750.000	11.791.726.334	99,74
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	652.851.669	637.422.400	97,64
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	119.000.000	118.301.170	99,41
16	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	60.000.000	53.930.000	89,88
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			
1	Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	218.002.031	199.236.600	91,39
2	Biaya Konsultan Pengawasan	100.000.000	98.900.000	98,90
3	Biaya Perencanaan untuk Kegiatan Kontruktual (ePaksi)	200.000.000	196.803.000	98,40
4	Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah	8.558.000	8.550.000	99,91
5	Fasilitasi Integrated Farticipatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)	387.895.722	337.151.400	86,92
6	Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai	700.000.000	699.472.500	99,92
7	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simulbas Kec. Sosorgadong	105.000.000	104.500.000	99,52
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muara Bolak Kec. Sosorgadong	850.000.000	823.944.000	96,93
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sihapas Kec. Sosorgadong	900.000.000	871.458.600	96,83
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simanosor Kec. Sibabangun	2.163.300.000	2.044.318.000	94,50
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simulbas Kec. Sosorgadong	550.000.000	533.296.700	96,96
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipalis Kec. Tapian Nauli	1.400.000.000	1.346.653.300	96,19
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
1	Penunjang kegiatan DAK Air Minum	114.999.768	95.025.900	82,63

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Dana Penunjang Kegiatan DAK Air Minum			
2	Jasa Konsultan Pengawas DAK Air Minum	260.774.000	236.985.000	90,88
3	Konsultan Perencanaan (e-Panet)	10.000.000	-	-
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.200.000	16.500.000	85,94
	Belanja Modal Jaringan Pembawa			
5	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut	2.500.000.000	2.419.857.400	96,79
6	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Aek Nadua Kecamatan Pasaribu Tobing	1.700.000.000	1.663.014.900	97,82
7	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Barambang Kec. Sosorgadong	1.800.000.000	1.723.371.600	95,74
8	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pasaribu Tobing Jae Kec. Sorkam Barat	2.300.000.000	2.260.011.100	98,26
9	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing	2.200.000.000	2.111.984.000	96,00
10	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Unte Mungkur I Kec. Kolang	2.250.000.000	2.127.820.300	94,57
11	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Nauli Kecamatan Sitahuis	1.700.000.000	1.637.000.400	96,29
12	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Kolang Nauli Kec. Kolang	800.000.000	779.625.500	97,45
13	Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Aek Tornasuksuk Desa Hutagurgur Kec. Sibabangun	199.000.000	198.350.000	99,67
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
1	Dana Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi	149.999.868	88.344.300	58,90
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.806.000	39.482.000	96,76
	Belanja Jasa Tenaga Ahli			
3	Honor Tenaga Fasilitator Lapangan	144.000.000	144.000.000	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Biaya Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	30.000.000	-	-
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000	24.900.000	69,17
	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya			
6	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Aek Bontar Kec. Tukka	496.000.000	496.000.000	100,00
7	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Ladang Tengah Kec. Andam Dewi	496.000.000	496.000.000	100,00
8	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Lumut Maju Kec. Lumut	496.000.000	496.000.000	100,00
9	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Makarti Nauli Kec. Kolang	496.000.000	496.000.000	100,00
10	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Pasaribu Tobing Kec. Pasaribu Tobing	496.000.000	496.000.000	100,00
11	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Sigambo-gambo Kec. Barus	496.000.000	496.000.000	100,00
12	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Simarpinggan Kec. Kolang	496.000.000	496.000.000	100,00
13	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Sipan Kec. Sarudik	496.000.000	496.000.000	100,00
14	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Sosor Gonting Kec. Andam Dewi	496.000.000	496.000.000	100,00
15	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Tapian Nauli III Kec. Tapian Nauli	496.000.000	496.000.000	100,00
16	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Kelurahan Aek Tolang Kec. Pandan	496.000.000	496.000.000	100,00
17	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Kelurahan Hajoran Kec. Pandan	496.000.000	496.000.000	100,00
18	Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Kelurahan Rina Bolak Kec. Andam Dewi	496.000.000	496.000.000	100,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Pembangunan Sistem Drainase			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perkotaan			
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	300.000.000	299.431.000	99,81
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBERIAN IZIN MMENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG			
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1	Dana Penunjang Kegiatan Penataan Bangunan Gedung	41.380.000	41.380.000	100,00
2	Pemeliharaan Rutin Alun-Alun Kota Pandan Kec. Pandan	199.998.664	198.530.450	99,27
3	Pemeliharaan Rutin GOR Barus Kec. Barus	49.999.721	49.865.400	99,73
4	Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Janji Maria Kec. Sukabangun	152.781.325	150.932.750	98,79
5	Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Tengah	220.000.000	219.999.600	100,00
6	Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap V	4.900.001.067	4.674.345.100	95,39
7	Biaya Konsultan Pengawas Bangunan Gedung	100.000.000	99.900.000	99,90
	Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga			
8	Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap IV	29.853.450	29.853.450	100,00
9	Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap IV	1.417.344.450	1.417.344.450	100,00
10	Pembangunan Kantor Lurah P.O. Manduamas Kec. Manduamas	48.717.900	48.717.900	100,00
11	Pembuatan DED Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	335.386.500	335.386.500	100,00
12	Pembangunan Gedung Aula Barak Denpom	200.000.000		-
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
13	Monitoring Pelaksanaan IMB di Kabupaten Tapanuli Tengah	49.999.526	47.386.450	94,77
14	Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium dan Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	171.431.249	171.213.950	99,87
15	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	78.409.355	50.320.650	64,18
16	Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2023	238.383.673	193.204.850	81,05
17	Pengawasan dan Pemanfaatan Pengendalian Ruang	85.317.980	45.571.450	53,41
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1	Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota	53.300.000	50.640.000	95,01
2	Pemeliharaan Rutin Jogging Track Kec. Pandan	300.119.762	299.543.250	99,81
3	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	123.360.018	121.119.200	98,18
4	Pemeliharaan Rutin Air Mancur	64.020.006	63.720.500	99,53
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala LPJU dan Lampu Hias	1.353.618.343	1.350.578.350	99,78
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	427.864.447	396.210.650	92,60
7	Pemeliharaan Rutin Gapura Perbatasan kabupaten	89.140.167	75.846.750	85,09
8	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) di Rayon Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah	204.159.949	201.804.500	98,85
9	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah	204.159.838	201.618.000	98,75
10	Pemeliharaan Lampu Hias Jalan F.L. Tobing dan Jalan Junjungan Lubis. Kec. Pandan	100.000.000	99.993.750	99,99

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Zainul Arifin Barus Kec. Barus	50.000.000	49.998.700	100,00
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA			
	Pembangunan Jalan			
1	Penunjang Program Penyelenggaraan	557.086.030	442.543.670	79,44
2	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	365.000.000	353.000.000	96,71
3	Jasa Konsultan Pengawas Jalan	210.000.000	139.976.550	66,66
4	Konsultan Perencanaan Jalan Tahun 2025	200.000.000	198.257.100	99,13
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000	41.550.000	83,10
6	Jasa Konsultan Pengawas JalanSumber Dana DBH TA. 2023	200.000.000	193.140.000	96,57
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000	24.000.000	96,00
8	Jasa Konsultan Pengawas Jalan Sumber Dana DBH TA. 2024	250.000.000	207.570.000	83,03
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000	23.250.000	77,50
10	Lanjutan Pembukaan Jalan dari Desa Satahi Nauli menuju Dusun Unte Mungkur Kec. Kolang	210.001.033	205.174.500	97,70
11	Lanjutan Pengaspalan Jalan Budi Luhur Kec. Pandan	400.000.000	391.970.550	97,99
12	Pembukaan Jalan Pondok Batu - BKKBN (TMMD)	1.115.999.787	1.114.044.150	99,82
13	Peningkatan Jalan Penghubung Trans SP.I-SP.II Kec. Kolang	5.000.000.000	4.915.981.500	98,32
14	Peningkatan Jalan Ruas Kolang - Hutatinggal Kec. Kolang	3.000.000.000	2.498.393.100	83,28
15	Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Sihiong Kec. Lumut	2.640.000.000	2.196.692.400	83,21
16	Peningkatan Jalan Ruas Manduamas Lama-Simanuk-manuk Kec. Manduamas	1.827.783.000	1.793.971.700	98,15
17	Peningkatan Jalan Ruas Raso-Partodungan Kec. Tapian Nauli	3.195.996.000	3.146.378.700	98,45
18	Peningkatan Ruas Jalan Sipange-AMD kalangan Kec. Tukka	6.858.139.000	5.654.200.000	82,45
19	Peningkatan Jalan Budi Luhur Kec. Pandan	410.575.400	404.823.364	98,60
	Rehabilitasi Jembatan			
20	Pemeliharaan Rutin Jembatan AL-Fansury Barus Kec. Barus	200.000.051	199.451.800	99,73
	Pembangunan Jembatan			
21	Jasa Konsultan Pengawas MK Jembatan	670.000.000	464.995.650	69,40

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	%
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000	22.350.000	22,35
23	Penggantian Jembatan Aek Simargarap Kec. Pasaribu Tobing	19.127.660.000	14.919.528.000	78,00
	Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga			
24	Pembangunan Jembatan Kualo Desa Pasar Tarandam Kec. Barus	42.427.800	42.427.800	100,00
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
25	Survey Kondisi Jalan	100.000.000	98.500.000	98,50
26	Survey Kondisi Jembatan	50.000.000	49.300.000	98,60
	Pemeliharaan Rutin Jalan			
27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	937.600.230	937.486.525	99,99
	TOTAL	107.669.666.205	98.709.925.512	91,68

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Tupoksi dan Kewenangan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Tugas Pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang Jalan dan Jembatan, Pengairan, Rawa dan Pantai, Tata ruang dan Pengendalian Perkotaan dan Pedesaan serta Pertamanan dan penerangan meliputi Perumusan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Tugas Pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang Jalan dan Jembatan , Pengairan, Rawa dan Pantai, Tata ruang dan Pengendalian Perkotaan dan Pedesaan serta Pertamanan dan penerangan meliputi Perumusan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian yang menjadi wenangan Daerah.

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tugas Pokoknya mempunyai fungsi antara lain :

a. melakukan survey dan perencanaan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai serta pentaan ruang dan pengendalian serta pertamanan dan penerangan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, bina marga, pengairan dan program;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, bina marga, pengairan dan program;
d. Menyelenggarakan penataan wilayah serta pengujian;
e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan dibidang jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta pembinaan teknis;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dengan tanggung jawab tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsinya yang antara lain:

a. melakukan survey dan perencanaan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai serta penataan ruang dan pengendalian serta pertamanan dan penerangan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, jalan dan jembatan, pengairan dan program;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, Jalan dan Jembatan dan pengairan;
d. Menyelenggarakan penataan wilayah seta pengujian;
e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan dibidang jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta pembinaan teknis;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini sebagai organisasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Kepala Bidang Pengairan, Rawa dan Pantai, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian. Bagian Sekretaris terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, Bidang Pengairan, Rawa dan Pantai terdiri dari 3 (tiga) Seksi, Bidang Tata Ruang dan Pengedalian terdiri 3 (tiga) seksi.

Kewenangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

"Menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta pembinaan teknis dan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, program pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian".

a. Permasalahan :
   - Banyaknya Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten yang rusak akibat minimnya anggaran
   - Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan kegiatan baik dari segi teknis maupun administrasi
   - Keterbatasan dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan
   - Keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan yang tepat waktu
   - Dalam hal pembebasan lahan tidak melibatkan seluruh stakeholder, sehingga pada waktu pelaksanaan kegiatan timbul penolakan dari masyarakat
   - Wawasan masyarakat tentang pembangunan masih rendah atau kurang, sehingga sering terjadi penolakan yang tidak mempunyai dasar

b. Solusi :
   - Dibutuhkan Anggaran yang mencukupi untuk perbaikan jalan yang rusak
   - Dibutuhkan diklat teknis maupun keuangan pada tingkat SDM pengelola kegiatan baik pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis, maupun pengawas

- Dibutuhkan pengadaan peralatan, terutama peralatan dalam hal menunjang pelaksanaan kegiatan (Kendaraan dinas bagi pelaksana kegiatan, Komputer, laptop, kamera, alat-alat survey, dan lainnya)
- Dibutuhkan diklat manajemen pengelolaan keuangan pada tingkatan pengelola keuangan (bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, dan bendahara penerimaan)
- Sosialisasi atas pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang meliputi pembuatan LAKIP, LPPD, LKPJ, IKK, sehingga diharapkan timbul kesadaran untuk koordinasi dengan bidang yang mengelola pelaporan dan evaluasi
- Sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya pembangunan dan akan manfaat pembangunan terhadap masyarakat
- Pelibatan seluruh stakeholder dalam hal pembangunan terutama dalam hal pembebasan lahan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang akan ditangani adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah serta belum optimalnya penataan dan pengembangan kota.
2. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi dalam rangka menunjang pergerakan arus barang dan jasa.
3. Kecenderungan penurunan kualitas dan tingkat pelayanan jalan/jembatan
4. Rawan banjir dan genangan air terutama kawasan perkotaan
5. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal
6. Angka kemiskinan masih tinggi
7. Perubahan iklim dan bencana alam
8. Pemenuhan LPJU di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang belum optimal.
9. Tertib pelaksanaan usaha jasa konstruksi
10. Kurangnya tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikasi dan terakreditasi.

2.4. Reviuw terhadap Rancangan RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya
2. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)**
   a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. **Program Penataan Bangunan Gedung**
   a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertiifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6. **Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**
   a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
7. **Program Penyelenggaraan Jalan**
   a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isyu - isu penting dari masing – masing yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah belum optimal.
d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
e. Peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.

2. Bidang Jalan dan Jembatan

a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.
b. Perlunya penanganan ruang terbuka hijau guna memenuhi kebutuhan paru-paru kota
c. Masih adanya titik lampu yang belum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

d. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan LPJU.

3. Bidang Pengairan Rawa dan Pantai

1. Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki
2. Jaringan Pelayanan Irigasi yang belum memadai
3. Keterbatasan dana Pengendalian banjir dan abrasi Pantai
4. Kejadian Bencana Alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun
5. Rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan illegal logging dan aktifitas perladangan berpindah

4. Bidang Tata Ruang dan Pengendalian

a. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
b. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif.

3.2. Telaah Visi Misi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

" Visi "

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah "Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan".

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
5. Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Misi Organisasi, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

1. Meningkatkan Sistem Jaringan Infrastruktur Jalan sesuai dengan kapasitas dan kelas jalan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi.
2. Meningkatkan kualitas jembatan.
3. Meningkatkan taman-taman kota sebagai penunjang keindahan.
4. Meningkatkan penerangan jalan untuk keamanan, kenyamanan dan keindahan di perkotaan dan Ibukota Kecamatan serta tempat-tempat wisata.
5. Meningkatkan Sistem Jaringan Irigasi.
6. Mewujudkan perencanaan kota yang berwawasan lingkungan.
7. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mengurus advice planning dan IMB.
8. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Tengah.
9. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
10. Melaksananan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dari tujuan diatas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondisi jalan dan Jembatan Kabupaten dalam keadaan baik.
2. Tersedianya alat berat dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang layak pakai.
3. Tersedianya taman di perkotaan sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang aman, nyaman indah dan bersih.
4. Meningkatnya Jangkauan LPJU di semua wilayah Kab. Tapanuli Tengah.
5. Terwujudnya pendistribusian air guna mengairi lahan pertanian dengan meningkatkan sistem jaringan irigasi.
6. Terwujudnya penataan kota sesuai dengan perencanaan kota.
7. Terwujudnya kualitas manajemen data dan perumusan kebijakan teknis penataan kota dalam sistem yang transparan, akuntabel dan implementatif.
8. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
9. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran aparatur.
10. Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.3. Telaah Visi Misi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

" Visi "

Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah "Membangun Tapanuli Tengah Adil Untuk Semua, Lestasi, dan Berkeadaban".

Misi

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.

Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkarakter berkualitas untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang cerdas dan berdaya saing, serta terampil dan inovatif. Hal ini akan dicapai melalui pembangunan pendidikan dan ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis digital, serta tenaga pendidik yang berkualitas.

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani.

   Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, di mana seluruh masyarakat dari seluruh golongan dapat merasakannya. Peningkatan akses kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis teknologi, serta dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.

   Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi.

   Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Darah juga akan dibenahi lebih baik lagi agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai sumber dana untuk membiayai keperluan pembangunan daerah
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban.

   Meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui implementasi sistem pemerintahan yang berbasis teknologi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang samas. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga akan meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.

   Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama

7. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi / bendungan, serta berbagai sarana – prasarana pendukungnya.

   Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat
8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip peembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

   Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah secara optimal dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar sehingga menjaga kebersihan dari lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi

   Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh desa sehingga seluruh masyarakat dapat merasakannya. Masyarakat desa diberdayakan sehingga memiliki keterampilan yang baik dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya.

3.4. Program dan Kegiatan

8. Program dan Kegiatan

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya
2. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)**
   a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. **Program Pengembangan Permukiman**
   a. Penyelenggaraan Infratruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
5. **Program Penataan Bangunan Gedung**
   a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertiifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6. **Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**

a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penyelenggaraan Jalan

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

8. Program Penyelengaraan Penataan Ruang

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. *Terlampir*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 disusun melalui berbagai tahapan sesuai Peratura Menteri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunannya, diperhatikan prinsip-prinsip yang menjamin keserasian, efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana yang tersedia. Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat tercapai dengan merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dan secara umum dapat mengakomodir kebutuhan daerah hinterland Kabupaten Tapanuli Tengah dalam usaha pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 20 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HASUDUNGAN NAIK P. SAMOSIR, ST, MM
PEMBINA
NIP. 19730508 200502 1 002

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RANHIR P-RENJA) TAHUN 2025

: TAPANULI TENGAH
: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN
SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	
3	4	5	4	6	7	8	9	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					**19.463.125.510,00**	**18.601.881.387,00**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	4.510.636.750,00	4.510.636.750,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	19.709.160,00	19.709.160,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	20.988.768,00	20.988.768,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	132.232.413,00	63.064.650,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	36.884.190,00	16.883.100,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	54.999.612,00	21.109.980,00	
Penyelenggaran Rapat dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	235.000.000,00	215.500.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	DPUPR	1 Paket	1 Paket	52.319.698,00	52.319.698,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	191.800.230,00	191.800.230,00	
Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan / Atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	DPUPR	1 Unit		601.360.482,00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	24.995.600,00	24.995.600,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	12.285.130.756,00	12.269.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	646.920.000,00	606.225.600,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN
SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	
3	4	5	4	6	7	8	9	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	143.000.000,00	151.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	377.317.571,00	308.317.571,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	49.830.280,00	49.830.280,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**6.119.223.958,00**	**1.658.658.324,00**	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**6.119.223.958,00**	**1.658.658.324,00**	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	**Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**					**6.119.223.958,00**	**1.658.658.324,00**	
Fasilitasi Integrated Farticipatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)	Fasilitasi Integrated Farticipatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)	Terlaksananya Fasilitasi Integrated Farticipatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	378.978.800,00	273.200.000,00	
Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai	Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	500.000.000,00	500.000.000,00	
Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	293.504.158,00	135.458.324,00	
Konsultan Perencanaan Irigasi	Konsultan Perencanaan Irigasi	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Unte Mungkur III/Pangasean Kec. Kolang		Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kolang	1 kegiatan		1.700.000.000,00	-	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tumba Kec. Manduamas		Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Manduamas	1 kegiatan		2.761.941.000,00	-	
Desain Perencanaan Untuk ePaksi		Tersedianya Desain Perencanaan Untuk ePaksi	Kab. Tapteng	1 kegiatan		184.800.000,00	-	
Konsultan Pengawasan DAK Irigasi		Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Dak Irigasi	Kab. Tapteng	1 kegiatan		50.000.000,00	-	
	Normalisasi Sungai Aek Tolang Kec. Pandan	Terlaksananya Normalisasi Sungai	Kab. Tapteng		1 kegiatan		500.000.000,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						**200.000.000,00**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						**200.000.000,00**	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						**200.000.000,00**	
	Pembangunan Sanitasi di Kelurahan Lubuk Tukko Kec. Pandan	Terlaksananya Pembangunan Sanitasi	Kab. Tapteng		1 kegiatan		200.000.000,00	Pembangunan Sanitasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**200.000.000,00**	**850.000.000,00**	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**200.000.000,00**	**850.000.000,00**	
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	**Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan**					**200.000.000,00**	**850.000.000,00**	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Tapteng	1 kegiatan		200.000.000,00	-	
	Pemeliharaan Drainase Kota Pandan Kec. Pandan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pandan		1 kegiatan		500.000.000,00	Mengurangi kawasan genangan banjir

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN
SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	
3	4	5	4	6	7	8	9	12
	Pemeliharaan Drainase di Kecamatan Sarudik	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Sarudik		1 kegiatan		350.000.000,00	Mengurangi kawasan genangan banjir
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					**2.834.622.496,00**	**4.993.117.866,00**	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**					**2.834.622.496,00**	**4.993.117.866,00**	
Penataan Bangunan dan Lingkungan	**Penataan Bangunan dan Lingkungan**					**2.834.622.496,00**	**4.993.117.866,00**	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	457.864.447,00	390.364.336,00	
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	123.359.746,00	123.352.137,00	
Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten	Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten	Terlaksananya Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	89.140.167,00	209.328.167,00	
Pemeliharaan Rutin Air Mancur	Pemeliharaan Rutin Air Mancur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Air Mancur	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	64.020.006,00	64.019.895,00	
Pemeliharaaan Rutin Jogging Track Kec. Pandan	Pemeliharaaan Rutin Jogging Track Kec. Pandan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Air Mancur	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000,00	293.520.699,00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU	Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU	Terlaksanya Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	1.288.618.343,00	1.230.852.632,00	
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Barus di Kab. Tapanuli Tengah		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kab. Tapteng	1 kegiatan		204.159.949,00		
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kab. Tapteng	1 kegiatan		204.159.838,00		
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Barus di Kab. Tapanuli Tengah		Kab. Tapteng		1 kegiatan		1.192.400.000,00	Meningkatkan Penerangan Jalan Umum
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah		Kab. Tapteng		1 kegiatan		1.192.400.000,00	Meningkatkan Penerangan Jalan Umum
Pemeliharaan Lampu Hias Jalan F.L. Tobing dan Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan	Pemeliharaan Lampu Hias Jalan F.L. Tobing dan Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	
Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Zainul Arifin Barus Kec. Barus	Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Zainul Arifin Barus Kec. Barus	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias	Barus	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	
Penunjang Kegiatan Bangunan dan Lingkungannya	Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan Lingkungannya	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	53.300.000,00	46.880.000,00	
	Database Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Tapanuli Tengah	Tersedianya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan Lingkungannya	Kab. Tapteng		1 kegiatan		100.000.000,00	Tersedianya Database LPJU
Program Penataan Bangunan Gedung	**Program Penataan Bangunan Gedung**					**20.549.286.626,00**	**1.724.797.687,00**	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**					**20.549.286.626,00**	**1.724.797.687,00**	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota**					**19.128.866.884,00**	**543.039.770,00**	
Pemeliharaan Rutin Alun-alun Kota Pandan Kec. Pandan	Pemeliharaan Rutin Alun-alun Kota Pandan Kec. Pandan / Taman Sahata Saoloan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Alun-alun Pandan	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	199.999.997,00	199.999.886,00	
Pemeliharaan Rutin Gor Barus Barus Kec. Barus	Pemeliharaan Rutin Gor Barus Barus Kec. Barus	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gor Barus	Barus	1 kegiatan	1 kegiatan	49.999.884,00	49.999.884,00	
Dana Penunjang Kegiatan Penataan Bangunan Gedung	Dana Penunjang Kegiatan Penataan Bangunan Gedung	Tersedianya Dana Penunjang	Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	61.820.000,00	43.040.000,00	
Rehab Rumah Dinas Bupati Tapanuli Tengah		Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas	Pandan	1 kegiatan		2.000.001.413,00	-	

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN
SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	
3	4	5	4	6	7	8	9	12
Rehab Pagar Kantor Camat Pinangsori Kec. Pinangsori		Terlaksananya Rehab Pagar Kantor	Pinangsori	1 kegiatan		199.999.886,00	-	
Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap VI		Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Pandan	1 kegiatan		16.000.000.000,00	-	
Rehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR) Pandan Kec. Pandan		Terlaksananya Rehabilitasi Gedung	Pandan	1 kegiatan		500.000.000,00	-	
Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah	Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Dinas	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	117.045.704,00	50.000.000,00	
	Evaluasi Kelayakan Struktur Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Dinas	Pandan		1 kegiatan		200.000.000,00	Evaluasi Kelayanakn Struktur bangunan kantor induk
Penyelenggaraan Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPH), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	**Penyelenggaraan Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPH), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG**					**1.420.419.742,00**	**1.181.757.917,00**	
Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033	Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033	Terlaksananya Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	635.579.307,00	399.513.468,00	
Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan	Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan	Terlaksananya Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	352.622.767,00	-	
	Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan, Tukka dan Sarudik		Kab. Tapteng		1 kegiatan		520.613.350,00	
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	104.999.743,00	28.457.143,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	129.409.244,00	24.865.130,00	
Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Tersedianya Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	147.808.711,00	208.308.826,00	
Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah		Tersedianya Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Tapteng	1 kegiatan		49.999.970,00	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**37.489.039.210,00**	**19.931.156.691,00**	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**					**37.489.039.210,00**	**19.931.156.691,00**	
Pembangunan Jalan	**Pembangunan Jalan**					**34.213.048.978,00**	**15.151.990.841,00**	
Peningkatan Jalan Ruas Sorkam - Watas Taput Kec. Pasaribu Tobing		Terlaksananya Peningkatan Jalan	Pasaribu Tobing	1 kegiatan	1 kegiatan	19.482.568.000,00	-	
Konsultan Pengawas DAK Jalan		Terlaksananya Pengawasan Kegiatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	308.650.000,00	-	
Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Terlaksananya Perjalanan Dinas	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	72.000.000,00	-	
Konsultan Perencanaan Jalan Tahun 2026	Konsultan Perencanaan Jalan Tahun 2026	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Penunjang Program Penyelenggaraan Jalan	Penunjang Program Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Dana Penunjang Jalan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	451.476.094,00	113.513.035,00	
Pembangunan Jalan Desa Binjohara Baru Kec. Manduamas	Pembangunan Jalan Desa Binjohara Baru Kec. Manduamas	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Manduamas	1 kegiatan	1 kegiatan	700.000.000,00	-	
Peningkatan Jalan Ruas Pondok Batu - BKKBN Kec. Sarudik	Peningkatan Jalan Ruas Pondok Batu - BKKBN Kec. Sarudik	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Sarudik	1 kegiatan	1 kegiatan	1.800.000.000,00	-	
Peningkatan Jalan Keliling Kota Pandan Kec. Pandan	Peningkatan Jalan Keliling Kota Pandan Kec. Pandan	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000.000,00	1.302.184.563,00	
Peningkatan Jalan Ruas Hutanabolon - Watas Taput Kec. Tukka	Peningkatan Jalan Ruas Hutanabolon - Watas Taput Kec. Tukka	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tukka	1 kegiatan	1 kegiatan	1.021.947.000,00	1.021.947.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN
SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	
3	4	5	4	6	7	8	9	12
Peningkatan Jalan Ruas Raso - Partodungan Kec. Tapian Nauli	Peningkatan Jalan Ruas Raso - Partodungan Kec. Tapian Nauli	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tapian Nauli	1 kegiatan	1 kegiatan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
Kegiatan Penunjang DBH sawit	Kegiatan Penunjang DBH sawit							
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						60.000.000,00	
Jasa Konsultan Pengawas Jalan	Jasa Konsultan Pengawas Jalan	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	
Peningkatan Jalan menuju SD Negeri Barambang Kec. Sosorgadong	Peningkatan Jalan menuju SD Negeri Barambang Kec. Sosorgadong	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Sosorgadong	1 kegiatan	1 kegiatan	1.010.342.067,00	-	
Peningkatan jalan menuju SMP 3 Tukka/SMA 2 Tukka Kec. Tukka	Peningkatan jalan menuju SMP 3 Tukka/SMA 2 Tukka Kec. Tukka	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tukka	1 kegiatan	1 kegiatan	1.117.047.000,00	1.117.047.000,00	
Peningkatan Jalan Ruas Sipange - KM. 14 Kec. Tukka	Peningkatan Jalan Ruas Sipange - KM. 14 Kec. Tukka	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tukka	1 kegiatan	1 kegiatan	982.000.000,00	-	
Peningkatan Jalan Pargarutan Kec. Sorkam	Peningkatan Jalan Pargarutan Kec. Sorkam	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Sorkam	1 kegiatan	1 kegiatan	350.000.000,00	-	
Peningkatan jalan Ruas Mela - Aloban Bair Kec. Tapian Nauli	Peningkatan jalan Ruas Mela - Aloban Bair Kec. Tapian Nauli	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tapian Nauli	1 kegiatan	1 kegiatan	881.018.817,00	878.334.793,00	
Peningkatan Jalan menuju TPA Aek Nabobar Kec. Pinangsori	Peningkatan Jalan menuju TPA Aek Nabobar Kec. Pinangsori	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Pinangsori	1 kegiatan		1.000.000.000,00	-	
	Peningkatan Jalan Ruas Sorkam - Simargarap Kec. Pasaribu Tobing	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Pasaribu Tobing	1 kegiatan	1 kegiatan		5.000.000.000,00	
	DED Pembangunan Jembatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pembuatan DED Jembatan	Kab. Tapteng		1 kegiatan		700.000.000,00	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jembatan
	Pembukaan Jalan Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun menuju Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut (TMMD)						1.000.000.000,00	Meningkatan Akses Transportasi masyarakat
	Hutang Belanja Tahun 2024							
	Jasa Konsultan Pengawas Jalan	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Kab. Tapteng		1 kegiatan		59.989.950,00	Hutang Belanja Tahun 2024
	Jasa Konsultan Pengawas JalanSumber Dana DBH TA. 2024	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Kab. Tapteng		1 kegiatan		36.630.000,00	Hutang Belanja Tahun 2024
	Peningkatan Jalan Ruas Kolang - Hutatinggal Kec. Kolang	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Kolang		1 kegiatan		440.892.900,00	Hutang Belanja Tahun 2024
	Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Sihiong Kec. Lumut	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Lumut		1 kegiatan		387.651.600,00	Hutang Belanja Tahun 2024
	Peningkatan Ruas Jalan Sipange-AMD kalangan Kec. Tukka	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Tukka		1 kegiatan		997.800.000,00	Hutang Belanja Tahun 2024
Pembangunan Jembatan	**Rehabilitasi Jembatan**					-	**3.929.165.850,00**	
	Hutang Belanja Tahun 2024							
	Jasa Konsultan Pengawas MK Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Barus	1 kegiatan	1 kegiatan	-	199.283.950,00	Hutang Belanja Tahun 2024
	Penggantian Jembatan Aek Simargarap Kec. Pasaribu Tobing	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Pinangsori	1 kegiatan	1 kegiatan	-	3.729.882.000,00	Hutang Belanja Tahun 2024
Rehabilitasi Jembatan	**Rehabilitasi Jembatan**					**2.290.999.700,00**	-	
Pemeliharaan Rutin Jembatan Al-Fansury Barus Kec. Barus	Pemeliharaan Rutin Jembatan Al-Fansury Barus Kec. Barus	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Barus	1 kegiatan	1 kegiatan	199.999.886,00	-	
Rehabilitasi Jembatan Gantung Parjalihotan Baru Kec. Pinangsori	Rehabilitasi Jembatan Gantung Parjalihotan Baru Kec. Pinangsori	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Pinangsori	1 kegiatan	1 kegiatan	690.999.882,00	-	
Rehabilitasi Jembatan menuju SMK Negeri Sarudik Kec. Sarudik	Rehabilitasi Jembatan menuju SMK Negeri Sarudik Kec. Sarudik	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Sarudik	1 kegiatan	1 kegiatan	350.000.552,00	-	
Rehabilitasi Jembatan menuju Perumahan Matahari Kec. Pandan	Rehabilitasi Jembatan menuju Perumahan Matahari Kec. Pandan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	349.999.775,00	-	
Rehabilitasi Jembatan Aek Busuk Desa Lobutua Kec. Andam Dewi	Rehabilitasi Jembatan Aek Busuk Desa Lobutua Kec. Andam Dewi	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Andam Dewi	1 kegiatan	1 kegiatan	299.999.720,00	-	
Rehabilitasi Jembatan Huraba Kec. Tukka	Rehabilitasi Jembatan Huraba Kec. Tukka	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Tukka	1 kegiatan	1 kegiatan	399.999.885,00	-	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	**Survey Kondisi Jalan/Jembatan**					**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
Survey Kondisi Jembatan	Survey Kondisi Jembatan	Terlaksananya Survey Kondisi Jembatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN
SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	
3	4	5	4	6	7	8	9	12
Survey Kondisi Jalan	Survey Koncisi Jalan	Terlaksananya Kondisi Jalan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	300.000.000,00	300.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)		ALASAN PERUBAHAN
SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	
3	4	5	4	6	7	8	9	12
Pemeliharaan Rutin Jalan	**Pemeliharaan Rutin Jalan**					**634.990.532,00**	**500.000.000,00**	
Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	634.990.532,00	500.000.000,00	
Total						**86.655.297.800,00**	**47.959.611.955,00**	

Pandan, 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HASUDUNGAN NAIK P. SAMOSIR, ST, MM
PEMBINA
NIP. 19780508 200502 1 002

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RANHIR P-RENJA) TAHUN 2025

KABUPATEN/KOTA : TAPANULI TENGAH
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE					URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)				ALASAN PERUBAHAN
						SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	APBD 2025	Perubahan APBD 2025	
1					2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					19.463.125.510,00	18.601.881.387,00	19.463.125.510,00	18.601.881.387,00	
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	4.510.636.750,00	4.510.636.750,00	4.510.636.750,00	4.510.636.750,00	
1	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	03	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	19.709.160,00	19.709.160,00	19.709.160,00	19.709.160,00	
1	03	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
1	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	03	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	20.988.768,00	20.988.768,00	20.988.768,00	20.988.768,00	
1	03	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	132.232.413,00	63.064.650,00	132.232.413,00	63.064.650,00	
1	03	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	36.884.190,00	16.883.100,00	36.884.190,00	16.883.100,00	
1	03	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPUPR	1 Paket	1 Paket	54.999.612,00	21.109.980,00	54.999.612,00	21.109.980,00	
1	03	01	2.06	0009		Penyelenggaran Rapat dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	235.000.000,00	215.500.000,00	235.000.000,00	215.500.000,00	
1	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	03	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	DPUPR	1 Paket	1 Paket	52.319.698,00	52.319.698,00	52.319.698,00	52.319.698,00	
1	03	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	191.800.230,00	191.800.230,00	191.800.230,00	191.800.230,00	
						Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan / Atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	DPUPR	1 Unit		601.360.482,00	-	601.360.482,00	-	
1	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	03	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	24.995.600,00	24.995.600,00	24.995.600,00	24.995.600,00	
1	03	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	12.285.130.756,00	12.269.500.000,00	12.285.130.756,00	12.269.500.000,00	
1	03	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	646.920.000,00	606.225.600,00	646.920.000,00	606.225.600,00	
1	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	03	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	143.000.000,00	151.000.000,00	143.000.000,00	151.000.000,00	
1	03	01	2.09	0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	377.317.571,00	308.317.571,00	377.317.571,00	308.317.571,00	
1	03	01	2.09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DPUPR	12 Bulan	12 Bulan	49.830.280,00	49.830.280,00	49.830.280,00	49.830.280,00	

KODE					URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)				ALASAN PERUBAHAN
						SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	APBD 2025	Perubahan APBD 2025	
1					2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					6.119.223.958,00	1.658.658.324,00	6.119.223.958,00	1.658.658.324,00	
1	03	02	2.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					6.119.223.958,00	1.658.658.324,00	6.119.223.958,00	1.658.658.324,00	
1	03	02	2.02	0002		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					6.119.223.958,00	1.658.658.324,00	6.119.223.958,00	1.658.658.324,00	
						Fasilitasi Integrated Farticipatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)	Fasilitasi Integrated Farticipatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)	Terlaksananya Fasilitasi Integrated Farticipatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	378.978.800,00	273.200.000,00	378.978.800,00	273.200.000,00	
						Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai	Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
						Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	293.504.158,00	135.458.324,00	293.504.158,00	135.458.324,00	
						Konsultan Perencanaan Irigasi	Konsultan Perencanaan Irigasi	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Unte Mungkur III/Pangasean Kec. Kolang		Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kolang	1 kegiatan		1.700.000.000,00	-	1.700.000.000,00	-	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tumba Kec. Manduamas		Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Manduamas	1 kegiatan		2.761.941.000,00	-	2.761.941.000,00	-	
						Desain Perencanaan Untuk ePaksi		Tersedianya Desain Perencanaan Untuk ePaksi	Kab. Tapteng	1 kegiatan		184.800.000,00	-	184.800.000,00	-	
						Konsultan Pengawasan DAK Irigasi		Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Dak Irigasi	Kab. Tapteng	1 kegiatan		50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
							Normalisasi Sungai Aek Tolang Kec. Pandan	Terlaksananya Normalisasi Sungai	Kab. Tapteng		1 kegiatan		500.000.000,00		500.000.000,00	
1	03	05					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						200.000.000,00		200.000.000,00	
1	03	05	2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00		200.000.000,00	
1	03	05	2.01	0022			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						200.000.000,00		200.000.000,00	
							Pembangunan Sanitasi di Kelurahan Lubuk Tukko Kec. Pandan	Terlaksananya Pembangunan Sanitasi	Kab. Tapteng		1 kegiatan		200.000.000,00		200.000.000,00	Pembanguan Sanitasi
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					200.000.000,00	850.000.000,00	200.000.000,00	850.000.000,00	
1	03	06	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000,00	850.000.000,00	200.000.000,00	850.000.000,00	
1	03	06	2.01	0005		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					200.000.000,00	850.000.000,00	200.000.000,00	850.000.000,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Tapteng	1 kegiatan		200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
							Pemeliharaan Drainase Kota Pandan Kec. Pandan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pandan		1 kegiatan		500.000.000,00		500.000.000,00	Mengurangi kawasan genangan banjir
							Pemeliharaan Drainase di Kecamatan Sarudik	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Sarudik		1 kegiatan		350.000.000,00		350.000.000,00	Mengurangi kawasan genangan banjir
1	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.834.622.496,00	4.993.117.866,00	2.834.622.496,00	4.993.117.866,00	
1	03	09	2.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					2.834.622.496,00	4.993.117.866,00	2.834.622.496,00	4.993.117.866,00	
1	03	09	2.01	0007		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan					2.834.622.496,00	4.993.117.866,00	2.834.622.496,00	4.993.117.866,00	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	457.864.447,00	390.364.336,00	457.864.447,00	390.364.336,00	
						Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	123.359.746,00	123.352.137,00	123.359.746,00	123.352.137,00	
						Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten	Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten	Terlaksananya Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	89.140.167,00	209.328.167,00	89.140.167,00	209.328.167,00	
						Pemeliharaan Rutin Air Mancur	Pemeliharaan Rutin Air Mancur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Air Mancur	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	64.020.006,00	64.019.895,00	64.020.006,00	64.019.895,00	
						Pemeliharaan Rutin Jogging Track Kec. Pandan	Pemeliharaan Rutin Jogging Track Kec. Pandan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Air Mancur	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000,00	293.520.699,00	200.000.000,00	293.520.699,00	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU	Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU	Terlaksanya Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	1.288.618.343,00	1.230.852.632,00	1.288.618.343,00	1.230.852.632,00	

KODE					URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)				ALASAN PERUBAHAN
						SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	APBD 2025	Perubahan APBD 2025	
1					2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12
						Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Barus di Kab. Tapanuli Tengah		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kab. Tapteng	1 kegiatan		204.159.949,00		204.159.949,00		
						Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kab. Tapteng	1 kegiatan		204.159.838,00		204.159.838,00		
							Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Barus di Kab. Tapanuli Tengah		Kab. Tapteng		1 kegiatan		1.192.400.000,00		1.192.400.000,00	Meningkatkan Penerangan Jalan Umum
							Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah		Kab. Tapteng		1 kegiatan		1.192.400.000,00		1.192.400.000,00	Meningkatkan Penerangan Jalan Umum
						Pemeliharaan Lampu Hias Jalan F.L. Tobing dan Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan	Pemeliharaan Lampu Hias Jalan F.L. Tobing dan Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
						Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Zainul Arifin Barus Kec. Barus	Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Zainul Arifin Barus Kec. Barus	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias	Barus	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
						Penunjang Kegiatan Bangunan dan Lingkungannya	Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan Lingkungannya	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	53.300.000,00	46.880.000,00	53.300.000,00	46.880.000,00	
							Database Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Tapanuli Tengah	Tersedianya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan Lingkungannya	Kab. Tapteng		1 kegiatan		100.000.000,00		100.000.000,00	Tersedianya Database LPJU
1	03	08				**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Program Penataan Bangunan Gedung**					**20.549.286.626,00**	**1.724.797.687,00**	**20.549.286.626,00**	**1.724.797.687,00**	
1	03	08	2.01			**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**					**20.549.286.626,00**	**1.724.797.687,00**	**20.549.286.626,00**	**1.724.797.687,00**	
1	03	08	2.01	0021		**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota**	**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota**					**19.128.866.884,00**	**543.039.770,00**	**19.128.866.884,00**	**543.039.770,00**	
						Pemeliharaan Rutin Alun-alun Kota Pandan Kec. Pandan	Pemeliharaan Rutin Alun-alun Kota Pandan Kec. Pandan / Taman Sahata Saoloan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Alun-alun Pandan	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	199.999.997,00	199.999.886,00	199.999.997,00	199.999.886,00	
						Pemeliharaan Rutin Gor Barus Barus Kec. Barus	Pemeliharaan Rutin Gor Barus Barus Kec. Barus	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gor Barus	Barus	1 kegiatan	1 kegiatan	49.999.884,00	49.999.884,00	49.999.884,00	49.999.884,00	
						Dana Penunjang Kegiatan Penataan Bangunan Gedung	Dana Penunjang Kegiatan Penataan Bangunan Gedung	Tersedianya Dana Penunjang	Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	61.820.000,00	43.040.000,00	61.820.000,00	43.040.000,00	
						Rehab Rumah Dinas Bupati Tapanuli Tengah		Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas	Pandan	1 kegiatan		2.000.001.413,00	-	2.000.001.413,00	-	
						Rehab Pagar Kantor Camat Pinangsori Kec. Pinangsori		Terlaksananya Rehab Pagar Kantor	Pinangsori	1 kegiatan		199.999.886,00	-	199.999.886,00	-	
						Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab Tapanuli Tengah Tahap VI		Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Pandan	1 kegiatan		16.000.000.000,00	-	16.000.000.000,00	-	
						Rehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR) Pandan Kec. Pandan		Terlaksananya Rehabilitasi Gedung	Pandan	1 kegiatan		500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
						Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah	Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Dinas	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	117.045.704,00	50.000.000,00	117.045.704,00	50.000.000,00	
							Evaluasi Kelayakan Struktur Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Dinas	Pandan		1 kegiatan		200.000.000,00		200.000.000,00	Evaluasi Kelayanakn Struktur bangunan kantor induk
1	03	08	2.01	0023		**Penyelenggaraan Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPH), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG**	**Penyelenggaraan Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPH), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG**					**1.420.419.742,00**	**1.181.757.917,00**	**1.420.419.742,00**	**1.181.757.917,00**	
						Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033	Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033	Terlaksananya Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	635.579.307,00	399.513.468,00	635.579.307,00	399.513.468,00	
						Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan	Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan	Terlaksananya Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	352.622.767,00	-	352.622.767,00	-	
							Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan, Tukka dan Sarudik		Kab. Tapteng		1 kegiatan		520.613.350,00		520.613.350,00	
						Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	104.999.743,00	28.457.143,00	104.999.743,00	28.457.143,00	

KODE					URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)				ALASAN PERUBAHAN
						SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	APBD 2025	Perubahan APBD 2025	
1					2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	129.409.244,00	24.865.130,00	129.409.244,00	24.865.130,00	
						Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Tersedianya Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	147.808.711,00	208.308.826,00	147.808.711,00	208.308.826,00	
						Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah		Tersedianya Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Tapteng	1 kegiatan		49.999.970,00	-	49.999.970,00	-	
1	03	10				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**37.489.039.210,00**	**19.931.156.691,00**	**37.489.039.210,00**	**19.931.156.691,00**	
1	03	10	2.01			**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**					**37.489.039.210,00**	**19.931.156.691,00**	**37.489.039.210,00**	**19.931.156.691,00**	
1	03	10	2.01	0032		**Pembangunan Jalan**	**Pembangunan Jalan**					**34.213.048.978,00**	**15.151.990.841,00**	**34.213.048.978,00**	**15.151.990.841,00**	
						Peningkatan Jalan Ruas Sorkam - Watas Taput Kec. Pasaribu Tobing		Terlaksananya Peningkatan Jalan	Pasaribu Tobing	1 kegiatan	1 kegiatan	19.482.568.000,00	-	19.482.568.000,00	-	
						Konsultan Pengawas DAK Jalan		Terlaksananya Pengawasan Kegiatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	308.650.000,00	-	308.650.000,00	-	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Terlaksananya Perjalanan Dinas	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-	
						Konsultan Perencanaan Jalan Tahun 2026	Konsultan Perencanaan Jalan Tahun 2026	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
						Penunjang Program Penyelenggaraan Jalan	Penunjang Program Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Dana Penunjang Jalan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	451.476.094,00	113.513.035,00	451.476.094,00	113.513.035,00	
						Pembangunan Jalan Desa Binjohara Baru Kec. Manduamas	Pembangunan Jalan Desa Binjohara Baru Kec. Manduamas	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Manduamas	1 kegiatan	1 kegiatan	700.000.000,00	-	700.000.000,00	-	
						Peningkatan Jalan Ruas Pondok Batu - BKKBN Kec. Sarudik	Peningkatan Jalan Ruas Pondok Batu - BKKBN Kec. Sarudik	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Sarudik	1 kegiatan	1 kegiatan	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	-	
						Peningkatan Jalan Kelliling Kota Pandan Kec. Pandan	Peningkatan Jalan Kelliling Kota Pandan Kec. Pandan	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	3.000.000.000,00	1.302.184.563,00	3.000.000.000,00	1.302.184.563,00	
						Peningkatan Jalan Ruas Hutanabolon - Watas Taput Kec. Tukka	Peningkatan Jalan Ruas Hutanabolon - Watas Taput Kec. Tukka	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tukka	1 kegiatan	1 kegiatan	1.021.947.000,00	1.021.947.000,00	1.021.947.000,00	1.021.947.000,00	
						Peningkatan Jalan Ruas Raso - Partodungan Kec. Tapian Nauli	Peningkatan Jalan Ruas Raso - Partodungan Kec. Tapian Nauli	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tapian Nauli	1 kegiatan	1 kegiatan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
						Kegiatan Penunjang DBH sawit	Kegiatan Penunjang DBH sawit									
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa						60.000.000,00		60.000.000,00	
						Jasa Konsultan Pengawas Jalan	Jasa Konsultan Pengawas Jalan	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
						Peningkatan Jalan menuju SD Negeri Barambang Kec. Sosorgadong	Peningkatan Jalan menuju SD Negeri Barambang Kec. Sosorgadong	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Sosorgadong	1 kegiatan	1 kegiatan	1.010.342.067,00	-	1.010.342.067,00	-	
						Peningkatan jalan menuju SMP 3 Tukka/SMA 2 Tukka Kec. Tukka	Peningkatan jalan menuju SMP 3 Tukka/SMA 2 Tukka Kec. Tukka	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tukka	1 kegiatan	1 kegiatan	1.117.047.000,00	1.117.047.000,00	1.117.047.000,00	1.117.047.000,00	
						Peningkatan Jalan Ruas Sipange - KM. 14 Kec. Tukka	Peningkatan Jalan Ruas Sipange - KM. 14 Kec. Tukka	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tukka	1 kegiatan	1 kegiatan	982.000.000,00	-	982.000.000,00	-	
						Peningkatan Jalan Pargarutan Kec. Sorkam	Peningkatan Jalan Pargarutan Kec. Sorkam	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Sorkam	1 kegiatan	1 kegiatan	350.000.000,00	-	350.000.000,00	-	
						Peningkatan Jalan Ruas Mela - Aloban Bair Kec. Tapian Nauli	Peningkatan Jalan Ruas Mela - Aloban Bair Kec. Tapian Nauli	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Tapian Nauli	1 kegiatan	1 kegiatan	881.018.817,00	878.334.793,00	881.018.817,00	878.334.793,00	
						Peningkatan Jalan menuju TPA Aek Nabobar Kec. Pinangsori	Peningkatan Jalan menuju TPA Aek Nabobar Kec. Pinangsori	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Pinangsori	1 kegiatan		1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	
							Peningkatan Jalan Ruas Sorkam - Simargarap Kec. Pasaribu Tobing	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Pasaribu Tobing	1 kegiatan	1 kegiatan		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
							DED Pembangunan Jembatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	Terlaksananya Pembuatan DED Jembatan	Kab. Tapteng		1 kegiatan		700.000.000,00		700.000.000,00	Tersedianya Dokumen Pemcanaan Jembatan
							Pembukaan Jalan Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun menuju Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut (TMMD)						1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	Meningkatan Akses Transportasi masyarakat
							Hutang Belanja Tahun 2024									
							Jasa Konsultan Pengawas Jalan	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Kab. Tapteng		1 kegiatan		59.989.950,00		59.989.950,00	Hutang Belanja Tahun 2024
							Jasa Konsultan Pengawas JalanSumber Dana DBH TA. 2024	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Kab. Tapteng		1 kegiatan		36.630.000,00		36.630.000,00	Hutang Belanja Tahun 2024
							Peningkatan Jalan Ruas Kolang - Hutatinggal Kec. Kolang	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Kolang		1 kegiatan		440.892.900,00		440.892.900,00	Hutang Belanja Tahun 2024
							Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Sihiong Kec. Lumut	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Lumut		1 kegiatan		387.651.600,00		387.651.600,00	Hutang Belanja Tahun 2024
							Peningkatan Ruas Jalan Sipange-AMD kalangan Kec. Tukka	Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Tukka		1 kegiatan		997.800.000,00		997.800.000,00	Hutang Belanja Tahun 2024
1	03	10	2.01	0039		**Pembangunan Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**					-	**3.929.165.850,00**	-	**3.929.165.850,00**	
							Hutang Belanja Tahun 2024									
							Jasa Konsultan Pengawas MK Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Barus	1 kegiatan	1 kegiatan	-	199.283.850,00	-	199.283.850,00	Hutang Belanja Tahun 2024

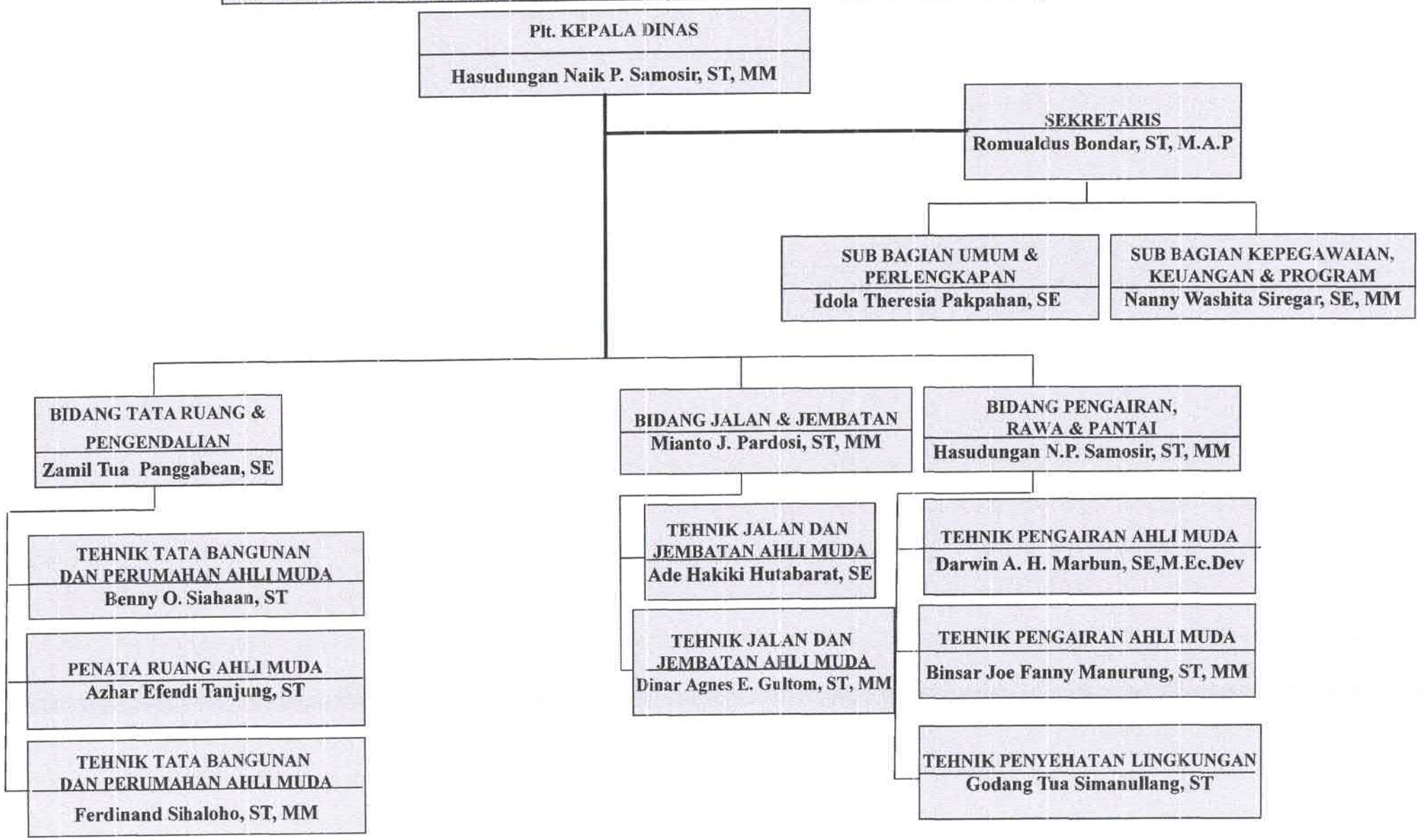
KODE					URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			PAGU (Rp.)				ALASAN PERUBAHAN
						SEBELUM	MENJADI		Lokasi	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	RENJA 2025	Perubahan RENJA 2025	APBD 2025	Perubahan APBD 2025	
1					2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12
							Penggantian Jembatan Aek Simargarap Kec. Pasaribu Tobing	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Pinangsori	1 kegiatan	1 kegiatan	-	3.729.882.000,00	-	3.729.882.000,00	Hutang Belanja Tahun 2024
1	03	10	2.01	0039		**Rehabilitasi Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**					**2.290.999.700,00**	-	**2.290.999.700,00**	-	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan Al-Fansury Barus Kec. Barus	Pemeliharaan Rutin Jembatan Al-Fansury Barus Kec. Barus	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Barus	1 kegiatan	1 kegiatan	199.999.886,00	-	199.999.886,00	-	
						Rehabilitasi Jembatan Gantung Parjalihotan Baru Kec. Pinangsori	Rehabilitasi Jembatan Gantung Parjalihotan Baru Kec. Pinangsori	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Pinangsori	1 kegiatan	1 kegiatan	690.999.882,00	-	690.999.882,00	-	
						Rehabilitasi Jembatan menuju SMK Negeri Sarudik Kec. Sarudik	Rehabilitasi Jembatan menuju SMK Negeri Sarudik Kec. Sarudik	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Sarudik	1 kegiatan	1 kegiatan	350.000.552,00	-	350.000.552,00	-	
						Rehabilitasi Jembatan menuju Perumahan Matahari Kec. Pandan	Rehabilitasi Jembatan menuju Perumahan Matahari Kec. Pandan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Pandan	1 kegiatan	1 kegiatan	349.999.775,00	-	349.999.775,00	-	
						Rehabilitasi Jembatan Aek Busuk Desa Lobutua Kec. Andam Dewi	Rehabilitasi Jembatan Aek Busuk Desa Lobutua Kec. Andam Dewi	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Andam Dewi	1 kegiatan	1 kegiatan	299.999.720,00	-	299.999.720,00	-	
						Rehabilitasi Jembatan Huraba Kec. Tukka	Rehabilitasi Jembatan Huraba Kec. Tukka	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Tukka	1 kegiatan	1 kegiatan	399.999.885,00	-	399.999.885,00	-	
1	03	10	2.01	0043		**Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**Survey Kondisi Jalan/Jembatan**					**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
						Survey Kondisi Jembatan	Survey Kondisi Jembatan	Terlaksananya Survey Kondisi Jembatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
						Survey Kondisi Jalan	Survey Kondisi Jalan	Terlaksananya Kondisi Jalan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
1	03	10	2.01	0045		**Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**					**634.990.532,00**	**500.000.000,00**	**634.990.532,00**	**500.000.000,00**	
						Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan	Kab. Tapteng	1 kegiatan	1 kegiatan	634.990.532,00	500.000.000,00	634.990.532,00	500.000.000,00	
						Total						**86.655.297.600,00**	**47.959.611.955,00**	**86.655.297.600,00**	**47.959.611.955,00**	

Pandan, 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HASUDUNGAN NAIK R. SAMOSIR, ST, MM
PEMBINA
NIP. 197305082005021002

BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN
Jl. DR. FL. Tobing No. 05 Pandan 22611
Provinsi Sumatera Utara

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

UPTD RSUD PANDAN TAHUN 2025


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KARS

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/668/XII/2022

Diberikan Kepada

RS Umum Daerah Pandan

Alamat : Jl. Dr. FL. Tobing No. 05 Pandan
Provinsi Sumatera Utara

★★★★★

Tingkat Kelulusan

Paripurna

Berlaku : 21-12-2022 - 11-12-2026

Jakarta, 02-01-2023

Mengetahui,



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA yang memuat program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) ini masih terdapat kekurangan. Sehingga masukan dan saran yang mendukung sangat diharapkan guna peningkatan kualitas Rencana Perubahan Renja UPTD RSUD Pandan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode selanjutnya. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 20 Mei 2025

Plt. DIREKTUR UPTD RSUD PANDAN

dr. FADLI SYAHPUTRA, Sp.A
PEMBINA TK.I
NIP. 19730918 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Maksud dan Tujuan 4
D. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 18
D. Review terhadap Rencana Kerja RKPD/ Renstra OPD 21
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 29
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 30
C. Program dan Kegiatan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian..... 38
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 38
C. Rencana Tindak Lanjut 39

Daftar Tabel

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025 13
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan RKPD tahun 2025 22
Tabel T-C.32 Perubahan Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 26
Tabel T-C.33 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 32
Tabel Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025 36

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan perubahan dari rencana kerja adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh masing masing perangkat daerah.

Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Proses penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD mengacu pada Kerangka Arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara Simultan/ Paralel dengan penyusunan RKPD, dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan pada Renja OPD disusun berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu, selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada usulan program UPTD RSUD Pandan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan adalah Dokumen perencanaan Tahunan UPTD RSUD Pandan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Rencana Kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah dituangkan dalam RPJMD untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan Tugas dan Fugsinya berpedoman pada Visi, Misi, dan Motto yang telah ditetapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah maka mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini adalah sebagai panduan dalam menyusun dan merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) program dan kegiatan tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah mendiskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh UPTD RSUD Pandan serta untuk memperjelas arah pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Tahun Anggaran 2024, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

B. Tujuan dan sasaran Renja OPD

C. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan untuk mencapai upaya pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh UPTD RSUD Pandan pada tahun sebelumnya, dimana 3 Program dengan 7 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dibayarkan dengan dana APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan dana DAK APBN Tahun Anggaran 2024 serta 1 Kegiatan dan Sub Kegiatan dibayarkan dengan dana BLUD RSUD Pandan.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan (TW) I Tahun Anggaran 2025 di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan berdasarkan capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

A.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Program ini mencakup pengadaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di UPTD RSUD Pandan yaitu laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program ini masih belum ada realisasi dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.878.541,-.

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang bertujuan untuk memenuhi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Program ini mencakup pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai ASN UPTD RSUD Pandan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi Program ini sebesar Rp. 4.872.912.540,- atau 26,29% dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.535.605.850,-.

(3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang bertujuan untuk memenuhi belanja perjalanan dinas dalam negeri. Program ini mencakup perencanaan dan penganggaran biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam negeri. Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 183.500.000,-.

(4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang bertujuan untuk pengadaan mebeleur di Rumah Sakit yaitu berupa pelaksanaan kegiatan penambahan daya listrik di UPTD RSUD Pandan. Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang bertujuan untuk pembayaran gaji *cleaning service* dan pembayaran air, listrik, internet. Rincian sub kegiatan ini adalah berupa pembayaran honorarium petugas kebersihan OB yang menjamin kebersihan rumah sakit serta pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan iuran jaminan kematian (JKM) bagi pegawai non ASN di UPTD RSUD Pandan. Realisasi Program ini sebesar Rp. 135.000.000,- atau 22,48% dari pagu anggaran sebesar Rp. 600.480.000,-.

(5) Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD memiliki sub kegiatan yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit kepada masyarakat. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit ini diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Pendapatan rumah sakit yang dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut.

Banyak kegiatan BLUD ini yang juga merupakan program dari Bupati Tapanuli Tengah, salah satunya adalah belanja pegawai (pemberian jasa pelayanan), belanja barang dan jasa (pengadaan alat kesehatan), belanja peralatan dan mesin serta pemeliharaan rumah sakit di RSUD Pandan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal untuk pasien yang rawat inap dan rawat jalan di UPTD RSUD Pandan.

Kegiatan lainnya adalah pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit. Pengelolaan obat dirumah sakit sudah dilakukan dengan metode berbasis komputer E-katalog, dengan metode ini akan mempermudah dan memurahkan pembelian obat, sehingga dana yang dimiliki UPTD RSUD Pandan akan digunakan tepat sasaran dan ekonomis. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) RSUD adalah sebesar Rp. 10.992.148.512,- atau 30,53% dari pagu anggaran sebesar Rp. 36.000.000.000,-.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD ini terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Administrasi Umum
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
   - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Penyediaan Makanan dan Minuman
   - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

- Pemelihraaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - Pendidikan dan Pelatihan Formal
3. Penyelesaian Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Makanan dan Minuman
   - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
   - Pemelihraaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
   - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
   - Pengadaan Obat
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
   - Operasional Pelayanan Rumah Sakit

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
   - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
   - Pengadaan Obat
   - Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
   - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
   - Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit
   - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

A.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

(1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berisikan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

(1.a) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, dimana sub kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pembangunan rumah sakit dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yaitu pengadaan alat komunikasi internal/ antar ruangan berupa *Nursecall* serta kegiatan pembangunan gedung CVCU, pembangunan ruang *Cytotoxic Drug Cabinet*, pengembangan sarana NICU, rehabilitasi ruang rawat inap & ruang intensif, yaitu yang terdiri dari biaya jasa konsultasi perencanaan, konsultasi pengawasan dan pembangunan fisik. Selain itu rincian dari sub kegiatan ini juga berupa pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa, honorarium bendahara pengeluaran, honorarium kuasa pengguna barang, honorarium pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK SKPD). Program ini masih belum ada realisasi dan pagu anggaran sebesar Rp. 5.520.119.700,-.

(1.b) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dimana sub kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun sebagai pendukung pelayanan berupa kegiatan pembuatan bangunan parkir di UPTD RTSUD Pandan yaitu pemasangan/ pengadaan *Paving Block*, yang terdiri dari biaya perencanaan, pengawasan dan penganggaran pemasangan *Paving Block* di UPTD RSUD Pandan tahun 2025. Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 699.671.000,-.

(1.c) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dimana sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di lingkungan UPTD RSUD Pandan. Kegiatan ini mencakup biaya belanja modal pengadaan alat kedokteran dan kesehatan radiodiagnostic yaitu berupa pengadaan alat kesehatan Digital Radiography System (X-Ray Stationary). Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-.

A.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

(1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar merupakan usaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis bermutu untuk melengkapi dokter-dokter menetap (ASN) yang telah ada di UPTD RSUD Pandan, dimana dokter spesialis yang dimaksud seperti spesialis bedah urologi, spesialis anak, spesialis anestesi, spesialis bedah mulut, spesialis bedah onkologi, spesialis jantung, spesialis kesehatan jiwa, spesialis mata, spesialis obgyn, spesialis paru, spesialis patologi anatomi, spesialis penyakit dalam, spesialis radiologi, spesialis rehabilitasi medik, spesialis syaraf, spesialis THT. Penyediaan dokter spesialis ini agar seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak lagi harus keluar dari wilayah tapanuli tengah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Untuk insentif semua dokter spesialis tersebut telah dibuat Peraturan Bupati tentang Insentif para Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Tenaga Medis lainnya yang masih berstatus Non PNS. Selain itu rincian dari sub kegiatan ini juga berupa pembayaran insentif apoteker, honorarium tenaga ahli lainnya (perawat, bidan, penunjang), fisikawan medis, petugas proteksi radiasi (PPR) dan petugas IT. Realisasi Program ini sebesar Rp. 1.623.600.000,- atau 18,20% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.923.200.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ini merupakan usaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berupa Penyediaan Insentif bagi Tenaga Medis dan Paramedis di RSUD Pandan. Implementasi pelaksanaan program ini dilaksanakan pada kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (Penyediaan Insentif Dokter Spesialis kontrak/ non ASN, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Pegawai Non PNS). Realisasi ini untuk pembayaran jasa :

- Dokter Bedah Urologi (1 orang)
- Dokter Spesialis Anak (2 orang)

- Dokter Spesialis Anastesi (1 orang)
- Dokter Spesialis Bedah Mulut (1 orang)
- Dokter Spesialis Bedah Onkologi (1 orang)
- Dokter Spesialis Jantung (2 orang)
- Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (1 orang)
- Dokter Spesialis Mata (1 orang)
- Dokter Spesialis Obgyn (1 orang)
- Dokter Spesialis Paru (1 orang)
- Dokter Spesialis Patologi Anatomi (1 orang)
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam (1 orang)
- Dokter Spesialis Radiologi (1 orang)
- Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (1 orang)
- Dokter Spesialis Syaraf (2 orang)
- Dokter Spesialis THT (1 orang)
- Dokter Umum (9 orang)
- Fisikawan Medis (2 orang)
- Apoteker (2 orang)
- Petugas IT (5 orang), dan
- Tenaga Medis Lainnya, seperti Perawat, Bidan, Analis, Radiografer, Elektromedik, dan Tenaga Administrasi (240 orang)

Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.29
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota
Renja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=7÷12		14 = 14/6 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bidang : Kesehatan																						
		RSUD Pandan Kab.Tapanuli Tengah																						
	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**			**60.856.910.830**		**60.813.923.489**		**58.324.464.391**		**16.000.061.052**								**16.000.061.052**		**71.324.525.443**			RSUD PANDAN
	1 02 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**5.366.395**		**3.812.000**		**4.878.541**		-													
	1 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5.366.395	78%	3.812.000		4.878.541		-							0%	-	0%	4.878.541	0%	0,91	
	1 02 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**20.389.166.435**		**18.168.126.589**		**18.535.605.850**		**4.872.912.540**													
	1 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	20.389.166.435	98%	18.168.126.589		18.535.605.850	26%	4.872.912.540							26%	4.872.912.540	13%	23.408.518.390	13%	1,15	
	1 02 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**201.850.000**		**126.906.999**		**183.500.000**		-													
	1 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	201.850.000	69%	126.906.999		183.500.000	0%	-							0%	-	0%	183.500.000	0%	0,91	
	1 02 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**3.300.000.000**		-		**3.000.000.000**		-													
	1 02 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	3.300.000.000	0%	-		3.000.000.000		-													
	1 02 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**660.528.000**		**557.702.824**		**600.480.000**		**135.000.000**													
	1 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	660.528.000	93%	557.702.824		600.480.000	22%	135.000.000							22%	135.000.000	11%	735.480.000	11%	1,11	
	1 02 01 2 10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**			**39.600.000.000**		**42.088.094.076**		**36.000.000.000**		**10.992.148.512**													
	1 02 01 2 10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	39.600.000.000	117%	42.088.094.076		36.000.000.000	31%	10.992.148.512							31%	10.992.148.512	15%	46.992.148.512	15%	1,19	
	1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**10.691.769.770**		**2.140.790.121**		**9.719.790.700**		-								-		**9.719.790.700**			RSUD PANDAN
	1 02 02 2 01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**10.691.769.770**		**2.140.790.121**		**9.719.790.700**		-													
	1 02 02 2 01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100%	6.072.131.670	1%	39.421.650		5.520.119.700	0%	-							0%	-	0%	5.520.119.700	0%	0,91	
	1 02 02 2 01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatn Lainnya	100%	769.638.100	0%	-		699.671.000	0%	-							0%	-	0%	699.671.000	0%	0,91	
	1 02 02 2 01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mediuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	3.850.000.000	60%	2.101.368.471		3.500.000.000	0%	-							0%	-	0%	3.500.000.000	0%	0,91	
	1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**9.815.520.000**		**6.626.203.605**		**8.923.200.000**		**1.623.600.000**								**1.623.600.000**		**10.546.800.000**			RSUD PANDAN
	1 02 03 2 02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota**			**9.815.520.000**		**6.626.203.605**		**8.923.200.000**		**1.623.600.000**													
	1 02 03 2 02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100%	9.815.520.000	74%	6.626.203.605		8.923.200.000	18%	1.623.600.000							18%	1.623.600.000	9%	10.546.800.000	9%	1,07	
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)							**76.967.455.091**	**23%**	**17.623.661.052**													
									Predikat Kinerja		**Sangat Rendah**													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Fasilitas Bangunan untuk pelaksanaan Operasional dan Pengelolaan Keuangan RS yang sudah BLUD

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya sarana dan prasarana kerja, dan Jumlah SDM yang berkualitas sesuai standar akreditasi rs.

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan pekerjaan

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pengusulan pemenuhan sarana dan Prasarana yang kurang

B. Analisis Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Pandan

UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Tugas pokok UPTD RSUD Pandan adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit dan pelaksanaan perujukan.

UPTD RSUD Pandan juga telah menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan kinerja pelayanan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pandan Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

Tabel T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2027 (n+2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
A.	Rawat Inap :											
	1 Av LOS (6-9 hr)	(6-9 hr)		8 hari	8 hari	8 hari	8 hari	7 hari	4 hari	8 hari	8 hari	Pelayanan di RSUD Pandan
	2 TOI (1-3 hr)	(1-3 hr)		2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	4 hari	3 hari	1 hari	1 hari	
	3 BTO (40-50 kali)	(40-50 kali)		45 kali	50 kali	50 kali	50 kali	40 kali	55 kali	50 kali	50 kali	
	4 GDR (45%)	(45%)		45%	45%	45%	45%	45%	37%	45%	45%	
	5 BOR (60-85%)	(60-85%)		75%	80%	80%	85%	55%	61%	80%	80%	
	6 NDR (25%)	(25%)		25%	25%	25%	25%	25%	18%	25%	25%	
B.	Rawat Jalan :											
	1 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis (100%)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2 Ketersediaan Pelayanan Medik Spesialis Dasar (Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan)	4 ply		4 ply	4 ply	4 ply	4 ply	4 ply	4 ply	4 ply	4 ply	
	3 Ketersediaan Pelayanan Medik Spesialis Lain (Saraf, Kulit & Kelamin, Jantung Mata, THT, Paru, Jiwa, Orthopedi, Urologi, Bedah Saraf, Bedah Plastik, Bedah Onkologi, Radiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Anastesi, Forensik)	ada		7 ply	7 ply	7 ply	9 ply	9 ply	7 ply	7 ply	9 ply	

	4	Jam buka pelayanan (08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00)	(08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja; kecuali Jumat : 08.00 - 11.00)		08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00	08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00	08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00	08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00	08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00	08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00	08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00	08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00	
	5	Waktu tunggu di rawat jalan (≤ 60 menit)	(≤ 60 menit)		≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	
	6	Kepuasan Pelanggan (≥ 90 %)	(≥ 90 %)		≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	
	7	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB (≥ 60 %)	(≥ 60 %)		≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS (≥ 60 %)	(≥ 60 %)		≥ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	≥ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	≤ 60 %	
C.	Gawat Darurat												
	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa (100%)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat (24 jam)	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
	3	Ketersediaan tim penanggulangan bencana (1 tim)	1 Tim		1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	
	4	Kepuasan Pelanggan (≥ 70 %)	≥ 70 %		≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	
	5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat (≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang)	≤ 5 mnt terlayani		≤ 5 mnt terlayani	≤ 5 mnt terlayani	≤ 5 mnt terlayani	≤ 5 mnt terlayani	≤ 5 mnt terlayani	≤ 5 mnt terlayani	≤ 5 mnt terlayani	≤ 5 mnt terlayani	
	6	Kematian pasien (< 24 Jam) (≤ dua per seribu/ pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	setelah pasien datang ≤2/1000		setelah pasien datang ≤2/1000	setelah pasien datang ≤2/1000	setelah pasien datang ≤2/1000	setelah pasien datang ≤2/1000	setelah pasien datang ≤2/1000	setelah pasien datang ≤2/1000	setelah pasien datang ≤2/1000	setelah pasien datang ≤2/1000	
	7	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka (100%)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1	Pely. Medik dasar : 13 dokter umum	12 dokter umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Pely.medik gigi mulut : 3 dokter gigi umum	3 dokter gigi umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	3	Pely. Medik spesialis dasar : 4 dokter spesialis untuk tiap jenis pely medik spesialis dasar	2 dokter spesialis untuk tiap jenis pely medik spesialis dasar		67%	100%	100%	100%	88%	100%	100%	100%	
	4	Pely.medik spesialis penunjang : 1 dokter spesialis untuk tiap jenis pelayanan	1 dokter spesialis untuk tiap jenis pelayanan		50%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5	Pely.medik spesialis lain: 1 dokter spesialis tiap jenis pelayanan	1 dokter spesialis tiap jenis pelayanan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	6	Pely.medik subspesialis: 1 dokter subspesialis	1 dokter subspesialis		0	0	100%	100%	0	0	100%	100%	
	7	Pely. Medik spesialis gigi mulut :1 dokter gigi spesialis	1 dokter gigi spesialis		0	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	
	8	SDM RS :			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Keperawatan (perawat dan bidan = 2:3)											
		- Kefarmasian											
		- Gizi											
		- Keterapian fisik											
		- Keteknisan medis											
		- Petugas rekam medis											
		- Petugas IPSRS											
		- Petugas pengelola limbah											
		- Petugas Pengelola Air Bersih											
		- Pemulasaran											
		- Pengelola gas medik											
		- Penangulangan Kebakaran											
		- Petugas Linen											
	1	Tersedia 32 sarana dan prasana	32		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Jumlah Tempat Tidur : ≥ 120	≥ 100		100 TT	≥ 100	≥ 100	≥ 100	120 TT	120 TT	120 TT	120 TT	

Dari tabel T-C.30 tersebut, dapat dilihat Indikator kinerja yang tercapai targetnya hampir semua indikator, Persentase indikator rawat inap yaitu BOR, LOS, TOI, TOI, GDR, NDR semua masih belum dalam kisaran standard nasional, tetapi walaupun demikian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan tetap sesuai standar. Untuk indikator rawat jalan mulai dari jumlah SDM kesehatan hingga waktu tanggap layanan yang sudah sesuai standar, begitu juga dengan gawat darurat, kefarmasian, keperawatan semuanya sudah sesuai standar, dengan kata lain bisa dinyatakan bahwa target pencapaian indikator SPM di rumah sakit umum daerah pandan bisa dikatakan sudah mencapai target standar nasional.

Faktor yang mempengaruhi capaian dari beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target, antara lain ;

1) Keterbatasan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
2) Beberapa sarana gedung pelayanan dan peralatan kesehatan yang belum memadai dalam mendukung pelayanan publik

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPTD RSUD Pandan

UPTD RSUD Pandan merupakan Rumah Sakit Kelas C dan salah satu Rumah Sakit rujukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, UPTD RSUD Pandan juga telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD yang artinya dinilai mampu untuk melakukan pengelolaan PAD yang diterima melalui pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata melainkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah, UPTD RSUD Pandan memiliki visi :

" **Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dan Berkarakter untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sehat** "

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi UPTD RSUD Pandan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain :

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fasilitas dan pelayanan yang disediakan di UPTD RSUD Pandan
2. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Tapanuli Tengah pada Penduduk Pendatang, baik dari luar Kab. Tapanuli Tengah maupun Warga Asing
3. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi layanan tentang Jenis layanan apa saja yang tersedia dan fasilitas pelayanan yang didapatkan di RSUD Pandan
4. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan, khususnya untuk penduduk di wilayah ujung selatan Kecamatan Sukabangun, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kepulauan, Kecamatan Sorkam, Pasaribu Tobing, dan Manduamas;

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan kesehatan masyarakat senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :

- Faktor Internal :
  1. Faktor Kekuatan (strengths)
     a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
     b. Tersedianya UU dan peraturan pendukung tentang Rumah Sakit dan pelayanannya;
     c. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima;
     d. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

2. Faktor Kelemahan (weakness),
   a. Budaya kerja yang masih lemah;
   b. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;
   c. Belum maksimalnya pelaksanaan tahapan/proses perencanaan
   d. Belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan

➢ Faktor eksternal :

1. Faktor Peluang (opportunities)
   a. Adanya dukungan anggaran dari pusat melalui pendanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Reguler bidang Kesehatan;
   b. Adanya perkembangan teknologi IT dalam pelayanan pengurusan administasi pelayanan di rumah sakit;
   c. Melakukan pemutakhiran database pasien berbasis komputer, sehingga tidak bekerja secara maksimal.
2. Faktor Ancaman/Tantangan (threats)
   a. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
   b. Banyaknya rumah sakit swasta yang bermunculan yang menawarkan layanan kesehatan yang sama dengan RSUD Pandan.

Strategi yang dilaksanakan RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun yang akan direncanakan adalah mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang ter-akreditasi;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan rumah sakit standar BLUD;
3. Terselenggaranya tenaga profesional berbasis kompetensi;
4. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang optimum untuk melayani.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

D. Review Terhadap Rancangan RKPD

Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja 2024 perlu melakukan sinkronisasi dengan perubahan RKPD Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Program dan kegiatan yang terdapat di perubahan RKPD di jadikan pedoman dalam pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat. Review terhadap rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja UPTD RSUD Pandan. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nama Perangkat Daerah : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	UPTD RSUD Pandan			**80.674.153.002**	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	UPTD RSUD Pandan		
1.02	**Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan**					**Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan**			
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**				**58.236.214.191**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**4.878.541**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	4.878.541	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**18.535.605.650**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18.535.605.650	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**95.250.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	95.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**3.000.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	3.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**600.480.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	600.480.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
	Peningkatan Pelayanan Umum BLUD				**36.000.000.000**	**Peningkatan Pelayanan Umum BLUD**			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	36.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	UPTD RSUD Pandan			**13.518.313.611**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				**13.518.313.611**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100%	8.020.119.700	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100%
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	699.671.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	4.798.522.911	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				**8.919.625.200**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**			

	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				**8.919.625.200**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota**			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100%	8.919.625.200	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100%

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditujukan kepada Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan rujukan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2024 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tidak ada program/ kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Pandan. Hal ini mengingat bahwa Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32.

Tabel T.C.32
Perubahan Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD)
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2025

OPD : UPTD RSUD Pandan

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025		Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)
				Sebelum	Sesudah						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Angka Kematian Bayi Persentase kegiatan rutin dan operasional RSUD Pandan yang terlaksana			**58.324.464.391**	**58.236.214.391**				**64.168.000.000**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			**4.878.541**	**4.878.541**				**5.400.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	UPTD RSUD Pandan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.878.541	4.878.541	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.400.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya Gaji ASN			**18.535.605.850**	**18.535.605.850**				**20.400.000.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	UPTD RSUD Pandan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/ bulan	144 Orang/ bulan	18.535.605.850	18.535.605.850	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.400.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			**183.500.000**	**95.250.000**				**202.000.000**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD RSUD Pandan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	183.500.000	95.250.000	- 88.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		202.000.000

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Mebeleur di Rumah Sakit			**3.000.000.000**	**3.000.000.000**				**3.300.000.000**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD RSUD Pandan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	100%	3.000.000.000	3.000.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN		3.300.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Terbayarkannya Gaji Cleaning Service dan Terlaksananya Pembayaran Air, Listrik, Internet			**600.480.000**	**600.480.000**				**660.600.000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD RSUD Pandan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	600.480.000	600.480.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		660.600.000
6	Peningkatan Pelayanan BLUD		Terlaksananya Operasional RSUD			**36.000.000.000**	**36.000.000.000**				**39.600.000.000**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPTD RSUD Pandan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	100%	36.000.000.000	36.000.000.000	-	BLUD		39.600.000.000
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			**9.719.790.700**	**13.516.313.611**				**4.686.200.000**
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Anak Balita Tersedianya Sarana dan Prasarana di RSUD			**9.719.790.700**	**13.516.313.611**	3.796.522.911			**4.686.200.000**
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	1 Unit	5.520.119.700	8.020.119.700	2.500.000.000	- DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN - DAK Fisik		66.200.000
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD RSUD Pandan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	100%	699.671.000	699.671.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN		770.000.000

	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	UPTD RSUD Pandan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 Unit	2 Unit	3.500.000.000	4.796.522.911	1.296.522.911	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.850.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rasio dokter per satuan penduduk Persentase Insentif dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya dan Gaji Non ASN yang terbayarkan			**8.923.200.000**	**8.919.625.200**				**9.900.000.000**
1	Perencanaan Kebutuhan & Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Cakupan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang memenuhi jumlah & jenis sebagaimana diatur dalam permenkes No. 43 Tahun 2019 Terbayarkannya Insentif dan Gaji Non ASN			**8.923.200.000**	**8.919.625.200**				**9.900.000.000**
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	UPTD RSUD Pandan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	280 Orang	280 Orang	8.923.200.000	8.919.625.200	- 3.574.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN		9.900.000.000

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelaahan RPJPDdaerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaanjangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2025-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2025-2029 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia kedepan.

Kementrian Kesehatan RI dalam RPJM 2025-2045 telah menentukan strateginya yang terurai dalam lima point yaitu :

1. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi,
2. Percepatan perbaikan gisi masyarakat,
3. Peningkatan pengendalian penyakit,
4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas),
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Dari kelima strategi tersebut yang lebih cocok dengan pelayanan Rumah Sakit adalah strategi kelima yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, RSUD Pandan adalah pelayanan kesehatan rujukan yang merupakan satu-satunya rumah sakit umum milik daerah di Tapanuli Tengah, karenanya untuk memfasilitasi seluruh masyarakat Tapanuli Tengah, sarana dan prasarana pada RSUD Pandan terus diperbaiki, agar mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja UPTD RSUD Pandan

1. Tujuan

Pengoptimalan kualitas layanan kesehatan UPTD RSUD Pandan didukung oleh tujuan dan sasaran Renja RSUD Pandan. Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan dari Renja UPTD RSUD Pandan :

a. Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang ter-akreditasi;
b. Terwujudnya pengelolaan keuangan rumah sakit standar BLUD;
c. Terselenggaranya tenaga profesional berbasis kompetensi;
d. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang optimum untuk melayani

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai untuk dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam jangka waktu tahunan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

Untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan diperlukan Strategi Pencapaian, antara lain :

a. Menjadikan faktor kesehatan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, Pembangunan yang sasarannya adalah kesehatan
b. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip good governance secara transparan dan memenuhi standar akun tabilitas kinerja.
c. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional.

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel T.C.33
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
UPTD RSUD Pandan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan

Kode	Urusan/ BidangUrusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Setelah Perubahan	
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**4.878.541**				**4.878.541**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	UPTD RSUD Pandan	1 Dokumen	4.878.541	APBD	1 Tahun	1 Dokumen	4.878.541
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**18.535.605.850**				**18.535.605.850**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	UPTD RSUD Pandan	144 orang/ bulan	18.535.605.850	APBD	1 Tahun	144 orang/ bulan	18.535.605.850
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**183.500.000**				**95.250.000**
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD RSUD Pandan	1 Dokumen	183.500.000	APBD	1 Tahun	1 Dokumen	95.250.000
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD RSUD Pandan	100%	3.000.000.000	APBD	1 Tahun	100%	3.000.000.000
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**600.480.000**				**600.480.000**
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD RSUD Pandan	1 Dokumen	600.480.000	APBD	1 Tahun	1 Dokumen	600.480.000

1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**					**36.000.000.000**				**36.000.000.000**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPTD RSUD Pandan	100%	36.000.000.000	BLUD	1 Tahun	100%	36.000.000.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**									
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**9.719.790.700**				**13.516.313.611**
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	UPTD RSUD Pandan	1 Unit	5.520.119.700	APBD	1 Tahun	1 Unit	8.020.119.700
1.02.02.2.01.08	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD RSUD Pandan	100%	699.671.000	APBD, DAK	1 Tahun	100%	699.671.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mediuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan	UPTD RSUD Pandan	1 Unit	3.500.000.000	APBD	1 Tahun	2 Unit	4.796.522.911
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**									
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**					**8.923.200.000**				**8.919.625.200**
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	UPTD RSUD Pandan	280 orang/ bulan	8.923.200.000	APBD	1 Tahun	280 orang/ bulan	8.919.625.200
TOTAL						**73.967.455.091**				**77.672.153.202**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD RSUD Pandan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Pandan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Pandan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD RSUD Pandan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang,memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, BLUD, DAK dan sumber pendanaan lainnya).

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Tahun Anggaran 2025 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Maka, dengan disusunnya Perubahan Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi

dan feed-back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan UPTD RSUD Pandan untuk Tahun Anggaran 2025.

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai sasaran khusus yang terpadu dan dilaksanakan oleh bidang-bidang organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan landasan penetapan kerja. Rencana Kerja dan Pendanaan/ Anggaran UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD PANDAN

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
RSUD PANDAN																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 66.250.520.091	Rp. 10.716.935.000			Rp. 76.967.455.091	Rp. 67.457.218.202	Rp. 13.216.935.000			Rp. 80.674.153.202	Rp. 78.754.200.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp. 66.250.520.091	Rp. 10.716.935.000			Rp. 76.967.455.091	Rp. 67.457.218.202	Rp. 13.216.935.000			Rp. 80.674.153.202	Rp. 78.754.200.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 57.324.464.391	Rp. 1.000.000.000			Rp. 58.324.464.391	Rp. 57.236.214.391	Rp. 1.000.000.000			Rp. 58.236.214.391	Rp. 64.168.000.000,00
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 4.878.541				Rp. 4.878.541	Rp. 4.878.541				Rp. 4.878.541	Rp. 5.400.000,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan		Rp. 4.878.541				Rp. 4.878.541	Rp. 4.878.541				Rp. 4.878.541	Rp. 5.400.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 18.535.605.850				Rp. 18.535.605.850	Rp. 18.535.605.850				Rp. 18.535.605.850	Rp. 20.400.000.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan		Rp. 18.535.605.850				Rp. 18.535.605.850	Rp. 18.535.605.850				Rp. 18.535.605.850	Rp. 20.400.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 183.500.000				Rp. 183.500.000	Rp. 95.250.000				Rp. 95.250.000	Rp. 202.000.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Semua Kel/Desa - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan		Rp. 183.500.000				Rp. 183.500.000	Rp. 95.250.000				Rp. 95.250.000	Rp. 202.000.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 3.000.000.000				Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.000.000.000				Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.300.000.000,00
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan		Rp. 3.000.000.000				Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.000.000.000				Rp. 3.000.000.000	Rp. 3.300.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 600.480.000				Rp. 600.480.000	Rp. 600.480.000				Rp. 600.480.000	Rp. 660.600.000,00
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan		Rp. 600.480.000				Rp. 600.480.000	Rp. 600.480.000				Rp. 600.480.000	Rp. 660.600.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp. 35.000.000.000	Rp. 1.000.000.000			Rp. 36.000.000.000	Rp. 35.000.000.000	Rp. 1.000.000.000			Rp. 36.000.000.000	Rp. 39.600.000.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Pendapatan dari BLUD	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan		Rp. 35.000.000.000	Rp. 1.000.000.000			Rp. 36.000.000.000	Rp. 35.000.000.000	Rp. 1.000.000.000			Rp. 36.000.000.000	Rp. 39.600.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp. 2.855.700	Rp. 9.716.935.000			Rp. 9.719.790.700	Rp. 1.301.378.611	Rp. 12.216.935.000			Rp. 13.518.313.611	Rp. 4.686.200.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 2.855.700	Rp. 9.716.935.000			Rp. 9.719.790.700	Rp. 1.301.378.611	Rp. 12.216.935.000			Rp. 13.518.313.611	Rp. 4.686.200.000,00
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan		Rp. 2.855.700	Rp. 5.517.264.000			Rp. 5.520.119.700	Rp. 2.855.700	Rp. 8.017.264.000			Rp. 8.020.119.700	Rp. 66.200.000,00
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan			Rp. 699.671.000			Rp. 699.671.000		Rp. 699.671.000			Rp. 699.671.000	Rp. 770.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan			Rp. 3.500.000.000			Rp. 3.500.000.000	Rp. 1.298.522.911	Rp. 3.500.000.000			Rp. 4.798.522.911	Rp. 3.850.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Rp. 8.923.200.000				Rp. 8.923.200.000	Rp. 8.919.625.200				Rp. 8.919.625.200	Rp. 9.900.000.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				Rp. 8.923.200.000				Rp. 8.923.200.000	Rp. 8.919.625.200				Rp. 8.919.625.200	Rp. 9.900.000.000,00
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan		Rp. 8.923.200.000				Rp. 8.923.200.000	Rp. 8.919.625.200				Rp. 8.919.625.200	Rp. 9.900.000.000,00
Jumlah									**Rp. 66.250.520.091**	**Rp. 10.716.935.000**			**Rp. 76.967.455.091**	**Rp. 67.457.218.202**	**Rp. 13.216.935.000**			**Rp. 80.674.153.202**	**Rp. 78.754.200.000,00**

BAB V
PENUTUP

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian Baik dalam Pelaksanaan Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai dengan Kebutuhan

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini walaupun dalam teknis pelaksanaannya tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan dimaksud yaitu :

1. Tetap perlu dilakukan penyusunan rincian kebutuhan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai walaupun ketersediaan dana kurang, karena pengobatan terhadap pasien harus terus berjalan
2. Untuk program pengadaan obat-obatan dan BHP, program standarisasi pelayanan kesehatan dan program administrasi perkantoran harus mendapatkan perhatian khusus agar pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik, sebab ketiga program dimaksud merupakan program penting untuk pelayanan rujukan rumah sakit.

B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah serta merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2025-2029, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema maupun nasional. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan OPD Tahun 2025.

Rancangan Pelaksanaan Perubahan Renja (P-Renja) ini direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja ini diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja UPTD RSUD Pandan Kabupaten

Tapanuli Tengah, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, non medis pada UPTD RSUD Pandan, stakeholder yang bersangkutan serta peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja ini akan ditindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas yang tidak difasilitasi pada rencana kerja tahun sebelumnya dengan harapan peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun, kiranya dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan dukungan berbagai stakeholder terkait demi peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dan dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasarsan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pandan, 20 Mei 2025

Plt. DIREKTUR UPTD RSUD PANDAN

dr. FADLI SYAHPUTRA, Sp.A
PEMBINA TK.I
NIP. 19730918 200502 1 001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Tapanuli Tengah antara lain :

a. Kaidah – kaidah pelaksanaan Program / Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu pada DPA Tahun sebelumnya dengan Alokasi Anggaran sesuai dengan pagu APBD.
b. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 menetapkan 4 Program, 20 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan sesuai dengan Program Nasional.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tersebut sudah mencakup semua Program Pemerintahan dan Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

PANDAN, . 20 Mei 2025
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19830327 200212 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penyusunan 5-6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu Capaian RENSTRA Perangkat Daerah..... 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah..... 12

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 20

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 22

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah..... 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28

BAB V PENUTUP .....

5.1. Saran 29

5.2. Kesimpulan 30

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Dasar Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1 / 640 / SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025, pada poin 4 (empat), dan Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, dan Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, serta dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai hak dan wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah guna memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, maka

perencanaan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2025 untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana Perencanaan Pembangunan Nasional harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan Teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan Partisipatif yang masyarakat bahwa proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan *(Stakeholder)* terhadap pembangunan.
4. Pendekatan *Top – Down* (Atas – Bawah) yaitu bahwa Penyusunan Perencanaan Pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan *Bottom – Up* (Bawah – Atas) yaitu Penyusunan Perencanaan Pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan *Stakeholder* atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses Penyusunan Rencana Pembangunan, *Top Down* dan *Bottom – Up* diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 juga mengacu pada Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD1945

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.
24. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017).

26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah;
27. Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;
28. Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program, kegiatan, kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah, serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip ***GOOD GOVERMANT***.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran strategis, program pembangunan pada tahun 2025 yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1 / 640 / SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 pada poin 4 (empat), Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, dan Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistimatika Penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan secara terperinci mengenai gambaran umum Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, sehingga dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, Proses Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, keterkaitan antara arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2024 serta Tahun 2025, Sasaran Pokok RPJPD dan Program Prioritas Nasional, Renja K/L serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang tata cara penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada Bab ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Lalu, dan Realisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dan / atau Realisasi APBD untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Program / Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah

Memuat tentang kajian terhadap Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika Perangkat Daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, serta Norma Standart Pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional / Internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terhadap Rumusan Program dan Kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD atau Program dan Kegiatan yang sesuai akan tetapi biaya/dana yang dibutuhkan berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Deskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada bagian ini menjelaskan antara lain:

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.
c. Penjelasan jika Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik Jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikator, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan antara lain:

a. Saran;

b. Kesimpulan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kinerja Tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penanggulangan Bencana.
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah sampai tahun berjalan sebagaimana tabel TC. 29 (terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bagian integritas dalam proses Perencanaan Srategis Pemerintah.

Adapun Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 4 (empat) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penanggulangan Bencana.
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah sampai tahun berjalan dapat dilihat pada tabel TC. 30 (terlampir).

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan wilayah yang memiliki kawasan yang relatif sudah mengalami degradasi kualitas wilayah ekologinya. Karena itu, Kabupaten Tapanuli Tengah perlu berusaha mengembalikan kelestarian ekologinya, terutama pelestarian hutan dan ekosistem bawah laut, sehingga konsep pola ruang wilayah ekologis Kabupaten Tapanuli Tengah perlu disusun secara cermat. Keragaman hayati baik flora dan fauna sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi. Keseimbangan ekologi pada akhirnya mempengaruhi kualitas lingkungan yang dibutuhkan manusia. Dalam pelaksanaannya ada semacam konflik antara kepentingan memelihara wilayah ekologi dengan pembangunan ekonomi rakyat. Pelestarian wilayah ekologi yang optimal adalah dengan cara tidak mengganggu kawasan ini, khususnya kawasan lindung dan kawasan hutan. Namun kenyataannya kawasan habitat flora dan fauna di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah juga merupakan ruang mencari nafkah bagi kehidupan rakyak yang kebanyakan adalah petani dan nelayan.

Kerusakan ekosistem pada kawasan pesisir juga tidak kalah seriusnya sebagaimana halnya dengan yang terjadi di hulu (hutan dan Daerah Sungai/ DAS). Kawasan hutan *mangrove* berkurang dengan cepat karena dikonversi menjadi kawasan pertambakan, lokasi tempat tinggal atau untuk kegiatan budidaya lainnya. Kerusakan hutan *mangrove* ini selain mempengaruhi kualitas habitat perairan yang pada umumnya bernilai ekonomis tinggi juga meningkatkan potensi abrasi yang disebabkan oleh gelombang dan pasang air laut, serta akan semakin diperparah oleh kemungkinan kenaikan air laut akibat pemanasan global. Disamping itu erosi yang berkepanjangan pada hampir semua sungai besar maupun kecil juga menimbulkan dampak negatif pada kawasan pesisir, antara lain berupa proses sedimentasi (pendangkalan perairan pelabuhan) dan kualitas pengairan tambak.

Penurunan kualitas lingkungan seperti diuraikan tersebut terutama disebabkan oleh semakin maraknya pembukaan lahan yang semakin tidak terkendali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh kalangan masyarakat menengah dan besar, untuk tujuan ekonomi, seperti pertanian, terutama perkebunan, termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian. Pada satu sisi, kegiatan itu memberikan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah. Tetapi pada sisi lain terutama untuk jangka panjang, kegiatan-kegiatan itu justru mengancam kesetabilan perekonomian. Pembangunan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan perlu menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan pembangunan, dimana rakyat dapat memanfaatkan ruang secara terbatas dan terkendali dengan tetap mendukung pelestarian flora dan faunanya.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat managerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Tingginya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

   Rendahnya kuantitas dan kualitas PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Masih terdapat substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sanksinya bukan menjadi kewenangan Satpol PP.
2. Tingginya Pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Kurangnya kepedulian maupun dukungan partisifasi masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya, seperti masalah maraknya sarang prostitusi yang berkedok warung minuman yang menyediakan layanan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Wanita Rawan Soaial (WRS) sehingga menciptakan ketidak nyamanan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.
3. Jumlah armada (mobil) pemadam kebakaran dan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran.

   Keterbatasan anggaran untuk penambahan armada (mobil) pemadam kebakaran serta minimnya pos pemadam kebakaran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengandalkan pos pemadam kebakaran yang ada di Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kecamatan Barus dalam pelayanan pemadaman, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran sehingga waktu tanggap dalam penanganan kebakaran belum optimal.
4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Good Governance.

   Keterbatasan jumlah ASN di Satpol PP Kab. Tapanuli Tengah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Satpol PP Kab. Tapanuli Tengah.

Tabel 2.1

Penentuan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

NO.	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1.	Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia	Tingginya pelanggaran gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketemteraman umum	Cuaca Ekstrim	Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global	Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi	Belum optimalnya upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
2.		Tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Belum optimalnya pencegahan pelanggaran Perda oleh masyarakat				Belum optimalnya upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3.		Jumlah armada (mobil) pemadam kebakaran dan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran.					Minimnya armada (mobil) pemadam kebakaran yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran belum optimal dalam penanganan kebakaran dikarenakan jarak tempuh.
4.		Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Good Governance.					Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri berfokus pada peningkatan profesionalisme, efektivitas, dan efesiensi Satpol PP dalam menjalankan tugas, hal ini mencakup pada peningkatan kompetensi anggota, penyempurnaan sistem kerja, serta penguatan sinergitas dengan stakeholder lain. Selanjutnya Misi Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara Tahun 2025 adalah **"Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Masyarakat di Sumatera Utara".** Poin penting yang terkandung dalam misi tersebut antara lain :

a. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Melindungi masyarakat;
d. Mendukung program prioritas gubernur;
e. Menjaga aset daerah;
f. Membantu penanganan bencana.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dari misi Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara Tahun 2025 diturunkan kepada Renstra 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan fokus kepada penanganan / penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun Peluang yang bisa dijadikan pendukung pelaksanaan dari Program Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai;
2. Tersedianya Anggota Satpol PP dan Anggota Pemadam Kebakaran yang siap pakai;
3. Tersedianya sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas;
4. Tersedianya sarana dan prasarana bidang Pemadam Kebakaran;
5. Semangat setiap anggota/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki;
6. Dukungan dan Koordinasi dari instansi terkait / stakeholder dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Disamping peluang diatas ada berbagai tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur masih perlu ditingkatkan;
2. Minimnya jumlah armada/mobil pemadan kebakaran dalam penanganan/penanggulangan kebakaran;
3. Masyarakat masih mudah terplovokasi oleh pihak pihak tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan/ keributan. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang masih rendah;
4. Tidak semua program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran;
5. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat umumnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk **"Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban".** Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Visi dan Misi yaitu :

Visi yaitu : "Satuan yang Profesional, Tegas, Santun, dan Berwibawa".

Misi yaitu : "Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat".

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program / kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
12. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
13. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
14. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah;
15. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
17. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
20. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
21. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
24. Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan;
25. Pengadaan Mebel;

26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
29. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
30. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan;
32. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
33. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan;
34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
35. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
36. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
37. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

- **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional;
6. Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP;
7. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan;
8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
9. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;
10. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;
11. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;

12. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota;
14. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti);
18. Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
20. Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah;
21. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah.
24. Pembentukan Sekretariat PPNS;
25. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
26. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;
27. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
28. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

- **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**
  1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kebakaran;
  2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana);
  3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
  4. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
  5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
  6. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

- **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
  - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota;
  - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
  - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota;

- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
- Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran;
- Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
- Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
- Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja

1. Proses awal dilaksanakan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan Skala Prioritas Pembangunan.
2. Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (Prosesdur Botton Up).
3. Penjelasan adanya temuan setelah proses tersebut dilaksanakan untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang sifatnya prioritas dan mendesak dapat dilaksanakan sehingga bermanfaat bagi masyarakat sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 31 (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

1. Mekanisme Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yaitu diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan yang melibatkan unsur kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Organisasi Pemerintah Daerah sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbang.
2. Pada Forum Musrenbang Desa akan menghasilkan Skala Prioritas Usulan Program/Kegiatan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut pada Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala Prioritas Usulan Program/Kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada di tingkat Kecamatan yang selanjutnya usulan tersebut akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten.

Daftar Usulan Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 32 (terlampir)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi merupakan telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 adalah :

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi" untuk mewujudkan visi "Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan".

Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah, Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Perumusan Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli tengah Tahun 2025 – 2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	• Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota • Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota • Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	• Penguatan sistem keamanan lingkungan; • Peningkatan kapasitas aparat dalam menjaga lingkungan; • Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat.	Meningkatkan Efektifitas Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;	
			Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten;	
			Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan;	
			Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum;	

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	• Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota • Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota • Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja	• Penguatan sistem keamanan lingkungan; • Peningkatan kapasitas aparat dalam menjaga lingkungan; • Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat.	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;	
			Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;	
			Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Penindakan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;	
			Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;	
			Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas PPNS Satpol PP;	
			Meningkatkan SDM Satpol PP melalui Efektifitas Rekruitmen, Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan;	
			Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Penambahan Armada (mobil) Pemadam Kebakaran Guna Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemadam Kebakaran;	
			Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pemadaman, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;	
			Meningkatkan Optimalisasi Waktu Tanggap (response Time Rate) dalam Penanganan Kebakaran.	
			Meningkatkan SDM Pemadam Kebakaran melalui Efektifitas Rekruitmen, Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan;	

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

➢ Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah **"Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat".**

- **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu tercapainya atau hasil oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diakui dan dipertanggungjawabkan.

Adapun sasaran yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Penanganan Gangguan Trantibum;
b. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Meningkatnya Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mempunyai Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029 yaitu **"Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban".**

Makna yang terkandung dalam Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Adil untuk Semua

   Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Lestari

   Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang memiliki lingkungan yang asri dan menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha dan bertempat tinggal.
3. Berkeadaban

   Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan harmonisasi keberagaman, kebenaran, dan berkeadilan sosial, serta memiliki daya saing unggul.

Guna mendukung terwujudnya **"Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari**

dan Berkeadaban", 9 (sembilan) Misi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai upaya mewujudkan dan menopang pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani;
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif;
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi;
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban;
6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia;
7. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya;
8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik sektor kelautan, perkebunan, pertanian, perikanan, hutan, sungai, sumber daya energi terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian hidup;
9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republi Indonesia periode 2024-2029 adalah **" Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ".** Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mengandung pengertian sebagai berikut : *Mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global, dengan menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi, menuju peringatan 100 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 2045.* Visi " Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun keterkaitan 9 (sembilam) Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 dengan 8 (delapan) Misi Asta Cita Tahun 2024-2029 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Misi ke-6 (enam) RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 terkait dengan Misi ke-1 (satu), Misi ke-2 (dua), Misi ke-4 (empat), Misi ke-7 (tujuh), dan Misi ke-8 (delapan) Asta Cita.

Tabel 2.3

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Asta Cita Terhadap Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

MISI KABUPATEN TAPANULI TENGAH	8 ASTA CITA
6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

BAB IV. RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Program / Kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dana dan jenis sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Program / Kegiatan sebagai salah satu kesatuan yang terpadu, maka dalam menyusun Program / Kegiatan Strategis tentunya tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 33 (terlampir).

BAB V. PENUTUP

5.1. Saran

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bagian integritas dalam proses Perencanaan Strategis Pemerintah. Guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan Program / Kegiatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung serta Keterbatasan Sumber daya Manusia (personil). Selain daripada itu keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan juga menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya Program / Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Program / Kegiatan yang belum terealisasi akan diusulkan melalui P-APBD tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya. Maka sangat diharapkan kepada SKPD terkait yang menyusun APBD dapat menampung Kebutuhan Anggaran Kegiatan yang disusun dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

.

1.1. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamomg Praja Kabuapten Tapanuli Tengah antara lain :

a. Kaidah – kaidah pelaksanaan Program / Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu pada DPA Tahun sebelumnya dengan Alokasi Anggaran sesuai dengan pagu APBD.
b. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 menetapkan 4 Program, 20 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan sesuai dengan Program Nasional.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tersebut sudah mencakup semua Program Pemerintahan dan Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19830327 200212 1 003

Dipindai dengan CamScanner

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KODE REKENING					URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025)	PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026		CATATAN SUMBER DANA
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										***PERIODE RENSTRA OPD 2023-2026 TELAH BERAKHIR***
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**									
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	DAU
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	DAU
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang	34 Orang	34 Orang	34 Orang	100%	34 Orang	52 Orang	100%	DAU
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	DAU
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	DAU
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU

KODE REKENING					URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025)	PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026		CATATAN SUMBER DANA
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	DAU
1	**05**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**									
1	05	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU
1	05	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional**									
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	Paket	13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket	10 Paket	100%	DAU
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Orang	2 Orang	2 Orang	100%	1 Orang	2 Orang	100%	DAU
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	DAU
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	DAU
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	DAU
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%	DAU
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	100%	120 Laporan	60 Laporan	100%	DAU
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**									
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%	DAU
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Unit	Paket	Paket	100%	Paket	1 Paket	100%	DAU
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	DAU
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	10 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	10 Unit	30 Unit	100%	DAU
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**									
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%	DAU
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	DAU

KODE REKENING					URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025)	PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026		CATATAN SUMBER DANA
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Unit	Unit	Unit	100%	Unit	12 Unit	100%	DAU
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%	DAU
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	DAU
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	DAU
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	DAU
1	**05**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja**									
1	05	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS**									
						2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN									
						3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA									
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas**									
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.01	10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	Orang	Orang	Orang	100%	Orang	6 Orang	100%	DAU
1	05	02	2.01	11	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU

KODE REKENING					URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025)	PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026		CATATAN SUMBER DANA
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1	05	02	2.01	12	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	6 Orang	Orang	Orang	Orang	100%	Orang	6 Orang	100%	DAU
1	05	02	2.01	13	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	Orang	Orang	Orang	100%	Orang	6 Orang	100%	DAU
1	05	02	2.01	14	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	60 Orang	Orang	Orang	Orang	100%	Orang	60 Orang	100%	DAU
1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 Laporan	24 Kasus	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	02	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	24 Kasus	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	02	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	60 Unit	Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	58 Unit	100%	DAU
1	05	02	2.01	19	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.01	25	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	6 Orang	Orang	Orang	Orang	100%	Orang	6 Orang	100%	DAU
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**									
1	05	02	2.02	04	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	100%	Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	02	2.02	05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.02	06	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 Unit	Unit	Unit	Unit	100%	Unit	1 Unit	100%	DAU
1	05	02	2.02	07	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	100%	Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	02	2.02	08	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	100%	Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	02	2.02	09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda	12 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%	DAU
1	05	02	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	DAU

KODE REKENING					URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025)	PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026		CATATAN SUMBER DANA
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1	05	02	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**									
1	05	02	2.03	02	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.03	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	4 Dokumen	100%	DAU
1	05	02	2.03	04	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah	3 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	100%	Laporan	3 Laporan	100%	DAU
1	05	02	2.03	05	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	100%	Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	02	2.03	06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	100%	DAU
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA**									
						2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA									
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**									
1	05	03	2.01	07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	–	150 Orang	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	–	100%	
1	05	03	2.01	08	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	–	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	–	100%	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**									
						2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana									
1	05	03	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	–	100 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	–	%	
1	05	03	2.02	27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	–	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	–	%	
1	05	03	2.02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	–	4 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	100%	6 Kawasan	–	%	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**									
1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	–	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	–	%	

KODE REKENING					URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025)	PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026		CATATAN SUMBER DANA
									TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN**									
						2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN									
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	DAU
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang	2 Orang	Orang	Orang	100%	Orang	1 Orang	100%	DAU
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	100%	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	100%	DAU
1	05	04	2.01	12	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	2 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	100%	Laporan	2 Laporan	100%	DAU
1	05	04	2.01	14	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	04	2.01	16	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	1 Dokumen	100%	DAU
1	05	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	1 Unit	100%	DAU
1	05	04	2.01	18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	Dokumen	100%	Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**									
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	DAU

Tabel TC. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I.	**TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												***PERIODE RENSTRA OPD 2023-2026 TELAH BERAKHIR***
1.	**1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**												
				Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Laporan Capaian Kenieja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
				Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	34 Orang	34 Orang	52 Orang	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
				Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
				Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	
				Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional									
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	Paket	13 Paket	10 Paket	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	Orang	2 Orang	2 Orang	
				Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
				Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	60 Laporan	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas									
				Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Roda Dua)	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Unit	Paket	1 Paket	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	30 Unit	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas									
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Unit	Unit	12 Unit	
				Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja									
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.	**1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS**												
	2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN												
	3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA												
				Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas									
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	Orang	Orang	6 Orang	
				Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	Orang	Orang	6 Orang	
				Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	Orang	Orang	6 Orang	
				Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	Orang	Orang	60 Orang	
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24 Kasus	24 Laporan	12 Laporan	
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24 Kasus	24 Laporan	12 Laporan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	58 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	Unit	50 Unit	58 Unit	
				Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	Orang	Orang	6 Orang	
				Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan									
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	Laporan	12 Laporan	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	Unit	1 Unit	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	Laporan	12 Laporan	
				Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	Laporan	12 Laporan	
				Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya									
				Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	
				Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan	Laporan	3 Laporan	
				Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan	Laporan	12 Laporan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Laporan	2 Laporan	3 Laporan	
3.	**1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA**			**Meningkatnya Sinergitas dan Integritas dalam Pencegahan Penenggulangan Bencana**									
	2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA			**Meningkatnya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana**									

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	–	–	–	–	150 Orang	300 Orang	–	
				Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	–	–	–	–	1 Dokumen	1 Dokumen	–	
				1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
				2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana									
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	20 Unit	–	–	–	–	100 Unit	20 Unit	–	
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	–	–	–	–	2 Dokumen	1 Dokumen	–	
				Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6 Kawasan	–	–	–	–	4 Kawasan	6 Kawasan	–	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
				Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	12 Dokumen	–	–	–	–	12 Dokumen	12 Dokumen	–	
4.	**1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN**												
	2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN												
				Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota									
				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	2 Orang	Orang	1 Orang	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	215 Desa/Kel	
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Laporan	Laporan	2 Laporan	
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Unit	2 Unit	1 Unit	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	
				Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran									
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
				Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran									
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
				Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran									
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	1000 Orang	Orang	500 Orang	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	40 Desa/Kel	40 Desa/Kel	40 Desa/Kel	40 Desa/Kel	40 Desa/Kel	215 Desa/Kel	40 Desa/Kel	40 Desa/Kel	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19830327 200212 1 003

Tabel TC. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			***PERIODE RENSTRA OPD 2023-2026 TELAH BERAKHIR***
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 14,999,557.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 8,220,557.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kenieja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kenieja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp -	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 2,999,699.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 2,415,699.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	Rp 3,110,172,600.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	Rp 3,110,172,600.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp -	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp -	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 7,000,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 7,000,000.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp -	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp -	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		**Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Rp -	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Rp -	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Rp -	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Rp -	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional**			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	Rp 611,272,116.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	Rp 611,272,116.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mega Mendung Kab. Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Rp 100,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mega Mendung Kab. Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Rp 100,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 3,594,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 3,594,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 137,792,403.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 137,792,403.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 99,998,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 99,998,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 49,999,728.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 49,999,728.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1,590,400.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1,590,400.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Rp 217,500,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Rp 217,500,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**			
	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Rp -	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Rp -	
	Pengadaan Mebel	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Rp -	Pengadaan Mebel	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Rp -	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 285,303,621.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp -	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 3,988,900.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 3,988,900.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp 51,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp 51,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 9,996,900.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 9,996,900.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 83,008,371.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 75,347,571.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Rp -	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Rp 451,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Rp 451,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 30,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp -	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 1,591,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 1,591,000.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penataan Organisasi		**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja**			**Penataan Organisasi**		**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja**			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp -	
2.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS**			
			2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN					**2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN**			
			3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA					**3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA**			
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas**			**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas**			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp -	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp -	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Rp -	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Rp -	
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	Rp 430,000,000.00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	Rp 230,000,000.00	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	Rp -	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	Rp -	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	Rp -	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	Rp -	
	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah	Dokumen	Rp -	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah	Dokumen	Rp -	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Orang	Rp -	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Orang	Rp -	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Rp -	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Rp -	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Rp -	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Rp -	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	24 Laporan	Rp 6,068,600,000.00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	24 Laporan	Rp 5,505,800,000.00	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Laporan	Rp 56,750,000.00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Laporan	Rp 56,750,000.00	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	Rp -	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	Rp -	
	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen	Rp -	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen	Rp -	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang	Rp -	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang	Rp -	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**			**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**		**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**			
	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Rp -	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Rp -	
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Rp -	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Rp -	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	Rp -	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	Rp -	
	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Rp -	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Rp -	
	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	Rp -	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	Rp -	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda	Dokumen	Rp -	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda	Dokumen	Rp -	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	Rp -	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	Rp -	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	Rp -	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	Rp -	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Rp -	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Rp -	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	**Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	**Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**			
	Pembentukan Sekretariat PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	Rp -	Pembentukan Sekretariat PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	Rp -	
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Rp -	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Rp -	
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	Rp -	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	Rp -	
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	Rp -	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	Rp -	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	Rp -	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	Rp -	
3.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA**			
			2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA					**2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA**			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	Rp -	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	Rp -	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp -	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp -	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			
			2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana					**2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana**			
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	20 Unit	Rp -	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	20 Unit	Rp -	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp -	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp -	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6 Kawasan	Rp 65,300,319.00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6 Kawasan	Rp 65,300,076.00	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	12 Dokumen	Rp -	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	12 Dokumen	Rp -	
4.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN**			
			2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN					**2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN**			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		**1. Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**1. Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	Rp 2,249,124,940.00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	Rp 1,989,924,940.00	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 50,000,000.00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 50,000,000.00	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	Rp -	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	Rp -	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp -	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp -	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal	1 Dokumen	Rp -	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal	1 Dokumen	Rp -	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Rp -	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Rp -	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	215 Desa/Kel	Rp -	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	215 Desa/Kel	Rp -	
	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan	Rp -	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan	Rp -	
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	Rp -	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	Rp -	
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Rp -	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Rp -	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	Rp 3,087,420,000.00	
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Rp -	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Rp -	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	Rp 30,250,000.00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	Rp 30,250,000.00	
	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	Rp -	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	Rp -	

TABEL TC. 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		***PERIODE RENSTRA OPD 2023-2026 TELAH BERAKHIR***
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		**Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional**		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mega Mendung Kab. Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**		
	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Roda Dua)	5 Unit	
	Pengadaan Mebel	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan	36 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Penataan Organisasi		**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	
2.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS**		
			2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN		
			3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	
	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah	Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Orang	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	24 Laporan	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Laporan	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	
	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**		
	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	
	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda	Dokumen	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**		
	Pembentukan Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	
3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA**		
			2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		
			2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	20 Unit	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6 Kawasan	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	12 Dokumen	
4	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN**		
			2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal	1 Dokumen	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	215 Desa/Kel	
	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan	
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**Persentase Ketersediaan Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**		
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	
	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	
	Investigasi Kejadian Kebakaran		**Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran**		
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**Persentase Relawan Pemadan Kebakaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	40 Desa/Kel	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19830327 200212 1 003

Tabel TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kode Rekening					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					*PERIODE RENSTRA OPD 2023-2026 TELAH BERAKHIR*		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			**Rp 5,257,783,495.00**				**Rp 3,969,228,109.00**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Rp 10,636,256.00**				**Rp 17,893,167.00**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp 8,220,557.00	DAU		1 Dokumen	Rp 14,921,331.00
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Laporan	Rp -	DAU		1 Laporan	Rp -
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Laporan	Rp 2,415,699.00	DAU		1 Laporan	Rp 2,971,836.00
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Rp 3,110,172,600.00**				**Rp 2,828,846,030.00**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	34 Orang	Rp 3,110,172,600.00	DAU		52 Orang	Rp 2,828,846,030.00
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Laporan	Rp -	DAU		1 Laporan	Rp -
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	4 Laporan	Rp -	DAU		4 Laporan	Rp -
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**Rp 7,000,000.00**				**Rp 7,000,000.00**
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp 7,000,000.00	DAU		1 Dokumen	Rp 7,000,000.00
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Laporan	Rp -	DAU		1 Laporan	Rp -
1	**05**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			**Rp -**				**Rp -**
1	05	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	05	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	Rp -	DAU		12 Laporan	Rp -
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional**			**Rp 711,272,116.00**				**Rp -**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	13 Paket	Rp 611,272,116.00	DAU		10 Paket	Rp -
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Mega Mendung Kab. Bogor	2 Orang	Rp 100,000,000.00	DAU		2 Orang	Rp -
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Rp 510,474,531.00**				**Rp 543,541,257.00**

Kode Rekening					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Paket	Rp 3,594,000.00	DAU		1 Paket	Rp 3,589,668.00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Paket	Rp 137,792,403.00	DAU		12 Paket	Rp 171,103,950.00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Paket	Rp 99,998,000.00	DAU		12 Paket	Rp 99,941,900.00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Paket	Rp 49,999,728.00	DAU		12 Paket	Rp 49,815,339.00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp 1,590,400.00	DAU		12 Dokumen	Rp 1,590,400.00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	120 Laporan	Rp 217,500,000.00	DAU		60 Laporan	Rp 217,500,000.00
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**			**Rp 285,303,621.00**				**Rp -**
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	5 Unit	Rp -	DAU		5 Unit	Rp -
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Paket	Rp -	DAU		1 Paket	Rp -
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Unit	Rp 285,303,621.00	DAU		1 Unit	Rp -
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	10 Unit	Rp -	DAU		30 Unit	Rp -
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas**			**Rp 140,333,371.00**				**Rp 109,399,495.00**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	Rp 3,988,900.00	DAU		12 Laporan	Rp 3,988,900.00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	36 Laporan	Rp 51,000,000.00	DAU		36 Laporan	Rp 25,000,000.00
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	Rp 9,996,900.00	DAU		12 Laporan	Rp 5,070,000.00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	Rp 75,347,571.00	DAU		12 Laporan	Rp 75,340,595.00
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Rp 482,591,000.00**				**Rp 462,548,160.00**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Unit	Rp -	DAU		12 Unit	Rp -
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	22 Unit	Rp 451,000,000.00	DAU		22 Unit	Rp 451,000,000.00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Unit	Rp 30,000,000.00	DAU		1 Unit	Rp 10,000,000.00
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Unit	Rp -	DAU		1 Unit	Rp -
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Unit	Rp 1,591,000.00	DAU		1 Unit	Rp 1,548,160.00
1	**05**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja**			**Rp -**				**Rp -**
1	05	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
						1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS			**Rp 5,792,550,000.00**				**Rp 6,044,143,687.00**

Kode Rekening					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN**							
						3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA							
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas**			**Rp 5,792,550,000.00**				**Rp 5,746,006,940.00**
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	5 Dokumen	Rp 230,000,000.00	DAU		5 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.01	10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Orang	Rp -	DAU		6 Orang	Rp -
1	05	02	2.01	11	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.01	12	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Orang	Rp -	DAU		6 Orang	Rp -
1	05	02	2.01	13	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Orang	Rp -	DAU		6 Orang	Rp -
1	05	02	2.01	14	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Orang	Rp -	DAU		60 Orang	Rp 99,999,800.00
1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	24 Laporan	Rp 5,505,800,000.00	DAU		12 Laporan	Rp 5,535,797,259.00
1	05	02	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	24 Laporan	Rp 56,750,000.00	DAU		12 Laporan	Rp 110,209,881.00
1	05	02	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	50 Unit	Rp -	DAU		58 Unit	Rp -
1	05	02	2.01	19	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.01	25	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Orang	Rp -	DAU		6 Orang	Rp -
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**			**Rp -**				**Rp 125,293,553.00**
1	05	02	2.02	04	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Laporan	Rp -	DAU		12 Laporan	Rp -

Kode Rekening					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	05	02	2.02	05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.02	06	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Unit	Rp -	DAU		1 Unit	Rp -
1	05	02	2.02	07	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Laporan	Rp -	DAU		12 Laporan	Rp -
1	05	02	2.02	08	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Laporan	Rp -	DAU		12 Laporan	Rp -
1	05	02	2.02	09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	6 Laporan	Rp -	DAU		6 Laporan	Rp 125,293,553.00
1	05	02	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	Rp -	DAU		12 Laporan	Rp -
1	05	02	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	Rp -	DAU		12 Laporan	Rp -
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Rp -**				**Rp 172,843,194.00**
1	05	02	2.03	02	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	02	2.03	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		4 Dokumen	Rp 78,718,194.00
1	05	02	2.03	04	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Laporan	Rp -	DAU		3 Laporan	Rp 94,125,000.00
1	05	02	2.03	05	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Laporan	Rp -	DAU		12 Laporan	Rp -
1	05	02	2.03	06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	2 Laporan	Rp -	DAU		3 Laporan	Rp -
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA**			**Rp 65,300,076.00**				**Rp -**
						2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA							
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**Rp -**				**Rp -**
1	05	03	2.01	07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	300 Orang	Rp -	DAU		—	Rp -
1	05	03	2.01	08	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		—	Rp -
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**Rp 65,300,076.00**				**Rp -**
						2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana							
1	05	03	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	20 Unit	Rp -	DAU		—	Rp -
1	05	03	2.02	27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		—	Rp -
1	05	03	2.02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	6 Kawasan	Rp 65,300,076.00	DAU		—	Rp -
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			**Rp -**				**Rp -**
1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp -	DAU		—	Rp -

Kode Rekening					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN**			**Rp 5,157,594,940.00**				**Rp 2,132,344,344.00**
						2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN							
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Rp 5,127,344,940.00**				**Rp 2,098,198,652.00**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp 1,989,924,940.00	DAU		1 Dokumen	Rp 2,003,198,912.00
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Laporan	Rp 50,000,000.00	DAU		12 Laporan	Rp 69,999,740.00
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Orang	Rp -	DAU		1 Orang	Rp 25,000,000.00
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	215 Desa/Kel	Rp -	DAU		215 Desa/Kel	Rp -
1	05	04	2.01	12	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Laporan	Rp -	DAU		2 Laporan	Rp -
1	05	04	2.01	14	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	04	2.01	16	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
1	05	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	2 Unit	Rp 3,087,420,000.00	DAU		1 Unit	Rp -
1	05	04	2.01	18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**Rp 30,250,000.00**				**Rp 34,145,692.00**
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp 30,250,000.00	DAU		12 Dokumen	Rp 34,145,692.00
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran**			**Rp -**				**Rp -**
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Pandan Kab. Tapanuli Tengah	12 Dokumen	Rp -	DAU		12 Dokumen	Rp -
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**			**Rp -**				**Rp -**

6.1. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamomg Praja Kabuapten Tapanuli Tengah antara lain :

a. Kaidah – kaidah pelaksanaan Program / Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu pada DPA Tahun sebelumnya dengan Alokasi Anggaran sesuai dengan pagu APBD.
b. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 menetapkan 4 Program, 20 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan sesuai dengan Program Nasional.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tersebut sudah mencakup semua Program Pemerintahan dan Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

PANDAN, [illegible]
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.
PEMBINA
NIP. 19830327 200212 1 003

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD.

Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaran pembangunan daerah adalah Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Demikian Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun dengan harapan penyelenggaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Pandan, 29 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

RIDHO S.M. HUTABARAT, S.STP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19850325 200312 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik ndonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target
2. kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan
3. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan; Renja Perubahan Badan
4. Perubahan renja perangkat daerah 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan merupakan salah satu tahap dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD.

1.2. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum dalam penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan

acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah acuan pembuatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang nantinya untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB. IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Triwulan II

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2025 memiliki 2 Program, Setelah kegiatan efisiensi dilaksanakan maka pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dan pada Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD memiliki 5 Kegiatan dan 14 Sub. Adapun Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan Triwulan I dapat dijelaskan sebagai Berikut :

I. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada program tahun 2025 sampai Triwulan II ada beberapa program yang memiliki kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

   a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** Pada Program ini ada beberapa sub kegiatan yang belum terpenuhi yakni :

      1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan ini meliputi pembelian alat-alat penerangan seperti Bola lampu dan perangkatnya, kegiatan ini terealisasi masih 16%
      2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan ini sebelumnya adalah kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor seperti Pulpen, Kertas, Map, tinta dan Kebutuhan Lainnya, Kegiatan ini belum berjalan sampai dengan TW. II

3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini belum terealisasi
4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. untuk tahun 2025 kegiatan ini meliputi pengadaan Kursi , Laptop dan Printer. kegiatan belum berjalan karena kegiatan ini akan direncanakan di Triwulan III
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian benda-benda pos seperti materai 10.000, perangko dan Benda pos lainnya, kegiatan ini masih terealisasi sebesar 9%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pemeliharaan barang kantor seperti peralatan Komputer. Kegiatan ini sampai TW. II masih terealisasi sebesar 26%
7. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, kegiatan ini belum tercapai karena saat ini Kegiatan pengadaan ini direncanakan pada Triwulan III.
8. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, kegiatan ini belum berjalan karena kegiatan pelaksanaannya belum ada.

b. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD

Pada program ini ada beberapa Sub kegiatan yang belum memenuhi target yakni :

1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Kegiatan KUA dan PPAS
3. Kegiatan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
4. Kegiatan Pembahasan APBD

5. Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
6. Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

   Untuk kegiatan yang menyangkut Pembahasan Anggaran untuk Triwulan I belum tercapai karena kegiatan ini berjalan di Triwulan III
7. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Kegiatan ini meliputi adanya kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi yang diselenggarakan oleh partai masing-masing. Kegiatan ini sedang dalam proses tetapi belum terinput pada SIPD.
8. Kegiatan Reses, kegiatan ini meliputi kujungan anggota DPRD pada Konstutuen masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan ini belum berjalan karena pelaksanaan Reses jadwalnya belum ada.

II. Untuk kegiatan yang memenuhi target atau dianggap sudah mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini memiliki Sub Kegiatan yang dianggap sudah mencapati Target, meliputi :

1. Kegiatan Penyesiaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan ini berjalan sesuai penerimaan gaji ASN setiap bulannya. Kegiatan ini terealisasi sebesar 53%
2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik, Kegiatan ini meliputi penyediaan kebutuhan kantor seperti Baliho, Spanduk, Makan dan Minuman Kantor. Kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 46%
3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan ini berisikan Fotocopy dan Penjilitan, Cetak Blanko

SPPD, Map Berlogo, Cetak Papan Nama Anggota DPRD, Kegiatan ini terealisasi sebesar 40 %

4. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Kegiatan ini merupakan Kegiatan Koordinasi Staf Sekretariat DPRD di Dalam Provinsi dengan tujuan untuk menambah pemahaman staf tentang pelaksanaan tupoksi ataupun berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan sesama Sekretariat DPRD antar kabupaten ataupun Provinsi, kegiatan ini terealisasi sebesar 51%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik, kegiatan ini untuk pemenuhan Listrik, Air dan Internet Kantor, Kegiatan ini Penyerapanya sebesar 39%
6. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum, Kegiatan ini Berisi Pembelian Alat Kebersihan dan Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan dan Operator Komputer, kegiatan ini terealisasi sebesar 39%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas dan Kenderaan Dinas Jabatan, kegiatan ini merupakan penyediaan BBM, Oli dan Pajak Kenderaan Dinas dan Pemeliharaan Kenderaan Dinas, kegiatan ini terealisasi sebesar 32%
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, kegiatan ini belum berjalan karena kegiatan ini belum ada servis dan pemeliharaan untuk Ac. Kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 65%
9. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan ini berjalan lancar. Kegiatan ini berjalan 31%

10. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, kegiatan ini terealisasi sebesar 49%
11. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, kegiatan ini meliputi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat/Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh atau kegiatan pelaksanaan rapat paripurna Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini terserap sebesar 26%.

b. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD

Pada program ini ada beberapa Sub kegiatan yang dianggap memenuhi target yakni :

1. Kegiatan Orientasi DPRD, kegiatan ini merupakan kegiatan Bimbingan Teknis bertujuan untuk membekali anggota DPRD dengan pengetahuan tentang tugas, fungsi, dan wewenang Anggota DPRD Masa Jabatan 2025-2030. Kegiatan ini sudah berjalan dan telah selesai di Bulan Februari 2025. Kegiatan ini menyerap realisasi anggaran sebesar 69%
2. Kegiatan Peyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli, kegiatan ini masih terealisasi sebesar 21%
3. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, kegiatan ini meliputi pembiayaan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi, pada Triwulan I ini serapan anggarannya sebesar 26%
4. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD, Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyangkut Dokumentasi Dewan seperti Cetak Foto, jasa radio, kegiatan ini belum terealisasi karena belum ada kegiatan di Sub Kegiatan tersebut, kegiatan ini terealisasi sebesar 43%
5. Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, kegiatan ini merupakan kunjungan kerja ke Kecamatan dalam rangka

meninjau pembangunan di Kecamatan serta menyerap aspirasi dari masyarakat, kegiatan ini sampai Triwulan II terealisasi sebesar 87%

6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, kegiatan ini merupakan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD baik dalam dan luar Provinsi, kegiatan ini terealisasi sebesar 98%

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini :

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah
Periode Pelaksanaan : 2025

No	Nomor/Kode Rekening						Program dan Kegiatan	LOKASI	Indikator Keluaran (Output)	Nomor & Tanggal Kontrak	Nama Rekanan (UD/CV/ PT)	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Realisasi		Sisa Anggaran	Sumber Dana	Ket.
													TW. LALU	TW. INI	S/D TW.INI	Keuangan	Fisik			
																%	%			
1	2						3	4	5	6	7	8	12			13		14	15	16
1.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah						***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***					22.769.728.747	-	-	10.240.822.431	0,45				
	4	**02**	**01**	**2**	**01**		**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													
	4	**02**	**01**	**2**	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
	4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			2.403.172.750	264.409.465	1.009.374.143	1.273.783.608	53%	53%	1.129.389.142	APBD	
	4	**02**	**01**	**2**	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**													
	4	**02**	**01**	**2**	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**													
	4	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Pemeliharaan Listrik/Penerangan Kantor			39.429.753	0	6.267.615	6.267.615	16%	16%	33.162.138	APBD	
	4	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Alat Tulis Kantor			206.929.164	0	0	0	0%	0%	206.929.164	APBD	
	4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Penyediaan Makanan/Minuman, Plakat dan Spanduk			239.934.787	0	111.376.352	111.376.352	46%	46%	128.558.435	APBD	
	4	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			92.906.889	29.700.000	7.418.352	37.118.352	40%	40%	55.788.537	APBD	
	4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4.956.000	0	900.000	900.000			4.056.000		
	4	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Dalam Kota dan Luar Daerah			100.000.000	19.823.400	30.881.000	50.704.400	51%	51%	49.295.600	APBD	
	4	**02**	**01**	**2**	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													
	4	02	01	2	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor			149.999.853	0	0	0	0%	0%	149.999.853	APBD	

	4	**02**	**01**	**2**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												
	4	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Tersedianya Materai			49.991.200	3.000.000	1.470.000	4.470.000	9%	9%	45.521.200	APBD	
	4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			245.000.000	47.296.094	48.352.932	95.649.026	39%	39%	149.350.974	APBD	
	4	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			33.510.900	0	8.720.000	8.720.000	26%	26%	24.790.900	APBD	
	4	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan Alat/Bahan Kebersihan			859.058.352	126.000.000	212.911.114	338.911.114	39%	39%	520.147.238	APBD	
	4	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												
	4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Tersedianya BBM, Oli dan Pajak Kenderaan Dinas dan Pemeliharaan Kenderaan Dinas			301.255.654	48.961.592	46.287.830	95.249.422	32%	32%	206.006.232	APBD	
	4	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Gedung Kantor			49.991.181	12.731.000	19.894.620	32.625.620	65%	65%	17.365.561	APBD	
	4	02	01	2	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor			113.899.320	0	35.175.000	35.175.000	31%	31%	78.724.320	APBD	
	4	**02**	**01**	**2**	**15**		**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**												
	4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD			16.472.649.535	0	8.029.951.922	8.029.951.922	49%	49%	8.442.697.613	APBD	
	4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD			656.507.702	0	0	0	0%	0%	656.507.702	APBD	
	4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Medical Check Up			122.500.000	0	0	0	0%	0%	122.500.000	APBD	
	4	**02**	**01**	**2**	**16**		**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**												
	4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat-rapat DPRD			462.390.961	68.744.600	51.175.400	119.920.000	26%	26%	342.470.961	APBD	
2.	**4**	**02**	**02**				**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**					4.912.334.386	(1)	-	3.147.601.399	64%	64%			
	4	**02**	**02**	**2**	**01**		**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**												
	4	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda			13.494.270	0	0	0	0%	0%	13.494.270	APBD	
	4	**02**	**02**	**2**	**02**		**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**												
	4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS			67.307.070	0	0	0	0%	0%	67.307.070	APBD	
	4	02	02	2	02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat KUA dan PPAS Perubahan			51.783.720	0	0	0	0%	0%	51.783.720	APBD	
	4	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasan APBD			45.901.830	0	0	0	0%	0%	45.901.830	APBD	

	4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasan APBD Perubahan			41.133.270	0	0	0	0%	0%	41.133.270	APBD	
	4	02	02	2	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			45.594.360	0	0	0	0%	0%	45.594.360	APBD	
	4	**02**	**02**	**2**	**04**		**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**													
	4	02	02	2	04	01	Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya orientasi DPRD			403.000.000	273.483.194	4.609.950	278.093.144	69%	69%	124.906.856	APBD	
	4	02	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya pendalaman tugas DPRD			500.000.000		65.332.367	65.332.367	0%	0%	434.667.633	APBD	
	4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Tersedianya Tenaga Ahli Pimpinan			36.000.000	4.500.000	3.000.000	7.500.000	21%	21%	28.500.000	APBD	
	4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi			210.000.000	26.250.000	27.631.579	53.881.579	26%	26%	156.118.421	APBD	
	4	02	02	2	04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kapasitas DPRD			13.507.860	0	5.850.000	5.850.000	43%	43%	7.657.860	APBD	
	4	**02**	**02**	**2**	**05**		**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**													
	4	02	02	2	05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Kecamatan			50.000.000	0	43.717.845	43.717.845	87%	87%	6.282.155	APBD	
	4	02	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Kecamatan			684.612.006	0	0	0	0%	0%	684.612.006	APBD	
	4	**02**	**02**	**2**	**08**		**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**													
	4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Konsultasi /Koordinasi Dalam/Luar Provinsi dan Kunjungan Kerja DPRD			2.750.000.000	1.498.824.316	1.194.402.148	2.693.226.464	98%	98%	56.773.536	APBD	
												27.682.063.133	2.423.723.660	10.964.700.169	13.388.423.830	48%		14.293.639.303		

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

RIDHO S.M. HUTABARAT, S.STP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19850325 200312 1 002

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja Perubahan OPD menjadi acuan untuk penyusunan perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD.

Sekretariat DPRD mengalami perubahan Anggaran mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Anggaran APBD Sekretariat DPRD Telah mengalami Perubahan dari Rp. 27.732.363.133 menjadi Rp. 27.112.598.579. Beberapa Kegiatan mengalami Efisiensi diantaranya :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
16. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
17. Pelaksanaan Reses

Pada Tahapan Rancangan Renja Perubahan 2025 sesuai dengan Surat Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 000.7/2506/2025 tanggal 09 Mei 2025 Perihal Penyampaian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah dan Kecamatan Tahun 2025 pada Tahapan tersebut Sekretariat DPRD Tapanuli Tegah mengusulkan Pagu sebesar Rp. 15.757.755.000 sehingga total pagu usulan Renja renja sebesar Rp. 42.870.353.579. Pada Tahapan penginputan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 pada Aplikasi SIPD RI yang menjadi pagu terbaru untuk diinput pada SIPD RI sebesar Rp. 29.801.023.519 dengan berdasarkan pada :

1. Sesuai degan hasil Rapat Percepatan P-RKPD 2025 di Ruang Rapat Cendrawasi pada tanggal 18 Juni 2025 ditetapkan untuk anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.2.638.785.293 yang terdiri dari penambahan untuk kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp. 2.608.785.341 dan sebesar Rp. 30.000.000 ke kegiatan Logistik Kantor.
2. Adanya penambahan anggaran Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp. 49.639.647.-

Untuk Pagu Sekretariat pada Tahapan Perubahan Renja Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari pagu Tahapan Rancangan Perubahan Renja yakni sebesar ***Rp. 29.801.023.519*** yang dinarasikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Pada Program ini ada penambahan Anggaran yaitu :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Rp. 2.403.172.750 menjadi Rp. 2.452.812.397, maka penambahan pada pagu ini sebesar Rp. 49.639.647
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu saat efisiensi sebesar Rp. 239.795.187 menjadi Rp. 435,792,579 kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 195.997.392.-, kegiatan ini bertambah karena untuk penambahan Baliho, pembelian alat rumah tangga untuk membantu kelancaran tugas Sekretariat DPRD berupa Piring, Gelas, Dll, Penambahan Anggaran untuk persiapan Hari Ulang Tahun Tapanunuli Tengah serta untuk Biaya Makan Minum Jamuan Tamu Ketua DPRD
   c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dimana pagu sebelumnya sebesar Rp. 69.185.634 menjadi Rp. 79.101.930, adanya penambahan sebesar Rp. 9.916.296 yakni penambahan pada Penggandaan dan Jilid
   d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Pagu sebelumnya Rp. 145.700.157 menjadi Rp. 190.139.007. penambahan sebesar Rp. 44.438.850 yakni adanya perubahan jenis Pengadaan bangku.
   e. Kegiatan Surat Menyurat, anggaran sebelumnya sebesar Rp. 5.051.100 menjadi Rp. 14.204.100, bertambah sebesar Rp. 9.153.000 yaitu adanya penambahan untuk biaya jasa pengiriman surat
   f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan semula Rp 245.000.000 menjadi 242.500.000 berkurang sebesar Rp. 2.500.000.-. adanya pengurangan pada biaya rekening listrik.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebelumnya sebesar Rp. 33.510.900 menjadi Rp. 32.745.000, berkurang sebesar Rp. 765.900 yakni pengurangan pada service Printer
h. Kegiatan Pelayanan Umum, pagu sebelumnya sebesar Rp. 829.316.928 menjadi Rp. 825.316.928, adanya pengurangan pada Tenaga Honorer
i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan, kegiatan ini semula Rp. 44.400.000 menjadi Rp. 111.000.000, bertambah sebesar Rp. 66.600.000 untuk rehap gedung kantor Sekretariat DPRD
j. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, pagu ini semula Rp. 165.69.649.535 menjadi Rp. 16.339.602.960 berkurang sebesar Rp. 230.046.575.-
k. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, pagu sebelumnya Rp. 122.500.000 menjadi Rp. 352.500.000 kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 320.000.000 yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas pelaksanaan Medical Check Up
l. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, pagu awal Rp. 451.559.571, pagu ini mengalami pergeseran terhadap rincian belanjanya sehingga pagunya menjadi Rp. 451.551.801

2. **Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
   a. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, untuk di Tahun 2025 dengan pergantian Anggota DPRD maka jumlah Staf Fraksi menjadi berkurang menjadi 5 orang maka pagu kegiatan ini semula Rp. 210.000.000.- menjadi Rp. 160.000.000.-. berkurang sebesar Rp. 50.000.000.-
   b. Kunjungan Kerja dalam Daerah, kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 70.000.000.-, dimana pagu semula sebesar Rp. 50.000.000 menjadi Rp. 120.000.000.-

c. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, kegiatan ini direncanakan bertambah sebesar Rp. 2.300.000.000.-, maka pagu ini dari Rp. 2.750.000.000.- menjadi Rp. 5.050.000.000.-

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	2				**SEKRETARIAT DPRD**											**27.112.598.579**	**29.801.023.519**					**29.703.705.623**
4	2	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**22.361.193.699**	**22.729.618.639**					**20.993.340.024**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**6.348.540**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD	Tersedianya Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	3.174.270
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Buku	1 Buku	1 Tahun	1 Tahun	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	3.174.270
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2.403.172.750**	**2.452.812.397**					**2.507.589.946**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.403.172.750	2.452.812.397	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur	100 Persen	2.507.589.946
4	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**217.543.275**
4	2	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu ASN dan Honorer	Terpenuhinya Kepatuhan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Kepatuhan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas	100 Persen	58.829.796
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kepatuhan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terpenuhinya Kepatuhan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas	100 Persen	158.713.479

4	02	01	2.05	11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**572.706.425**	**778.620.113**				**746.411.007**
4	**02**	**01**	**2.06**		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggranya administrasi perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Listrik/Penerangan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	39.429.753	39.429.753	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	33.685.677
4	2	1	2,06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggranya administrasi perkantoran	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	142.339.851	142.339.851	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	121.679.762
4	2	1	2,06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggranya administrasi perkantoran	Tersedianya Penyediaan Makanan/Minuman, Plakat dan Spanduk	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	239.795.187	435.792.579	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	238.468.832
4	2	1	2,06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggranya administrasi perkantoran	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	69.185.634	79.101.930	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	131.488.860
4	2	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	Tersedianya Bahan Bacaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	1 Tahun	3 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4.956.000	4.956.000					9.469.904
4	2	1	2,06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggranya administrasi perkantoran	Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Dalam Kota dan Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	77.000.000	77.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	211.617.972
4	2	1	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**145.700.157**	**190.139.007**					**269.878.611**
4	2	1	2,07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	145.700.157	190.139.007	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 Persen	269.878.611
4	**02**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											1.112.878.928	1.114.766.028					1.191.550.236
4	02	01	2.07	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggranya administrasi perkantoran	Tersedianya Materai	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	700 Lembar	700 Lembar	1 Tahun	1 Tahun	5.051.100	14.204.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100 Persen	7.406.629
4	**02**	**01**	**2.08**		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggranya administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	245.000.000	242.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100 Persen	279.388.627
4	2	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggranya administrasi perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	33.510.900	32.745.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100 Persen	34.916.965
4	2	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggranya administrasi perkantoran	Tersedianya Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan Alat/Bahan Kebersihan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	829.316.928	825.316.928	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100 Persen	869.838.015
4	2	1	2,08	03	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**341.101.700**	**407.701.700**					**596.786.876**
4	2	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mendukung operasional Kedinasan	Tersedianya BBM, Oli, Pajak Kenderaan Dinas dan Pemeliharaan Kenderaan Dinas	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	255.076.700	255.076.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Kedinasan	100 Persen	333.298.306

4	**02**	**01**	**2.09**		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mendukung operasional Kedinasan	Terpeliharanya Gedung Kantor	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	44.400.000	111.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Kedinasan	100 Persen	96.372.570
4	2	1	2,09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mendukung operasional Kedinasan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	41.625.000	41.625.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Kedinasan	100 Persen	167.116.000
4	2	1	2,09	09	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**17.334.074.168**	**17.334.027.593**					**15.276.722.228**
4	2	1	2,09	10	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	Meningkatnya Kinerja DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	16.569.649.535	16.339.602.960	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kinerja DPRD	100 Persen	14.614.372.228
4	**02**	**01**	**2.15**		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD	Meningkatnya Kinerja DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	175 Stell	175 Stell	1 Tahun	1 Tahun	641.924.633	641.924.633	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kinerja DPRD	100 Persen	662.350.000
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD	Meningkatnya Kinerja DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	35 Org	35 Org	1 Tahun	1 Tahun	122.500.000	352.500.000			Meningkatnya Kinerja DPRD	100 Persen	127.199.223
4	02	01	2.15	01	**Layanan Administrasi DPRD**											**451.559.571**	**451.551.801**					**180.509.305**
4	02	01	2.15	02	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Rapat-rapat DPRD	Meningkatnya Layanan Administrasi Untuk DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	451.559.571	451.551.801	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Layanan Administrasi Untuk DPRD	100 Persen	180.509.305
4	**02**	**01**	**2.16**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**4.751.404.880**	**7.071.404.880**					**8.710.365.599**
4	2	1	2,16	03	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**13.494.270**	**13.494.270**					**529.045**
4	2	2			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Rapat DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	4 Kpts	4 Kpts	1 Tahun	1 Tahun	13.494.270	13.494.270	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Rapat DPRD	100 Persen	529.045
4	**2**	**2**	**2**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**											**251.720.250**	**251.720.250**					**261.721.857**
4	2	2	2,01	02	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Kesepakatan Bersama	1 Kesepakatan Bersama	1 Tahun	1 Tahun	67.307.070	67.307.070	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	100 Persen	69.939.729
4	**2**	**2**	**2**		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Kesepakatan Bersama	1 Kesepakatan Bersama	1 Tahun	1 Tahun	51.783.720	51.783.720	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	100 Persen	53.783.184
4	2	2	2,02	01	Pembahasan APBD	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasaan APBD	Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Keputusan Ranperda	1 Keputusan Ranperda	1 Tahun	1 Tahun	45.901.830	45.901.830	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	100 Persen	47.682.957
4	2	2	2,02	02	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasaan APBD Perubahan	Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Keputusan Ranperda	1 Keputusan Ranperda	1 Tahun	1 Tahun	41.133.270	41.133.270	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	100 Persen	42.715.437
4	2	2	2,02	03	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Rapat Pembahasaan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Keputusan Ranperda	1 Keputusan Ranperda	1 Tahun	1 Tahun	45.594.360	45.594.360	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	100 Persen	47.600.550
4	2	2	2,02	04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**1.033.485.435**	**983.485.435**					**817.459.571**
				01	Orientasi DPRD	Meningkatnya Kelancaran Tugas DPRD	Terlantiknya Anggota DPRD Baru	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan,	100 Persen	100 Persen	1 Kali	1 Kali	1 Tahun	1 Tahun	280.000.000	280.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 Persen	

				02	Pendalaman Tugas DPRD	Meningkatnya Kelancaran Tugas DPRD	Terlaksananya Bimtek/Workshop/Diklat DPRD	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Kali	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	500.000.000	500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 Persen	529.044.930
4	2	2	2,04	03	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Meningkatnya Kelancaran Tugas DPRD	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Org	1 Org	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 Persen	38.091.235
4	2	2	2,04	04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	7 Orang	7 Orang	1 Tahun	1 Tahun	210.000.000	160.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 Persen	222.198.870
4	**2**	**2**	**2**	05	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya Dokumentasi Dewan	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	13.485.435	13.485.435	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 Persen	28.124.536
4	2	2	2,04	03	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**702.704.925**	**772.704.925**					**1.270.670.693**
4	2	2	2,04	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Kecamatan	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100 Persen	529.044.930
				02	Pelaksanaan Reses	Meningkatnya Kinerja DPRD	Terlaksananya Reses Dewan	Terlaksananya Pembangunan Untuk Masyarakat	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	652.704.925	652.704.925	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Pembangunan Untuk Masyarakat	100 Persen	741.625.763
4	2	2	2,05	01	**Fasilitasi Tugas DPRD**											**2.750.000.000**	**5.050.000.000**					**6.359.984.433**
4	**2**	**2**	**2,1**		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Dalam/Luar Provinsi dan Kunjungan Kerja DPRD	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan	100 Persen	100 Persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.750.000.000	5.050.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100 Persen	6.359.984.433

Pandan, Juli 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

RIDHO S.M. HUTABARAT, S.STP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19850325 200312 1 002

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tepanuli Tengah selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025.

Dengan disusunnya Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan I. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Demikian Perubahan Renja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya.

Pandan, 20 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

RIDHO S.M. HUTABARAT, S.STP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19850325 200312 1 002

Dipindai dengan CamScanner